



KEMENTERIAN  
PERDAGANGAN  
REPUBLIC INDONESIA

# K

Vol. 2 No. 2 Tahun 2023

# OMPETEN

(Kanal Informasi dan Media Publikasi Talenta Perdagangan)



## Wawancara Eksklusif

**Bapak Suhanto,**

Analisis Perdagangan Ahli Utama /  
Plt. Sekretaris Jenderal

## Kesiapan Pejabat Fungsional bidang Perdagangan melakukan transisi menuju Ibu Kota Nusantara (IKN)

Liputan Utama dengan Direktur Perencanaan Makro  
Kedeputian Perencanaan dan Pertanahan OIKN,  
Bapak Agustomi Masik



## NUSANTARA

Hotline Kami :  +6282118687772  pusbinjfdag

 Pusbin JF Perdagangan

 bangga  
melayani  
bangsa

# DAFTAR ISI

## 2 Salam Redaksi

## 3 Wawancara Eksklusif



KESIAPAN PERPINDAHAN ASN KE IBU KOTA NUSANTARA (IKN)

## 10 Wawancara Eksklusif



*"Kita dukung program pemerintah untuk mencapai Indonesia Emas Tahun 2045 dengan SDM yang handal dan pintar"*

## 14 Putra Astaman

Mendorong Terbentuknya Organisasi Profesi Penera Sebagai Upaya

## 17 Dedi Kuswandi

Kesiapan Pejabat Fungsional Perdagangan melakukan Transisi menuju Ibu Kota Nusantara (IKN)

## 22 Permadi Sindar

Simplifikasi Birokrasi sebagai Langkah Kebijakan Pelayanan Publik yang Efektif dan Efisien

## ARTIKEL

## 28 Indra Satria Siburian dan Hema Ardria Dandaniti

Fasilitasi Pengembangan Produk dan Kemasan: Bagian Kecil Dari Peran Pemerintah Secara Holistik Melalui Direktorat Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri, Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri, Kementerian Perdagangan Dalam Pemberdayaan Terhadap UMKM

## 33 J. Hendra Humberto Lbn. Tobing

Pengawas Kemetrolgion Ahli Pertama Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Deli Serdang

## 39 Mohamad Nurdinsyah Ekapujakesuma

Metrologi dalam Agama : Penera, diantara Pahala atau Dosa Jariyah

## 42 Victor Tulus Pangapoi Sidabutar

Peran Penting Kompetensi Perdagangan Internasional bagi Pejabat Fungsional Bidang Perdagangan

## 48 Helganita Deviyanti Sinaga

Ibu Kota Nusantara, Harapan Baru Untuk Pengembangan Ekspor dari Perbatasan Kalimantan

## 53 Andri Akbar Awaluddin

Urgensi Pengembangan Sekolah Perdagangan dalam Rangka Perpindahan Ibu Kota Negara

## 58 Penny Chariti Lumbanraja

Kesiapan Pejabat Fungsional Bidang Perdagangan dalam Menyongsong Ibu Kota Nusantara (IKN): Sebuah Pandangan Opini

## 63 Mochamad Ibnu Athoillah

Kesiapan Pejabat Fungsional Kemetrolgion dalam Melakukan Transisi Menuju Ibu Kota Nusantara

## Salam Redaksi

### Halo Aparatur Perdagangan

Puji Syukur kepada Tuhan yang Maha Esa sehingga Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Perdagangan, Kementerian Perdagangan dapat menerbitkan Majalah KOMPETEN edisi kedua ini sebagai media komunikasi untuk para sobat SDM Fungsional bidang Perdagangan.

Sebagaimana Namanya, Majalah KOMPETEN diharapkan dapat menjadi kanal informasi dan pengetahuan serta pengalaman di bidang Fungsional Perdagangan untuk para sobat SDM Fungsional Perdagangan, pelaku usaha dan Masyarakat luas. Majalah ini merupakan hasil tulisan para sobat SDM Fungsional Perdagangan dari seluruh Indonesia yang penuh semangat untuk menyampaikan tema seputar pengetahuan dan informasi terkait kegiatan di bidang Fungsional di bidang Perdagangan, yang ditulis dalam Bahasa yang mudah dipahami.

Kami dari tim redaksi mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah ikut berpartisipasi untuk terbitnya majalah ini. Kami berharap agar majalah KOMPETEN ini dapat memberikan manfaat bagi para pembaca dalam menambah wawasan serta memberikan kontribusi yang berarti terhadap kegiatan Fungsional bidang Perdagangan di Indonesia. Kami tentunya menyadari bahwa dalam tulisan majalah ini masih banyak kekurangan. Oleh karena itu, kami mohon maaf atas kekurangan yang ada dan selalu menerima masukan, kritik, dan saran dari pembaca sebagai bahan evaluasi untuk kedepannya. Akhir kata selamat membaca, tetap semangat berkarya untuk kita semua.

Salam Hangat,  
Tim redaksi.

#### TIM REDAKSI

**Pimpinan Redaksi**  
Sri Iryanti, S.E., M.M

**Dewan Redaksi**  
Amir Syarifuddin, S.Psi

**Editorial Pelaksana**  
Claudia Frederika M, S.T., MSE, MMSI  
Tenny Tia Puspita, ST  
Puspitasari Dewi Setiawan, A.Md

**Desain Grafis**  
Febri Surya Pranata, A.Md  
Yusuf Surya Hidayat Suryono, S.Kom

**Sekretariat:**  
Yul Meilani, A.Md

#### Alamat Sekretariat Redaksi

**Kantor Utama Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Perdagangan**  
Jl. Daeng Muhammad Ardiwinata  
Km 3,4 Cihanjuang, Parongpong  
Bandung Barat 40556  
Tel. 022-6610863 Fax. 022-6611053

**Kantor Layanan Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Perdagangan**  
Kementerian Perdagangan, Gedung Utama  
Lantai 7, Jl. M.1 Ridwan Rais No.5,  
Jakarta Pusat 10110  
Tel. 021-23528400 Ext. 32907

**"Setiap ASN harus mempunyai orientasi yang sama, yaitu memberikan pelayanan terbaik untuk Masyarakat. ASN bukan pejabat yang justru minta dilayani, yang bergaya seperti pejabat zaman kolonial dulu"**

**-Presiden RI Joko Widodo-**

# KESIAPAN PERPINDAHAN ASN KE IBU KOTA NUSANTARA (IKN)

Wawancara eksklusif dengan Direktur Perencanaan Makro,  
Kedeputan Bidang Perencanaan dan Pertanahan Otorita Ibu Kota  
Nusantara, BAPAK AGUSTOMI MASIK

Oleh: Adl Candra Purnama, S.T.

Kepala Bagian Tata Usaha Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Perdagangan

Untuk rubik khusus pada Majalah KOMPETEN volume 2 nomor 2, kali ini tim Majalah KOMPETEN secara eksklusif melakukan wawancara kepada Bapak Agustomi Masik, yang merupakan Direktur Perencanaan Makro Kedeputan Perencanaan dan Pertanahan Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN). Wawancara ini dilakukan pada hari Rabu, tanggal 22 November 2023, bertempat di Kantor Otorita Ibu Kota Nusantara, Menara Mandiri Jakarta Selatan.

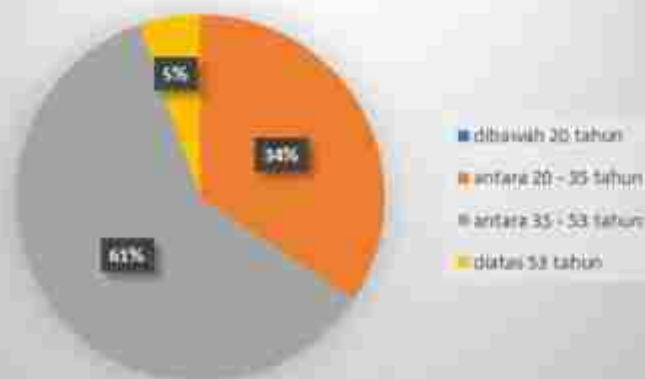
Wawancara yang dilakukan mengungkap tema "Kesiapan Perpindahan ASN ke Ibu Kota Nusantara (IKN)". Seperti yang telah diketahui, saat ini pemerintah pusat sedang menyiapkan pemindahan Ibu Kota Indonesia dari Jakarta ke Nusantara, Kalimantan Timur. Seiring dengan perpindahan Ibu Kota Negara Indonesia ke Kalimantan Timur, Aparatur Sipil Negara (ASN) di berbagai instansi pusat akan dipindahtugaskan ke ibu kota negara yang baru. Oleh sebab itu, tim Majalah KOMPETEN telah melakukan survei untuk mengetahui kesiapan dan bagaimana pandangan para Jabatan Fungsional di Bidang Perdagangan,

(RUBIK KHUSUS "KOMPETEN"  
VOLUME 2 NOMOR 2 TAHUN  
2023)

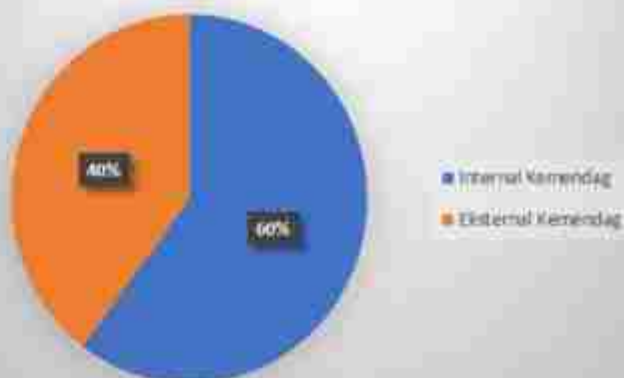
baik yang berada pada internal maupun eksternal Kementerian Perdagangan, terhadap pemindahan ini. Adapun data demografi dari hasil survei yang dilakukan dapat dilihat pada Gambar 1, sedangkan rangkuman dari tanggapan, harapan, serta concern atau pertanyaan dari para responden terhadap perpindahan ASN ke IKN dapat dilihat pada Gambar 2.

Jumlah responden yang ikut serta dalam mengisi survei ini adalah sebanyak 73 responden, dapat dilihat pada Gambar 1 bahwa sebanyak 60% responden berasal dari internal Kementerian Perdagangan (Kemendag) dan 40% responden berasal dari eksternal Kemendag. Pengisian survei ini didominasi oleh pegawai dengan rentang usia 35-53 tahun yaitu sebanyak 61%. Sebanyak 94% dari jumlah responden merupakan pegawai dengan jabatan fungsional di bidang perdagangan yang memang merupakan target responden utama untuk pengisian survei ini, dan terdapat 6% dari jumlah responden dengan jabatan lain di luar jabatan fungsional di bidang perdagangan.

Usia Responden

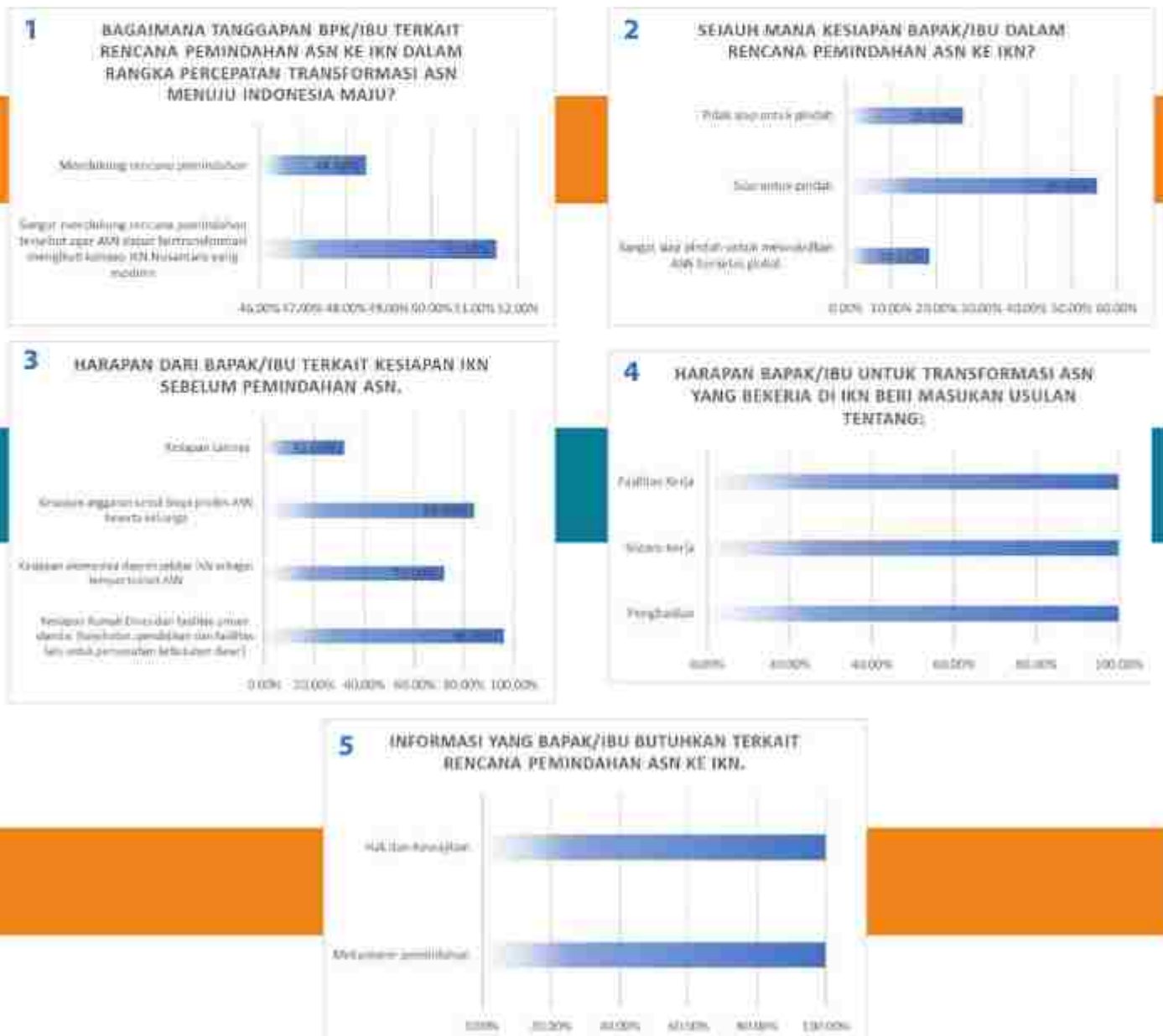


Asal Unit Responden





Gambar 1. Data Demografi Responden



Gambar 2. Rangkuman Tanggapan Responden

Dari Gambar 2 (Poin 1) dapat dilihat bahwa sekitar 52% pejabat fungsional bidang perdagangan sangat mendukung rencana pemindahan ASN ke IKN, dan sekitar 48% sisanya mendukung dengan mempertimbangkan beberapa hal. Yang menjadi pertimbangan responden terhadap pemindahan ASN ke IKN ini adalah berkaitan dengan fasilitas, baik fasilitas primer maupun pendukung, serta sarana prasarana yang disiapkan oleh pemerintah, yaitu tempat tinggal, transportasi, harga kebutuhan pokok, fasilitas kesehatan, sekolah, pasar rakyat/swalayan, perbankan, dan usaha jasa lainnya yang sekiranya akan dibutuhkan untuk menunjang kehidupan sehari-hari.

Berikutnya, berdasarkan Gambar 2 (Poin 2), dapat dilihat bahwa sekitar 74% responden siap untuk pindah ke IKN serta siap mewujudkan ASN berkelas global dan beberapa responden menulis masih mempertimbangkan beberapa hal, yang mayoritas pertimbangannya adalah sama dengan Poin 1, yaitu berkaitan dengan kesiapan fasilitas yang disediakan. Sedangkan, hampir 26% responden menyatakan belum siap dengan mayoritas alasannya dikarenakan faktor keluarga.

Hasil survei untuk Poin 3 pun masih sejalan dengan poin-poin sebelumnya, yaitu untuk harapan dari responden terkait kesiapan sebelum kepindahan ASN ke IKN, responden tertarik dan ingin tahu bagaimana kesiapan rumah dinas, fasilitas umum, anggaran yang disiapkan untuk masing-masing ASN, serta akomodasi di lingkungan sekitar IKN.

“ Berdasarkan hasil survei yang dilakukan, responden (ASN JF Perdagangan) tertarik dan ingin tahu bagaimana kesiapan fasilitas (rumah tinggal, sekolah, kesehatan, dll), insentif, serta bagaimana mekanisme perpindahan yang akan dilakukan. ”

Selanjutnya, untuk Poin 4 dan Poin 5, responden memiliki harapan dengan adanya rencana transformasi sistem kerja berkelas global yang dinamis dan fleksibel di IKN, maka diharapkan pemerintah juga dapat menyesuaikan fasilitas dan penghasilan yang akan diberikan. Selain itu, banyak dari responden yang memiliki pertanyaan untuk dikonfirmasi terkait bagaimana mekanisme pemindahan serta hak dan kewajiban apa saja yang akan diperoleh nantinya untuk ASN yang akan dipindahkan ke IKN, mengingat banyaknya informasi yang beredar di media sosial.

Berdasarkan paparan hasil survei kepada para pejabat fungsional bidang perdagangan tersebut mengenai pemindahan ASN ke IKN, dapat dirangkum bahwa beberapa keraguan yang perlu dikonfirmasi serta informasi-informasi yang ingin diketahui antara lain: berkaitan dengan fasilitas (tempat tinggal, transportasi, kesehatan, sekolah, pasar, perbankan, dan jasa lainnya), insentif (uang pindah, tunjangan kemahalan, dan tunjangan lainnya), serta bagaimana mekanisme pemindahan yang akan dilakukan, terutama untuk Kloter pertama yang rencananya akan dilaksanakan pada tahun 2024.

Gambar 3: Titik Nol Nusantara IKN (Kalimantan Timur)





Gambar 4. Wawancara dengan Bapak Agustomi Masik



Berdasarkan hasil survei tersebut, tim Majalah KOMPETEN mencoba menemukan jawaban atas beberapa pertanyaan terkait concern pejabat fungsional bidang perdagangan mengenai kepindahan ASN ke IKN dengan melakukan wawancara kepada perwakilan dari OIKN, yaitu Bapak Agustomi Masik. Di awal pembahasan, Bapak Agustomi Masik memulai dengan menceritakan latar belakang dan cita-cita pembangunan Ibu Kota Nusantara.

*"Wacana berdirinya IKN ini telah dimulai sejak zaman Bapak Soekarno masih menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia (RI) pada tahun 1959. Telah dilakukan berbagai upaya untuk mencari lokasi yang cocok,*

*termasuk beberapa kali melakukan survei ke beberapa wilayah di Indonesia. Selain itu, Indonesia memiliki persoalan sejak 20 tahun yang lalu, yaitu adanya regional imbalance. 10 tahun yang lalu, PDB nasional disumbang oleh Pulau Jawa sebesar 60%, dari Pulau Sumatera sekitar 20%, artinya lebih dari 80% PDB Indonesia disumbang oleh Pulau Jawa dan Sumatera.*

*Kondisi terakhir pada tahun 2022, perubahan yang terjadi hanya sedikit, dimana pulau Jawa menyumbang sebanyak 59%, Pulau Sumatera naik menjadi 22%, Papua hanya menyumbang 2,5%, Kalimantan naik dari 5% menjadi 7%. Dampak regional imbalance ini tidak hanya ke bidang ekonomi, tetapi juga ke bidang sosial, politik, juga ke perdagangan, karena jika regional imbalance masih tinggi, maka akan berdampak ke logistik.*

*Logistik Indonesia saat ini masih menjadi yang termahal di Asia, yaitu sebesar 24% dari PDB. Sebagai contoh kasus, pada tahun 2016, di Pelabuhan Ambon, tingkat keterisian kontainer yang membawa barang hanya sebesar 20%, sisanya kosong. Untuk itu, dengan memindahkan ibu kota negara ke luar Pulau Jawa, maka diharapkan dapat mengurangi bahkan menghilangkan persoalan regional imbalance ini.*

*Pada Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2022 tentang Perincian Rencana Induk Ibu Kota Nusantara, sudah ada klausul yang membahas mengenai hubungan rencana Pembangunan IKN dengan penggerak ekonomi masa depan, dimana IKN dan Kalimantan Timur diharapkan menjadi pusat*

**“ IKN dan Kalimantan Timur diharapkan menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru Indonesia. Untuk mewujudkan hal tersebut, yang harus dilakukan dan merupakan salah satu cita-cita besar juga adalah bagaimana kita mengubah struktur ekonomi, dari yang saat ini dominan primer, menjadi lebih ke sekunder dan tersier. Ini berarti fokusnya tidak lagi dominan di primer (pengolahan sumber daya alam), tetapi lebih di manufaktur, perdagangan, dan jasa. ”**

**-Agustomi Masik-**

*pertumbuhan ekonomi baru Indonesia. Untuk mewujudkan hal tersebut, yang harus dilakukan dan merupakan salah satu cita-cita besar juga adalah bagaimana kita mengubah struktur ekonomi, dari yang saat ini dominan primer, menjadi lebih ke sekunder dan tersier. Ini berarti fokusnya tidak lagi dominan di primer (pengolahan sumber daya alam),*

*tetapi lebih di manufaktur, perdagangan, dan jasa. Ini yang dimaksud mengubah struktur ekonomi yang sedang dicita-citakan saat ini. Berkaitan dengan hal tersebut, Perdagangan menjadi aspek yang sangat penting terkait pembangunan IKN, kenapa? Karena perpindahan ini salah satu tujuannya adalah menjadikan IKN menjadi penggerak pertumbuhan ekonomi Indonesia di masa depan.*

Bapak Agustomi menyebut keraguan terhadap banyak hal dan berbagai pertimbangan dari ASN untuk pindah ke IKN merupakan sesuatu hal yang sangat wajar.

*"Keraguan yang dialami ASN menuju transisi ini merupakan hal yang wajar karena mereka akan keluar dari zona nyaman masing-masing dan akan menghadapi situasi yang baru. Bercerita sedikit dari pengalaman, sebelumnya saya merupakan pegawai PUPR yang awalnya tidak memiliki keinginan untuk mendaftar ke OIKN, saya sudah lama bekerja di bidang tata ruang dan sudah sangat menguasai substansinya, juga memiliki tim yang sudah kuat dengan target-target kinerja yang besar. Tetapi atas motivasi dari rekan-rekan lain, akhirnya saya memutuskan untuk keluar dari tata ruang saat ini dan keluar dari zona nyaman untuk bergabung ke OIKN, untuk membangun kehidupan baru. Memang untuk membangun suatu kehidupan baru ini membutuhkan jiwa berani bertransformasi. Kehidupan baru ini, berdasarkan Rencana Induk Ibu Kota Nusantara, Presiden Joko Widodo menyebutnya dengan sebutan Indonesia Next, dimana akan banyak dilakukan transformasi, seperti transformasi bekerja, transformasi komunitas, transformasi bermukim, yang berarti akan ada lompatan-lompatan besar untuk kehidupan baru, dilihat dari sisi smart city dan e-governance, karena dalam rangka Indonesia Next, organisasi harus bertransformasi menjadi organisasi yang agile. Namun, goal tersebut tentunya membutuhkan proses."*

*Untuk mengurangi keraguan, saya rekomendasikan untuk penting melihat secara langsung (site visit) pembangunan yang sedang dilakukan di IKN. Akan jauh lebih baik untuk mengetahui prosesnya secara langsung dan tidak hanya mengetahui bagaimana proses pembangunan IKN dari pihak OIKN, pemerintah, dan media. Seeing is believing."*

Selanjutnya, Bapak Agustomi membahas mengenai hal utama yang banyak ditanyakan dari hasil survei yang dilakukan sebelumnya kepada pejabat fungsional di bidang perdagangan, yaitu berkaitan dengan fasilitas, insentif, mekanisme perpindahan ASN ke IKN, serta program dan rencana apa saja yang sedang disiapkan oleh pemerintah berkaitan dengan perpindahan ASN ke IKN.

*"BKN dan KemenPANRB sudah melakukan one-o-one meeting, termasuk ke Kementerian Perdagangan, berkaitan dengan pemindahan ASN ke IKN. BKN sudah memetakan kriteria pegawai yang bisa diberangkatkan ke IKN. Pihak OIKN juga sudah melakukan koordinasi dengan KemenPANRB terkait program bagaimana menyiapkan teman-teman ASN yang akan dipindahkan ke IKN untuk beradaptasi dengan kehidupan yang baru. Program ini akan disusun oleh KemenPANRB dan bekerja sama dengan LAN."*

*"saat ini, proses penyusunan Peraturan Presiden (Perpres) terkait pemindahan ASN ke IKN sedang dilakukan, dan salah satu ide dalam Perpres ini adalah akan dibentuk wadah nasional dengan koordinasi yang kuat antar lembaga, dibahas juga penentuan K/L mana saja yang duluan pindah dan kuotanya."*

**-Agustomi Masik-**



Gambar 5. Site Visit Pusbin JF Perdagangan ke IKN



"Selain itu, saat ini, proses penyusunan Peraturan Presiden (Perpres) terkait pemindahan ASN ke IKN sedang dilakukan, dan salah satu ide dalam Perpres ini adalah akan dibentuk wadah nasional dengan koordinasi yang kuat antar lembaga, dibahas juga penentuan K/L mana saja yang duluan pindah dan kuotanya. Perpindahan ini tidak hanya untuk ASN, tetapi yang lainnya juga seperti TNI, POLRI, dan Perwakilan Negara Asing. Yang akan dipersiapkan pertama adalah Pokja ASN, lalu Pokja HanKam, dan pokja-pokja yang lain. Untuk ASN, pokja akan dikoordinir oleh KemenPANRB. Proses penyusunan ini ditargetkan selesai pada Februari 2024. Hasil diskusi multilateral meeting dengan BAPPENAS, disebutkan bahwa K/L harus menyiapkan dulu anggaran masing-masing untuk perpindahan ini.

Bersamaan dengan penyusunan perpres pemindahan ASN ke IKN, terkait insentif yang kami lebih menyebutnya dengan kata "benefit", akan diatur pada Peraturan Presiden tersendiri yang saat ini sudah berproses, yang sedang disusun oleh PANRB, Kementerian Keuangan, dan BAPPENAS. Sudah disebutkan pula di rencana induk bahwa ASN yang pindah akan mendapatkan rumah tinggal fully-furnished dan insentif.

Terkait fasilitas sekolah, selain akan membangun sekolah bertaraf internasional, sekolah-sekolah negeri yang sudah ada di sekitar wilayah IKN akan di-upgrade dan akan dijadikan sekolah-sekolah unggulan. Intinya adalah kita ingin membangun ekosistem yang lebih baik, dengan eksekusi yang membutuhkan proses karena ini adalah rencana jangka panjang.

Lalu selanjutnya, terkait fasilitas kesehatan, alhamdulillah beberapa waktu lalu sudah dilakukan groundbreaking Rumah Sakit Hermina (swasta). Kementerian Kesehatan juga menyebutkan akan membangun Rumah Sakit Pusat Rujukan Nasional, dengan dana yang sudah disetujui sebesar 900 milyar rupiah. Selain itu, akan dibangun juga rumah sakit seperti RSPAD. Salah satu prinsip pemerintahan yang bagus adalah steering rather than rowing, bahwa pemerintah itu lebih ke mengarahkan, bukan memberi pelayanan secara langsung, tapi memastikan bahwa pelayanan tersebut sampai ke masyarakat."

“ terkait insentif yang kami lebih menyebutnya dengan kata "benefit", akan diatur pada Peraturan Presiden tersendiri yang saat ini sudah berproses, yang sedang disusun oleh KemenPANRB, Kementerian Keuangan, dan BAPPENAS. ”

-Agustomi Masik-



Gambar 6. Proses pembangunan gedung fasilitas di IKN per 7 Desember 2023



Bapak Agustomi juga membahas mengenai kapan rencana dan bagaimana mekanisme atau prosedur pemindahan yang akan dilakukan di tahun 2024.

*"Adapun goal kita saat ini adalah bagaimana membuat ekosistem yang lengkap, sehingga nanti pada saat ASN pindah, semua hal yang diperlukan sudah benar-benar siap dan layak. Tahun 2022 kemarin, dilakukan kerjasama dengan konsultan internasional dalam membuat kajian livability dan lovability, artinya kita tidak hanya cukup dengan livability, tetapi juga harus lovability, sehingga kita juga memperhatikan bagaimana orang-orang akan 'keras' dan nyaman. Namun, kembali ke pernyataan awal bahwa untuk mencapai hal tersebut, semua butuh proses.*

*Berkaitan dengan mekanisme atau prosedur pemindahan ASN yang saat ini sudah direncanakan, dari sisi perencanaannya memang pasti ada target, namun pelaksanaannya belum tentu dapat tercapai exact pada target awal.*

*Untuk saat ini, pembahasan lembaga mana saja dulu yang akan pindah beserta kuotanya masih belum final, karena masih menunggu infrastruktur yang terinstall di sana. Ketidakpastian ini juga dipengaruhi oleh pandemic covid yang terjadi, karena kalau di skenario awal, diasumsikan pembangunan sudah bergerak sejak tahun 2021 awal, namun dikarenakan terjadi pandemic covid, konstruksi perumahan baru bisa dilakukan di tahun 2022. Untuk mekanisme pemindahan ASN ke IKN, akan diatur oleh tim pokja gabungan antar K/L, yang nanti akan dibentuk untuk pengaturan pemindahan ASN. Telah disiapkan juga training bagi ASN untuk penyiapan transformasi ke IKN. Pemerintah menjamin kesiapan seluruh fasilitas sebelum ASN dipindahtugaskan ke IKN.*

*Sebagai penutup, Bapak Agustomi menyebutkan bahwa "Kita memang dituntut agile, namun penyusunan kebijakan harus disesuaikan dengan banyak kondisi. Kita berharap saat perpindahan nanti, teman-teman ASN akan mendapatkan fasilitas dan kondisi yang siap, layak, dan baik."*



Gambar 7. Proses pembangunan rumah tinggal ASN di IKN per 7 Desember 2023

## Wawancara Eksklusif: Suhanto, Pejabat Fungsional Analisis Perdagangan Ahli Utama / Plt. Sekretaris Jenderal

Oleh: Adi Candra Purnama, S.T.

Kepala Bagian Tata Usaha Pusat Pembinaan  
Jabatan Fungsional Perdagangan

**S**osok Suhanto sudah tidak asing lagi di lingkungan Kementerian Perdagangan. Pak Hanto—demikian sapaannya—telah memulai kariernya sebagai Aparatur Sipil Negara sejak 40 tahun yang lalu tepatnya bulan Oktober Tahun 1983 silam. Pertama bergabung dengan Kementerian Perdagangan, Beliau hanya bermodalkan ijazah SMA dan mulai dari posisi bawah sebagai staf, dan semua pekerjaan masih dilakukan secara manual seperti untuk mengetik masih menggunakan mesin tik manual, belum didukung dengan kemajuan teknologi seperti sekarang ini. Namun hal ini tidak menyurutkan langkah Beliau untuk mencapai cita-citanya, malah memacu Beliau untuk terus mengembangkan diri dan kompetensinya salah satunya dengan meningkatkan Pendidikan sampai ketinggian Sarjana. Kepada Tim Majalah Kompeten, Pak Hanto menceritakan pengalamannya dan mengungkapkan sejumlah hal penting dan menarik lainnya. Berikut ini petikan hasil wawancara dengan Pak Hanto:

### Hal apa yang menjadi pencapaian terbesar dalam perjalanan karir Bapak?

Pencapaian terbesar saya pada saat Tahun 2021 kemarin, dimana pada saat itu, Saya diusulkan oleh Bapak Menteri Perdagangan, Bapak Zulkifli Hasan untuk mewakili Kementerian Perdagangan, Saya merasa sangat bangga karena berhasil masuk 10 besar dalam kompetisi ASN berprestasi Tingkat Nasional bagi Pejabat Eselon I (Jabatan Pimpinan Tinggi Madya) yang diselenggarakan oleh Kementerian PANRB. Hal ini membuktikan prestasi Saya ditingkat nasional, untuk dapat mencapai prestasi ini harus mempunyai rekam jejak kepegawaian dan hukum yang sangat baik dan dapat menunjukkan hasil karya yang dapat dinikmati oleh masyarakat Indonesia secara umum.

Selain itu, Saya juga merasa bangga karena pada tahun 2023, Saya ASN pertama dari Kementerian Perdagangan yang mendapatkan Piagam Penghargaan Satyalancana Wira Karya. Penghargaan Satyalancana Wira Karya merupakan capaian tertinggi untuk ASN karena diberikan langsung oleh Bapak Presiden. Penghargaan ini merupakan penghargaan kepada seorang ASN yang mempunyai rekam jejak dan karya yang dapat dinikmati oleh masyarakat secara luas.

Apakah Bapak dapat menceritakan hasil karya/Inovasi Bapak yang berkontribusi dan dapat dinikmati oleh masyarakat Indonesia secara luas?

Pada tahun 2014, Bapak Presiden Joko Widodo, mengarahkan agar setiap Kementerian/Lembaga dapat menyiapkan inovasi yang berdampak langsung pada masyarakat. Kebetulan saat itu, Saya menjabat sebagai Sekretaris Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri. Saya memperhatikan survei yang telah dilakukan Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri pada tahun 2012 yang menunjukkan dari 10.000 pasar tradisional, terdapat 70% pasar yang kondisinya rusak berat.

Kondisi ini mencetuskan ide untuk dilakukan revitalisasi agar nanti keberadaan pasar tradisional ini tidak akan tergerus dengan pasar-pasar modern yang terus berkembang masuk sampai ke pelosok-pelosok tingkat kecamatan maupun kelurahan. Pasar tradisional ini bukan hanya sekedar pasar, tetapi juga ada nilai sejarah, nilai budaya dan nilai ekonomis, dan juga sebagai tempat interaksi antar masyarakat Indonesia.

Ide ini kemudian dituangkan dalam bentuk inovasi untuk membangun pasar tradisional "Pasar Rakyat" sebanyak 5.000 pasar selama 5 tahun yang disampaikan kepada Bapak Presiden dan masuk menjadi salah satu program Nawa Cita sebagai agenda prioritas untuk perubahan menuju Indonesia maju.

Setelah itu kami lakukan launching di Purwokerto sebagai tonggak awal dimulainya pembangunan pasar rakyat ini yang didukung oleh Kementerian Keuangan dari sisi anggaran. Alhamdulillah, pada tahun 2019, terealisasi 5.252 pasar yang sudah direvitalisasi. Sampai saat ini program revitalisasi pasar rakyat masih terus berjalan sampai semua pasar rakyat di Indonesia selesai direvitalisasi. Hasil dari program ini tentu membuat kita bangga, apabila kita pergi ke pasar rakyat, kita dapat merasakan kondisi yang nyaman, bersih untuk berbelanja, dll.



Bagaimana strategi Bapak dalam mengelola dan memimpin tim/staf Bapak sampai Bapak berhasil pada posisi Bapak saat ini?

Saya sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu Wata'ala karena Saya dapat menduduki jabatan dan pangkat/golongan ruang sampai yang tertinggi untuk ASN. Saya dalam mengelola dan memimpin selalu menekankan kepada ASN di lingkungan Kementerian Perdagangan, yaitu 4 prinsip dalam bekerja, yaitu: pertama bekerja keras, artinya kita harus bekerja dengan sungguh-sungguh, kedua bekerja cerdas, dengan bekerja cerdas apapun bisa kita capai, ketiga bekerja tuntas, artinya bekerja harus selesai, jangan tanggung-tanggung, sedangkan yang terakhir bekerja ikhlas artinya bekerja jangan dijadikan beban tetapi kita bekerja juga sebagai ibadah.

Sebagai pimpinan, Saya menggunakan 3 filosofi, yaitu Momot (kita sebagai pimpinan harus mampu menampung situasi orang lain dan tidak mudah menyalahkan bawahan), Momor (kita sebagai pimpinan harus mampu membaur dan tidak merasa eksklusif), dan terakhir Momong (kita sebagai pimpinan harus bisa memimpin dengan bijak).

Menurut Bapak, hal apa yang paling menantang saat Bapak menduduki Jabatan sebagai Sekretaris Jenderal?

Kedepannya Saya ingin Kementerian Perdagangan mempunyai dan didukung dengan SDM-SDM yang mumpuni. Oleh karena itu, Saya selaku Sekretaris Jenderal melalui Pusat Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Perdagangan dan Biro Organisasi dan Sumber Daya Manusia berusaha menciptakan pendidikan-pendidikan yang sifatnya substansi dan pengembangan karier sebagai pondasi dan pengembangan SDM di lingkungan Kementerian Perdagangan. Selain itu, Saya juga ingin membuat Sekolah Perdagangan yang saat ini pembahasannya sudah mendekati final. Dimana Sekolah Perdagangan ini ditujukan untuk staf sampai dengan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, diharapkan dengan adanya sekolah ini dan penerapan manajemen talenta maka SDM akan mempunyai nilai tambah disertai dengan adanya pola karier dan kompetensi dalam rangka mewujudkan Indonesia emas.

Bagaimana pendapat Bapak, dengan adanya penyederhanaan jabatan Struktural menjadi Jabatan Fungsional, dan konsolidasi 11 Jabatan Fungsional bidang Perdagangan menjadi 6 Jabatan Fungsional bidang Perdagangan?

Terkait hal ini, Saya berperan dan mendukung konsolidasi jabatan fungsional bidang perdagangan agar lebih diperluas cakupannya. Waktu itu, saat Saya masih sebagai Sekretaris Jenderal melihat terkotak-kotaknya jabatan fungsional yang ada saat itu berdasarkan unit kerja ybs. ditempatkan. Sedangkan tujuan dari Jabatan Fungsional sebagai spesialisasi sesuai dengan tugas dan fungsi jabatannya. Oleh karena itu, setelah berdiskusi dengan berbagai pihak, maka jabatan fungsional yang memang bersinggungan dapat digabungkan dari 11 Jabatan Fungsional bidang Perdagangan dikonsolidasi menjadi 6 Jabatan Fungsional bidang Perdagangan, diharapkan dengan adanya penggabungan ini dapat memberikan kesempatan yang sama dan seluas-luasnya untuk para Pejabat Fungsional yang potensial untuk dapat berperan aktif dalam melaksanakan tugas jabatannya sesuai dengan spesialisasi jabatannya.



**"Kita dukung program pemerintah untuk mencapai Indonesia Emas Tahun 2045 dengan SDM yang handal dan pintar"**

Apakah alasan Bapak memilih untuk pindah ke Jabatan Fungsional Analis Perdagangan?

Saya sangat mendukung kebijakan Bapak Presiden terkait penyederhanaan jabatan administrator menjadi jabatan fungsional. Saya melihat dengan jabatan fungsional ini nantinya kita akan mencetak SDM yang menguasai dibidangnya (spesialisasi), hal inilah yang melatarbelakangi Saya mencoba mendaftar ke jabatan fungsional Analis Perdagangan Ahli Utama, Saya berharap Saya masih bisa memberikan ilmu dan dedikasi serta mengabdikan pengalaman Saya selama ini.

Bagaimana Pandangan Bapak terkait Topik Majalah Kompeten kami kali ini yang mengusung "Transisi ASN ke IKN untuk menuju Indonesia yang lebih baik"?

Menurut Saya, perpindahan ke Ibu Kota Negara (IKN) merupakan kebijakan nasional yang sudah dikaji dengan berbagai masukan maupun tantangan. Kementerian Perdagangan sendiri sangat mendukung kebijakan tersebut. Kebetulan bulan November 2023 lalu, Saya bersama tim berkemampuan berkunjung ke IKN untuk melihat persiapan perpindahan pegawai Kementerian Perdagangan. Pada kesempatan ini, saya berpesan kepada para ASN baik di Kementerian/Lembaga di seluruh Indonesia, berdasarkan informasi dari Otorita IKN, bahwa untuk konsep yang dipersiapkan oleh Negara sudah termasuk fasilitas dan sarana prasarana walaupun semua persiapan akan diselesaikan secara bertahap. Sedangkan dari sisi Kementerian Perdagangan, kami sangat mendukung karena ini adalah Ibu Kota Negara yang modern dan sudah dipersiapkan dengan baik, untuk tahap I, Kementerian Perdagangan juga sudah mempertimbangkan beban kerja untuk yang unit kerja yang akan pindah ke IKN dengan melakukan kajian dan seleksi, sedangkan untuk Jakarta tetap menjadi kota bisnis.

Terakhir, mungkin Bapak bisa membagikan kalimat motivasi untuk para ASN di seluruh Indonesia?

Pesan Saya untuk para ASN dimanapun berada, dalam bekerja agar menggunakan 4 prinsip kerja, yaitu; bekerja keras, bekerja cerdas, bekerja tuntas dan bekerja ikhlas, dengan sistem ini, walaupun kita dalam kondisi apapun dan dengan bermitra dengan siapapun, insyaallah kita akan dengan nyaman dan dapat menyelesaikan pekerjaan dengan baik.

Dan jangan bosan BELAJAR melalui cara apapun baik melalui internet, melalui media sosial, dari pengalaman orang lain, dari lembaga pelatihan, dll. dengan belajar kita bisa mengikuti perkembangan zaman, membuka wawasan, dan mempunyai modal untuk menjadi SDM yang andal.





## Mendorong Terbentuknya Organisasi Profesi Penera Sebagai Upaya Penguatan Jabatan Fungsional Penera Menuju Ibu Kota Nusantara

Oleh : Putra Astaman, S.T.  
Penera Ahli Pertama, Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Oku Timur

Presiden Joko Widodo telah memutuskan untuk memindahkan Ibu Kota Negara ke luar Pulau Jawa. Hal itu disampaikan setelah rapat terbatas bersama para menteri pada tanggal 29 April 2019. Lokasi ibu kota baru direncanakan terletak di sebagian wilayah administratif Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur. Pindahan ibu kota dari DKI Jakarta ke Ibu Kota Nusantara (IKN) tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional tahun 2020-2024 dan semakin dikuatkan dengan telah disahkannya Undang-undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Nusantara.

Eddy Cahyono Sugiar-to (Karo Humas Kemensetneg) dalam tulisannya yang berjudul IKN Nusantara Magnet Pertumbuhan Ekonomi Baru dan Smart City mengungkapkan bahwa sejak awal, dirancangnya Ibu Kota Nusantara (IKN) ditujukan untuk mendukung pembangunan Indonesia Sentris menuju Indonesia Maju 2045. Menurutnya, IKN dapat menciptakan lapangan kerja, mendorong pertumbuhan, membuka potensi ekonomi Indonesia secara keseluruhan, dan mengurangi kemiskinan. Dengan menjadikan episentrum pertumbuhan yang akan semakin merata ke wilayah luar pulau Jawa, IKN Nusantara dapat menjadi simbol identitas bangsa serta pusat gravitasi ekonomi baru yang diharapkan dapat membawa multiplier effect. Sejalan dengan pendapat tersebut, peraturan perundangan tentang Ibu Kota Nusantara menyebutkan bahwa tujuan IKN adalah sebagai penggerak ekonomi Indonesia di masa depan.

Saiah satu leading sector yang akan ikut terlibat dalam implementasi Undang-undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Nusantara adalah Kementerian Perdagangan. Tugas pokok dan fungsi Kementerian Perdagangan adalah mengelola perdagangan dalam dan luar negeri, mengelola pengembangan ekspor nasional, mengelola perundingan perdagangan internasional, mengelola perdagangan berjangka komoditi, serta mengelola konsumen dan tertib niaga. Keenam tugas pokok dan fungsi tersebut satu jalan dengan tujuan Ibu Kota Nusantara dalam membangun episentrum pertumbuhan ekonomi di luar Jawa yang inklusif. Maka dari itu, Kementerian Perdagangan tentu akan memiliki peranan penting dalam menjaga aktivitas dan produktivitas perdagangan di Ibu Kota Nusantara melalui direktorat dan/atau badan tertentu yang ada di dalam negeri maupun atase perdagangan di luar negeri.



Sumber foto : [www.urbanplus.co.id](http://www.urbanplus.co.id)

Sejak berlakunya Undang-undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, maka tugas dan fungsi kemetrologian menjadi wewenang pemerintah daerah. Fungsi kemetrologian menyangkut 2 hal yakni tera/tera ulang yang menjadi tanggung jawab penera, dan pengawasan kemetrologian yang menjadi tanggung jawab pengawas kemetrologian. Berdasarkan data di website <https://metrologi.kemendag.go.id>, Provinsi Kalimantan Timur yang menjadi lokasi ibu kota baru hanya memiliki 7 Unit Metrologi Legal (UML) dari 10 kabupaten yang ada di provinsi dengan julukan Benua Etam tersebut. Dari 7 UML, hanya ada 1 UML yang mencakup wilayah administratif dekat dengan Ibu Kota Nusantara, yakni UML Kabupaten Kutai Kartanegara. Sedangkan Kabupaten Penajam Paser Utara yang sebagian wilayahnya juga masuk dalam rencana Ibu Kota Nusantara, belum memiliki Unit Metrologi Legal. Oleh sebab itu, pembentukan UML dan pengadaan pejabat fungsional penera di 2 kabupaten yang menjadi wilayah Ibu Kota Nusantara harus didorong agar terbentuk dan terpenuhi untuk menjadi penyokong utama kegiatan kemetrologian di Ibu Kota Nusantara.

Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga melalui Direktorat Metrologi terus melakukan pengembangan dan perbaikan dalam penyelenggaraan metrologi legal. Tercatat hingga Desember 2022 sudah ada 450 UML yang dinilai dan 372 UML yang sudah beroperasi dari 515 kabupaten/kota yang ada di Indonesia. Data ini tentu akan terus bertambah seiring dengan inovasi dan improvement yang dilakukan. Dukungan dari berbagai pihak selain pemerintah juga akan sangat membantu penyelenggaraan metrologi legal untuk melindungi kepentingan umum dalam hal kebenaran pengukuran. Perpindahan ibu kota dari Jakarta ke Ibu Kota Nusantara akan menjadi momentum yang besar pengaruhnya, termasuk dari kacamata metrologi legal. Oleh sebab itu, persiapan harus dilakukan sedini mungkin untuk menyambut transisi tersebut. Salah satu faktor pendukung yang menurut kami belum pernah dibahas dan penting untuk dibentuk adalah mendorong terbentuknya organisasi profesi penera sebagai upaya penguatan jabatan fungsional penera menyambut Ibu Kota Nusantara.

Menurut Peraturan LAN RI Nomor 14 Tahun 2020 tentang Organisasi Profesi Jabatan Fungsional yang Berada Di bawah Pembinaan Lembaga Administrasi Negara, pengertian dari organisasi profesi adalah organisasi yang diakui dan ditetapkan oleh Lembaga Administrasi Negara untuk pengembangan profesionalisme dan kode perilaku profesi jabatan fungsional, serta pembinaan kode etik. Organisasi profesi juga memiliki fungsi advokasi yang dapat meliputi; perlindungan profesi, pengembangan profesi, peningkatan pengabdian kepada masyarakat, penyelenggaraan program yang mendukung kesejahteraan pejabat fungsional, serta penerimaan dan penyampaian aspirasi dari pejabat fungsional.



Tugas dan fungsi organisasi profesi memberikan manfaat yang baik bagi pejabat fungsional maupun unit instansi. Maka dari itu, organisasi profesi penera sudah saatnya didorong agar terbentuk. Jika kita mengacu pada PerMenPAN RB nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional pada pasal 50 ayat 1 dijelaskan bahwa, setiap pejabat fungsional harus memiliki organisasi profesi paling tidak 5 tahun setelah tanggal penetapannya sebagai pejabat fungsional. Hal ini mengisyaratkan bahwa setiap jabatan fungsional tanpa terkecuali seharusnya memiliki organisasi profesi. Jumlah penera saat ini adalah 687 orang (Sumber: SI SDM update per 27 Juni 2023) atau 72% dari total pejabat fungsional kemetrolagian. Jumlah tersebut terbilang sangat banyak dan akan terus bertambah. Jika 687 orang dapat dikumpulkan dalam 1 wadah organisasi profesi penera, tentu akan banyak manfaat yang dapat dihasilkan terkhusus dalam hal mendukung penyelenggaraan metrologi legal.

Setidaknya ada 4 hal pokok yang dapat dilakukan organisasi profesi penera dalam mendukung penyelenggaraan metrologi legal khususnya untuk menyambut Ibu Kota Nusantara, diantaranya; memberikan penguatan profesi penera yang termasuk dalam profesi langka agar dapat bertugas secara profesional dan penuh integritas, memberikan pendampingan secara intensif terhadap penera yang ditugaskan di Ibu Kota Nusantara, sosialisasi metrologi legal di kawasan Ibu Kota Nusantara, sosialisasi pentingnya fungsi pelayanan tera/tera ulang dalam menjaga ketepatan ukur, takar, timbang dari transaksi perdagangan di Ibu Kota Nusantara. Selain hal tersebut, organisasi profesi penera juga dapat menjalankan fungsi advokasinya yakni menjadi jembatan terhadap peraturan-peraturan administratif yang membatasi gerak penyelenggaraan metrologi legal pada hal substantif.

Sumber foto : [jurusankuliahkampusindonesia.blogspot.com](http://jurusankuliahkampusindonesia.blogspot.com)

## Referensi

1. Badan Kepegawaian Negara. 2023. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2023 tentang Angka Kredit, Kenaikan Pangkat dan Jenjang Jabatan Fungsional. Jakarta.
2. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi. 2023. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional. Jakarta.
3. Kementerian Perdagangan. 2020. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 101 Tahun 2020 tentang Jabatan, Kelas Jabatan, dan Peta Jabatan di Lingkungan Kementerian Perdagangan. Jakarta.
4. Lembaga Administrasi Negara. 2020. Peraturan Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia.
5. Nomor 14 Tahun 2020 tentang Organisasi Profesi Jabatan Fungsional yang Berada di Bawah Pembinaan Lembaga Administrasi Negara. Jakarta.
6. Pemerintah Indonesia. 2022. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara. Lembaran RI Tahun 2022, Nomor 41. Sekretariat Negara. Jakarta.
7. Pumama, Suryadi Jaya, dan Chotib. "Analisis Kebijakan Publik Pemindahan Ibu Kota Negara." Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik 13, no. 2 (2022): 155-168.
8. Sugiarto, Eddy Cahyono. "IKN Nusantara Magnet Pertumbuhan Ekonomi Baru dan Smart City" [www.setneg.go.id](http://www.setneg.go.id). Diakses pada senin 28 Agustus 2023. [https://www.setneg.go.id/baca/index/ikn\\_nusantara\\_magnet\\_pertumbuhan\\_ekonomi\\_baru\\_dan\\_smart\\_city](https://www.setneg.go.id/baca/index/ikn_nusantara_magnet_pertumbuhan_ekonomi_baru_dan_smart_city).



# KESIAPAN PEJABAT FUNGSIONAL BIDANG PERDAGANGAN MELAKUKAN TRANSISI MENUJU IBU KOTA NUSANTARA (IKN)

Oleh Dedi Kuswandi, S.E., M.Si.

Analisis Kebijakan Ahli Madya, Sekretarian Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri

## 1. Pendahuluan

**P**emindahan Ibu Kota Nusantara: ASN mempertanyakan keputusan pemerintah terkait hal ini mengingat saat ini sedang masa pemulihan ekonomi dan masa pemilihan Presiden RI 2024-2029 dan pemindahan ibu kota ini tetap akan dijafankan.

Pemindahan Ibu Kota Nusantara kembali menjadi bahasan hangat di era pemerintah saat ini, bahkan rencana pemindahan Ibu Kota Negara ini sudah ada sejak masa Presiden Soekarno Tahun 1957, masa Presiden Soeharto Tahun 1990-an, serta masa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Keseriusan pemindahan ini pada masa Pemerintahan Presiden Joko Widodo berkepanjangan sampai ditungkan dalam RKP 2024 untuk dapat diselesaikan sesuai masa jabatan Presiden Joko Widodo. Bentuk keseriusan ini telah diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara pada tanggal 18 Januari 2022.

Pemindahan Ibu Kota pada era Presiden Jokowi, gagasan pemindahan ibu kota mendapatkan momentum karena dua hal, yaitu memunculkan pusat pertumbuhan ekonomi yang baru dan daya dukung Kota Jakarta yang semakin menurun.

Sebagaimana dalam Nawacita pertama, Presiden Jokowi mengatakan berkali-kali untuk mewujudkan pembangunan Indonesia sentris, bukan Jawa sentris. Pembangunan di Jawa akan digeser atau mesti ada perpindahan pusat perekonomian tidak hanya di Jawa tetapi juga di Kalimantan, dimana terdapat ketimpangan pembangunan. Dalam hal ini, Presiden Jokowi ingin menjembatani ketimpangan pembangunan nasional sehingga memindahkan ibu kota ke Kalimantan Timur. Dengan demikian, rencana memindahkan dan membangun ibu kota yang baru akan terus berlanjut sampai masa pemerintahan Presiden Jokowi.

### Kriteria Pemilihan dan Terpilihnya Kalimantan Timur sebagai



Gambar 1. Kriteria terpilihnya Kaltim menjadi Ibu Kota Baru

**Alasan mengapa dipilih Kalimantan Timur:**

1. Akses Jalan ke Balikpapan dan Samarinda sudah disiapkan Jalan Tol.
2. Kependudukan di Kalimantan Timur heterogen.
3. Dukungan pertahanan berasal dari Darat, Laut dan Udara sudah diantisipasi.
4. Lahan yang di bangun untuk kontruksi sudah disesuaikan.
5. Lahan Perkebunan begitu luas menghasilkan produksi kayu yang bisa mensupply daerah lain.
6. Sarana utama yang telah tersedia jalan penunjang seperti Jalan Tol Balikpapan – Samarinda menuju Bandara. Juga tersedia pelabuhan Terminal Peti Kemas antara lain Peti Kemas Kariangau dan Semayang.
7. Ketersediaan air memiliki adanya 3 bendungan/waduk, 4 saluran air sungai.
8. Memiliki jalur Alur Laut Kepulauan Indonesia sebagai alur untuk pelaksanaan lintas alur laut kepulauan.

**Cakupan Wilayah IKN yang akan di bangun :**



Oleh karena itu, pemerintah menyusun rancangan pembangunan IKN mulai dari rancangan tata ruang, pembangunan infrastruktur, sosial, kelembagaan, hingga sumber daya manusia (SDM) yang dibagi ke dalam 5 tahapan pembangunan mulai dari tahun 2022 hingga 2045, di bawah ini:

**2. TRASISI PEMINDAHAN IBU KOTA NEGARA**

Dalam Pemindahan Ibu Negara, masih banyak yang perlu dibenahi oleh Pemerintah terkait dengan persoalan yang akan dampak bermunculan akibat pemindahan ini, apakah pemindahan ini berdampak positif atau negatif khususnya untuk mensejahterakan rakyat. Bagaimana dampak sosial bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) Pusat secara psikologis akibat jauh dari dari keluarga (anak, istri atau suami), dan bagaimana adaptasi ASN dengan lingkungan di ibu kota baru karena Jakarta sudah terbiasa di Kota Metropolitan Jakarta yang begitu ramal dengan aktivitas dari pagi hingga malam.

Pemerintah telah mempertimbangkan dengan 6(enam) alasan Pemindahan Ibu Kota Negara ini, yaitu :



Gambar 3. Tahapan pembangunan IKN

**1. Pulau Jawa merupakan Jumlah Penduduk yang padat**  
 Pulau Jawa, khususnya di Jakarta, merupakan pusat pemerintahan yang sudah terlalu padat penduduknya (berdasarkan hasil survei penduduk antar sensus (SUPAS), yaitu sebesar 56,65%). Dalam hal ini, penduduk Pulau Jawa berkisar 150,18% jiwa sementara pulau lainnya kurang dari 10%, kecuali Pulau Sumatera yang mencapai 22,1% atau 58,45 juta jiwa. Sedangkan untuk wilayah Sulawesi dan Kalimantan berkisar sebesar 7,4% atau 19,56 juta jiwa dan wilayah Bali dan Nusa Tenggara dengan penduduk berkisar 14,90 juta jiwa atau 5,6% penduduk Indonesia. Wilayah Maluku dan Papua berkisar sebesar 2,8% atau 7,32 juta jiwa.

## 2. Pertumbuhan Ekonomi Indonesia terhadap PDB

Pertumbuhan ekonomi Indonesia khusus di pulau Jawa memiliki kontribusi ekonomi yang sangat mendominasi dibandingkan dengan pulau lainnya. Hal ini dapat dibuktikan dengan data yang diperoleh dari BPS, dimana pertumbuhan ekonomi di pulau Jawa mencapai 59% dan di luar Jawa sebesar 41%, dan berdasarkan data tahun 2021, pertumbuhan ekonomi di Pulau Jawa mencapai 56,48% dan luar Jawa 43,52% terhadap PDB di Pulau Sumatera. Kontribusi ekonomi di Pulau Kalimantan dengan pertumbuhan ekonomi sebesar 4,99%. Adapun Sulawesi memiliki kontribusi mencapai 6,33% dengan pertumbuhan ekonomi 6,65%, sedangkan di Pulau Bali dan Nusa Tenggara memiliki kontribusi mencapai 3,06% dengan pertumbuhan ekonomi mencapai 5,07%. Kemudian, di Maluku dan Papua, pertumbuhan ekonomi sebesar 7% dengan kontribusi ekonomi 2%.

## 3. Air bersih yang persediaan sangat terbatas

Pulau Jawa dan Bali memiliki ketersediaan air bersih sangat terbatas atau mengalami kekurangan air yang cukup parah, khususnya di wilayah Jabodetabek dan Jawa Timur (berdasarkan data Ketersediaan air bersih dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat pada Tahun 2016).

## 4. Pulau Jawa pemindahan kepemilikan lahan yang terbesar

Berdasarkan data pada dasawarsa terakhir, Pulau Jawa mengalami konversi lahan akan berlanjut sampai beberapa tahun ke depan, bahkan mencapai lima kali lipat dari Pulau Kalimantan, yang diprediksi lahan yang akan terbangun di Pulau Jawa pada Tahun 2030 adalah sekitar 42,79%, sedangkan di Pulau Kalimantan lahan yang terbangun diperkirakan sekitar 11,09%.

## 5. Perpindahan Penduduk dari Desa ke Kota sangat tinggi

Pertumbuhan urbanisasi di Pulau Jawa sangat tinggi, dengan penduduk yang terbesar di Pulau Jawa adalah Jakarta dan wilayah Jabodetabek sehingga menjadi alasan pemindahan ibu kota, dan Jakarta merupakan peringkat ke-10 kota terpadat di dunia (UN, 2013) dan pada tahun 2017 masuk ke peringkat ke-9 di dunia.

## 6. Jakarta wilayah dekat laut: Antisipasi bahaya banjir, tanah turun yang menimbulkan air laut naik

Memperhatikan lokasi kota Jakarta yang dekat laut dengan tanah turun, sehingga rawan banjir, air laut naik, kualitas air tercemar sehingga hampir 50%, sehingga wilayah Jakarta memiliki tingkat keamanan banjir diperkirakan hingga 50 tahunan. Jakarta juga dekat dengan Gunung Krakatau dan Gunung Gede sehingga terdapat potensi tsunami dan gempa bumi.

## 3. IKN Sebagai Pusat Pemerintahan Negara

IKN yang ditargetkan sebagai pusat pemerintahan memerlukan penciptaan pemerintahan yang efektif dan efisien. Pemerintahan yang akan datang dalam hal pelayanan dapat berkelas internasional dimana dapat berorientasi menjadi pemerintahan yang bersih. Ibu Kota yang bercirikan proses birokrasi yang sederhana, kinerja smart governance, serta diutamakan pelayanan publik. Pembangunan infrastruktur, kelembagaan dan pemindahan ASN merupakan tahap pertama pembangunan Ibu Kota Nusantara yang diawali dengan pembangunan istana kepresidenan dan beberapa kantor kementerian inti.

Sebagai Pusat Pemerintahan, IKN memiliki 5 (lima) norma, sebagai berikut: (1) Pemerintahan yang efektif; (2) Hunian kota yang nyaman; (3) Infrastruktur sarana yang terkoneksi; (4) Masa depan telah ditentukan sektor-sektor prioritas; dan (5) Kolaborasi 3 kota yaitu Samarinda, Balikpapan, dan IKN. Oleh karena itu, IKN ditargetkan sebagai pusat pemerintahan yang efektif dan efisien, pelayanan berkelas internasional, berorientasi smart governance yang bercirikan proses birokrasi yang sederhana, kinerja efektif dan efisien, serta peningkatan kualitas pelayanan publik.

## 4. Aparatur Sipil Negara Kementerian dan Lembaga secara bertahap akan dilakukan perpindahan ke IKN yang berlokasi di Kalimantan Timur

Memasuki penghujung tahun 2023, tampaknya wacana pemindahan ASN ke IKN semakin terlihat nyata dengan mulai dilakukannya berbagai persiapan pembangunan IKN. Di sisi lain, apakah ASN siap untuk dipindahkan? siap meninggalkan tempat tinggal yang sudah menjadi rumah selama ini? siap meninggalkan Jakarta beserta segala fasilitasnya? siap beradaptasi dan berkarya di IKN? Seluruh pertanyaan ini bukanlah tentang siap atau tidak siap, karena kepindahan ke IKN menjadi keharusan, aturan yang harus dipatuhi oleh seluruh ASN. Jika menelisik isi Sumpah Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang pernah diikrarkan saat pengangkatan sumpah jabatan, seyogyanya ASN harus mengikuti apapun penugasan yang diberikan dan tetap mengabdikan kepada negara, termasuk salah satunya adalah ketika dipindah tugaskan ke IKN.

Sebagaimana sumpah ASN pada saat masuk bekerja :

#### SUMPAAH PEGAWAI NEGERI SIPIL

Demi Allah, saya bersumpah/berjanji:

- bahwa saya, untuk diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil, akan setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara, dan Pemerintah;
- bahwa saya, akan mentaati segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan melaksanakan tugas kedinasan yang dipercayakan kepada saya dengan penuh pengabdian, kesadaran, dan tanggung jawab;
- bahwa saya, akan senantiasa menjunjung tinggi kehormatan Negara, Pemerintah, dan martabat Pegawai Negeri, serta akan senantiasa mengutamakan kepentingan Negara daripada kepentingan saya sendiri, seseorang atau golongan;
- bahwa saya, akan memegang rahasia sesuatu yang menurut sifatnya atau menurut perintah harus saya rahasiakan;
- bahwa saya, akan bekerja dengan jujur, tertib, cermat, dan bersemangat untuk kepentingan Negara.

Gambar 4. Sumpah ASN

Wacana Pindah Ke IKN sudah bergaung beberapa tahun yang lalu, dampak psikologis yang dirasakan oleh teman-teman ASN sudah mulai dialami sehingga banyak ASN yang terlebih dahulu pindah ke daerah lain agar tidak dimutasi ke IKN. Supaya tidak dipindah ke IKN, ada beberapa alternatif yang telah dilakukan ASN sampai saat ini, yaitu (1) Mengajukan mutasi ke Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur; (2) Pindah lembaga atau perusahaan swasta; (3) Mengundurkan diri dari ASN dan menjadi pengusaha atau membuka usaha sendiri; (4) Bila memungkinkan, mengajukan pensiun dini. Sedangkan untuk ASN yang terdampak, apabila tidak ada pilihan lain, misalnya mengajukan mutasi ke instansi pemerintah daerah atau beralih profesi menjadi pegawai swasta, maka mau tidak mau harus pindah ke IKN.

Ada 35 K/L untuk pemindahan Aparatur Sipil Negara dan Personil TNI/Polri ke IKN Tahun 2024-2045, hal ini sesuai dengan Perpres 63 Tahun 2022. Rencananya diproyeksikan pada tahun 2024-2045 sebanyak 100.023 orang, meliputi: 956 Pejabat Negara, 3.264 JPT, dan 95.803 JF, sedangkan untuk rencana tahun 2024, sebanyak 7.687 orang yang meliputi 23 Pejabat Negara, 1.971 ASN di 26 K/L, 888 JPT, 1.060 JF, dan 5.716 Lingkup TNI/Polri. Rencana ASN yang dipindahkan ke IKN Tahun 2024, yaitu:

1. Pokja Hankam 5.716.

2. 11.274 orang terdiri dari 38 K/L.

(Sumber: Surat Menpan Ke Kepala OIKN R/2711, 19 Desember 2022)

## 5. Kesiapan ASN Kementerian Perdagangan Yang Akan dipindahkan Ke Ibu Kota Negara

Setelah disahkan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2022 Aparatur Sipil tentang Ibu Kota Negara, pemerintah mulai merencanakan untuk mengatur skenario pemindahan ASN ke IKN yang dilakukan secara bertahap mulai Tahun 2024.

Dalam kerangka pemindahan ASN, akan ada skenario atau alur pikir yang dilaksanakan bersama dan akan melihat kesiapan dari ASN sendiri yang akan dipindahkan secara bertahap tergantung masing-masing unit Kementerian/Lembaga. Dalam pemindahan ASN ke IKN Negara akan menjamin penuh kehidupan ASN bukan hanya diberikan tempat tinggal juga kan diberikan beberapa fasilitas penunjang, yang akan dipindahkan terlebih dahulu ASN yang usianya 30-39 tahun (34,5%), disusul usia 40-49% dan 50-60%.

Negara akan memberikan fasilitas biaya pindah yang ditanggung Negara yaitu satu orang pasangan ASN, dua orang anak dan satu orang ART, dengan komponen yang dibiayai adalah biaya barang pindahan, biaya transportasi dan biaya tunggu hika perlu transit di Balikpapan, selain itu juga diberikan fasilitas rumah dinas, dapat dilihat pada Gambar 5

Selain diatas ada juga tunjangan kemahalan, sesuai dengan informasi dari BPS dan KemenPANRB untuk komponen biaya pindah akan dihitung kembali dan akan dibayarkan di Gaji dan tunjangan yang selama ini berlaku.

Ada beberapa yang menjadi alasan ASN enggan pindah ke IKN berbagai informasi dari rekan-rekan yang sudah ke IKN memperhatikan kondisi lokasi saat ini yaitu orang tua yang tidak ada merawat, masih kondisi hutan, cuaca panas, air kurang bagus, menuju lokasi jauh, jauh dari keramaian, keluar Tol tapi untuk menuju IKN jaraknya lumayan cukup jauh dan ada juga yang sudah pindah ke Kabupaten/kota kelahiran, ironi desa terpencil tanpa listrik, teracam kegelapan.

Ada juga ASN yang semangat pindah ke IKN karena masih belum punya pasangan/ belum rumah tangga, sudah terbiasa merantau, sudah siap pindah karena berasal dari Kalimantan, ingin dapat pengalaman di tempat baru.



Gambar 5. Konsep pemberian fasilitas pemindahan ASN  
Sumber: KemenPAN-RB



Gambar 6. Hasil survey ASN ke IKN (Sumber: Hasil Survey KemenPAN-RB)

## 6. Kesimpulan

Seluruh Kementerian dan Lembaga yang ada di Jakarta akan bertahap pindah sesuai dengan kebijakan yang telah ditentukan oleh Pemerintah tetapi dengan kepindahan ini akan membawa pro dan kontra bagi ASN yang akan dipindahkan, ketika negara telah memutuskan memindahkan ASN ke IKN tidak ada satu keputusan apapun yang memuaskan seluruh rakyat, namun keputusan apabila keputusan ini memberikan manfaat lebih bagi bangsa Indonesia ini harus didukung sebagai wujud kecintaan dan bakti untuk NKRI.

## 7. Referensi

- BAPPENAS] Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. 2020. Buku saku pemindahan ibu kota negara. Jakarta (ID): Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.
- [BPS] Badan Pusat Statistik. 2020. Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) menurut aspek dan provinsi, 2009-2018. [diakses 27 Mei 2020] tersedia di: <https://www.bps.go.id/dynamic/table/2017/05/04/124/indeks-demokrasi-indonesia-idi-menurut-aspek-dan-provinsi-2009-2018.html>
- Mahroza J. 2019. Pemindahan ibu kota RI dari perspektif pertahanan. Media Indonesia. [diakses 21 Mei 2020] tersedia di: <https://mediaindonesia.com/read/detail/257188-pemindahan-ibu-kota-ri-dari-perspektif-pertahanan>
- Tri R. 2020. Sigi Indo Barometer: Mayoritas publik setuju pemindahan ibu kota. TEMPO. [diakses 26 Mei 2020] tersedia di: <https://bisnis.tempo.co/read/1308262/sigi-indo-barometer-mayoritas-publik-setuju-pemindahan-ibu-kota/full&view=ok>
- Badan Otoritas IKN 2023, Progres Pembangunan Ibu Kota Negara " Nusantara Kelompok Kerja ASN UKN Kementerian PAN-RB, Arah Kebijakan Pemindahan ASN pada Kementerian/Lembaga Ke Ibu Kota Nusantara Tahun 2023



Hanya Kalau Mau menunggu sampai siap, kita akan menghabiskan sisa hidup kita hanya untuk menunggu



-Lemony Snicket-

# SIMPLIFIKASI BIROKRASI SEBAGAI LANGKAH KEBIJAKAN PELAYANAN PUBLIK YANG EFEKTIF DAN EFISIEN

Oleh : Permadi

## A. Pendahuluan

Dalam sebuah rapat kerja kabinet, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di Istana Bogor pada tanggal 23 Desember 2011 menyatakan bahwa penghambat pembangunan di Indonesia adalah: birokrasi, infrastruktur dan korupsi. Pembenahan birokrasi secara fundamental harus dilakukan di tingkat pusat dan daerah. Pembenahan ini juga menjadi kunci untuk memacu pertumbuhan ekonomi yang lebih baik.

Selanjutnya di era Presiden Joko Widodo beberapa saat setelah pelantikan pada periode kedua menyatakan bahwa level birokrasi yang semula 4 (empat) level, yaitu eselon 1 sampai dengan 4 bahkan di daerah ada sampai dengan eselon 5, disederhanakan cukup hanya sampai pada dua level saja yaitu cukup hanya eselon 1 dan 2, dan untuk level dibawahnya menjadi pejabat fungsional sesuai dengan kompetensinya.

Pernyataan kedua Presiden Republik Indonesia ini sama-sama sangat menyoroti persoalan birokrasi yang merupakan perangkat kehidupan dalam pemerintahan. Kedua Presiden Republik Indonesia ini sangat menyadari bahwa roda pemerintahan dan pelayanan masyarakat ada ditangan birokrasi, sehingga apabila dalam lingkup birokrasi ini bermasalah dengan kebijakan yang dicanangkan oleh pemerintah, maka roda pemerintahan akan terganggu dan pelayanan kepada masyarakat juga akan bermasalah.

Menyimak pandangan tersebut, betapa besar dan pentingnya birokrasi dalam membangun bangsa dan negara di segala aspek. Oleh karena itu, dengan kekuatannya yang amat sentral ini birokrasi akan selalu terus disoroti sebagai salah satu sumber atas berbagai permasalahan yang mempengaruhi iklim kehidupan dimana terkait hajat hidup orang banyak.

Sebagai tokoh sentral, birokrasi sangat memberikan warna yang mencolok dimanapun dan kapanpun, karena di seluruh tata kehidupan ini tidak lepas dari birokrasi. Apalagi kalau birokrasi ini hanya diartikan dalam konteks tata kelola pemerintahan, maka birokrasi adalah sebagai faktor penentu di aspek manapun. Dalam perkembangannya, birokrasi di seluruh dunia saat ini dan yang akan datang mengalami perubahan cukup mendasar, dimana peranan birokrasi tidak lagi sebagai tokoh sentral yang memengaruhi semua kepentingan masyarakat. Mengapa peranan birokrasi ini berubah dalam konteks yang sangat mendasar? karena saat ini dan yang akan datang, birokrasi telah bergeser dan mulai berganti dengan optimalisasi fungsi dalam organisasi melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi. Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) kini sangat berkembang pesat dan sangat memengaruhi segala aspek kehidupan. Bahkan tidak hanya itu, TIK bisa mengubah

kebiasaan individu dari bangun tidur pagi hingga menjelang malam tidur lagi.

Perubahan kebiasaan yang sangat cepat ini diakibatkan oleh adanya kebutuhan eksistensi diri dalam setiap individu, baik secara langsung maupun tidak langsung, baik secara sadar maupun secara tidak sadar. Begitu pula dengan birokrasi bahwa perubahan yang terjadi bukan saja karena kebiasaan individu yang telah berubah diberbagai aspek, tetapi sesungguhnya perubahan itu terjadi karena tuntutan kebutuhan masyarakat yang semula tradisional, konvensional, dan manual menjadi digital yang sangat liberal dan dahsyat.

Perkembangan dan peranan birokrasi dari era ke era sangat mengikuti tuntutan kondisi masyarakat dalam pemerintahan yang terjadi di negeri tercinta ini, yaitu:

### 1. Birokrasi di Era Kolonial

Di era kolonial, peranan birokrasi sangat kental dengan kekuasaan karena pada waktu itu birokrasi merupakan alat kekuasaan yang diandalkan untuk mengendalikan rakyat agar tidak sempat memberontak kepada penguasa dengan semua aturan dan kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintahannya, sehingga birokrasi merupakan sebuah sarana yang bukan untuk melayani masyarakat atau rakyat, tetapi untuk memberi perintah kepada rakyat.

Birokrasi di era kolonial dibuat dalam hierarki kekuasaan yang pusat komandonya adalah Kerajaan Belanda. Implementasi kebijakan pemerintahan di negara jajahan, penguasa kerajaan atau Sang Ratu mendelegasikan kepada seorang Gubernur Jenderal yang ditunjuk untuk membuat keputusan politik di seluruh wilayah kekuasaan negara jajahannya. Gubernur Jenderal ini memiliki pembantu dengan menunjuk para Gubernur dan Residen. Gubernur merupakan wakil pemerintah pusat yang pada waktu itu berkedudukan di Batavia (sekarang Jakarta) untuk wilayah provinsi, dan untuk tingkat kabupaten/kota ditunjuk asisten residen dan pengawas yang diangkat oleh Gubernur Jenderal untuk mengawasi para Bupati dan Wedana dalam menjalankan pemerintahan setiap hari.

Oleh karena itu, birokrasi cenderung menempatkan diri sebagai penguasa daerah. Kondisi ini karena birokrasi di daerah merupakan kepanjangan tangan dari penguasa pusat, yang berada di Batavia dan juga di Belanda.

## **2. Birokrasi di era Pasca Kolonial**

Setelah kemerdekaan dapat diraih oleh pendiri bangsa, maka beralihlah pemerintahan yang semula dikuasai oleh Kerajaan Belanda menjadi Pemerintahan Republik Indonesia. Perbedaan pemikiran dan argumentasi terhadap tata kelola pemerintahan dan bentuk negara terjadi diantara pendiri bangsa di awal kemerdekaan. Bahkan hampir menjadikan perpecahan yang mengarah pada disintegrasi bangsa dan aparat pemerintah.

Sistem pemerintahan dan sistem politik yang berubah-ubah menjadikan kurang stabilnya tata kelola aparaturnya dalam pengaturan birokrasi. Birokrasi masih dijadikan sarana kepentingan penguasa yang terafiliasi dalam partai politik. Sering terjadi pergantian kabinet akibat dari tarik-menarik antar berbagai kepentingan partai politik yang kuat pada masa itu. Jadi birokrasi pada masa itu sangat sarat dengan berbagai kepentingan politik. Birokrasi menjadi kurang profesional dalam menjalankan tugas dan fungsinya, birokrasi tidak dapat menjalankan kegiatan program-program yang ditetapkan karena sering bergantinya pejabat dari partai politik pemenang pemilu. Birokrasi ibaratnya hampir tidak lebih dari pelayan partai politik.

Pelayanan publik sebagai wujud tanggung jawab birokrasi tidak dapat terfaksana dengan baik, karena semua arah kebijakan yang dijalankan oleh birokrasi bermuara dari keinginan dan kebutuhan partai politik, sehingga dapat dimaklumi bahwa di era ini tata kelola pemerintahan dan birokrasi kurang efektif dan efisien terhadap kebutuhan dan kepentingan publik.

## **3. Birokrasi di Era Orde Baru**

Secara realita bahwa perkembangan peranan birokrasi telah melewati 2 (dua) tahapan yaitu tahapan era kolonial dan era pasca kolonial atau yang sering dikenal dengan sebutan orde lama. Dua era yang berbeda cukup mempengaruhi kondisi birokrasi yang semuanya menjadikan salah satu alat bagi penguasa dalam mengelola negara dan rakyatnya.

a orde baru sangat banyak mengalami perubahan dibandingkan di era kolonial maupun era pasca kolonial, dimana di era orde baru telah mendorong strategi politik korporasi dalam tata kelola pemerintahan dan negara yang bertujuan untuk mendukung penetrasi dan mengontrol masyarakat/publik secara sempurna. Strategi ini merupakan strategi politik birokrasi yang mengatur sistem perwakilan kepentingan melalui jaringan fungsional non-ideologis. Sistem ini memberikan berbagai lisensi pada kelompok fungsional dalam masyarakat, yakni monopoli. Tujuannya adalah untuk mengeliminasi konflik antar kelompok kepentingan dalam masyarakat yang berkonsekuensi menghilangkan pluralitas sosial, politik maupun kultural.

Pemerintahan orde baru telah menggunakan birokrasi sebagai produk atau layanan yang memberikan pengalaman berkualitas tinggi dalam pembangunan nasional. Pada waktu itu telah dibuat lompatan-lompatan strategis dengan cara pendelegasian wewenang dan tanggung jawab dalam hierarki birokrasi secara eselonering. Kemudian dalam tata kelolanya, semua mengacu kepada komando dari pusat pemerintahan sehingga seluruh daerah terkonsolidasikan dalam pengendalian pusat. Di era orde baru, Aparatur Pemerintah baik Sipil maupun Militer berkembang sangat pesat bahkan dapat dikatakan bahwa di era ini Aparatur Pemerintah dalam Birokrasi mendominasi layanan dan pola kehidupan masyarakat.





Sumber foto : google/ redautonomos.es

#### 4. Birokrasi di Era Reformasi

Era Reformasi embrionya muncul sejak tahun 1997 akibat adanya krisis moneter yang memporak-porandakan tatanan ekonomi di hampir setiap negara baik negara maju maupun negara berkembang. Keadaan dari tahun 1997 itu terus berlanjut dan memunculkan gerakan reformasi kolosal yang mengarah pada penurunan pucuk pimpinan birokrasi yaitu Presiden. Tahta Kepresidenan yang sangat kokoh terus digoyang sehingga berakhir dengan pengunduran diri Presiden guna memenuhi tuntutan gerakan reformasi. Gerakan reformasi sudah tak terbendung lagi dan seluruh lapisan masyarakat secara nyata turun kejalan. Maka mulailah reformasi melangkah sejak tahun 1998 dengan alih kekuasaan dari era orde baru masuk ke era reformasi. Birokrasi di era reformasi telah berjalan dengan menyederhanakan berbagai hal yang menghambat pelayanan kepada masyarakat, sehingga muncul apa yang dikenal dengan sebutan reformasi birokrasi. Mengapa disebut reformasi birokrasi? secara sederhana dapat dikatakan bahwa reformasi birokrasi pada intinya adalah untuk penguatan birokrasi melalui penyederhanaan di berbagai aspek guna membangun kepercayaan masyarakat terhadap birokrasi dalam tata kelola yang efektif dan efisien. Namun, di era reformasi ini realitanya, birokrasi tampak banyak terintervensi oleh situasi politik dan juga politisi bahkan seperti kembali pada era kolonial atau pasca kolonial.

#### 5. Birokrasi di Era Global

Era Global ini dimulai sejak tahun 2000 yang kita kenal dengan era millenium, dimana pada waktu itu ada suatu perubahan global saat memasuki era revolusi industri ke-3 dengan munculnya program Millenium Development Goals (MDGs). Entah apa yang mengilhami era ini sehingga muncul apa yang dikenal sekarang sebagai era milenial. Era millennial yang melaju kencang dengan teknologi digital terus menggerus era reformasi dan era-era sebelumnya, sehingga secara cepat mengeliminasi seluruh tatanan yg ada saat ini.

Di Era Global, birokrasi hanya berperan sebagai katalisator dalam mendorong proses kinerja yang harus dicapai sesuai target yang telah ditetapkan. Di era global, birokrasi seharusnya tidak menjadi salah satu kekuatan politik, tetapi birokrasi hanya melaksanakan kebijakan politik yang telah dikampanyekan oleh pucuk pimpinannya pada saat Pemilihan Umum Kepemimpinan Nasional dan Kepemimpinan Daerah. Oleh karena itu, birokrasi di era global sangatlah berbeda dengan era-era sebelumnya.

Di era global ini, semua lini birokrasi tidak memiliki sekat-sekat yang gelap, sehingga di era ini birokrasi sepenuhnya bermuara pada fungsi dan kompetensi. Generasi di era ini seharusnya tidak lagi terganggu oleh intervensi politik atau politisi yang dapat menghambat kinerja, melainkan dibutuhkan optimalisasi efisiensi dan efektifitas energi detik per detik guna mencapai target dan tujuan yang telah ditetapkan.

Jadi, peranan birokrasi di era global hanya sebagai koridor tanggung jawab dalam rentang kendali yang berjalan sesuai aturan, kebijakan dan etika. Sehingga, perilaku dalam organisasi masing-masing tetap berjalan dengan tata krama yang mewujudkan sebuah keharmonisan budaya kerja serta kemartabatan antar generasi. Meskipun segala macam kebiasaan di kehidupan sehari-hari hampir semuanya berubah, namun dari sisi naluri kemanusiaan tetaplah bertumpu pada hati nurani yang tidak mungkin dapat dipungkiri oleh setiap individu.

## B. SIMPLIFIKASI DALAM BIROKRASI

Perkembangan global yang sangat dinamis membuat munculnya berbagai perubahan dalam berbagai aspek, bahkan dalam setiap detik muncul persoalan baru. Perubahan dan persoalan baru terjadi karena munculnya kebiasaan-kebiasaan baru yang berkembang akibat penggunaan teknologi dalam membantu menyelesaikan kegiatan di berbagai aspek, baik dalam lingkup pemerintahan maupun non-pemerintahan.

Kondisi ini merupakan perwujudan dari peralihan generasi di era kolonial ke generasi millennial, bahkan kini telah muncul generasi Z dengan karakteristik yang sangat berbeda baik secara pola pikir maupun pola makan. Karakteristik semacam inilah nantinya yang akan mewarnai dalam setiap organisasi baik dalam lingkup pemerintahan maupun non-pemerintahan. Artinya bahwa dalam membangun kelembagaan dalam ranah birokrasi sangat dipengaruhi oleh karakteristik tersebut. Hal ini dikarenakan kebutuhan akan kelembagaan dalam ranah birokrasi akan masuk dalam era personalisasi masa depan sangat dipengaruhi oleh pola pikir Generasi Z.

Saat ini, birokrasi yang ada dalam era kolonial hingga era reformasi tidak dapat diterima sepenuhnya oleh era personalisasi masa depan dimana generasi milenial dan Generasi Z yang membangun dirinya dengan langkah-langkah yang simpel, fleksibel dan humble. Semua langkah birokrasi yang dirasakan menghambat bahkan cenderung birokratis akan terhapus dengan berbagai terobosan dan inovasi guna mencapai target pelayanan, serta menghalau rival dalam kolaborasi global.

Contoh konkret simplifikasi dalam birokrasi yaitu sebagai berikut:

### Simplifikasi dalam pengurusan identitas diri

Lazimnya, identitas diri yang dikenal di Indonesia adalah Kartu Tanda Pengenal Penduduk (KTP), namun secara global disebut sebagai Identitas Diri (ID) atau ID Card yang harus dimiliki oleh setiap individu dimana saat ini masih diatur dengan batas usia tertentu. Cara mengurusnya pun masih dengan cara tertentu yang rata-rata memerlukan waktu cukup lama untuk memperoleh kartu ID tersebut. Hal ini merupakan permasalahan simplifikasi kepengurusan ID yang harus segera tuntas.

Kita memang hidup di dunia dimana ilmu pengetahuan dan teknologi banyak menggeser berbagai tatanan sosial. Oleh karena itu, kita membutuhkan orang-orang untuk meningkatkan produktivitas, membangun produk dan layanan baru, serta melakukannya dengan lebih cepat. Konsekuensinya, kita membutuhkan orang-orang hebat. Semua itu merupakan konsekuensi logis dari segala perubahan yang menghendaki setiap gerakan efektif dan efisien serta menjadikan hal yang dirasa rumit menjadi simpel.

Terkait dengan simplifikasi pengurusan ID, semua memahami bahwa persoalan ID sangat simpel dan bisa dilakukan dengan pelayanan online dengan aplikasi secara mobile, dimana hampir setiap individu menggunakan smartphone, sehingga tidak ada alasan bahwa publik tidak dapat mengakses layanan ID dan tidak ada lagi keluhan publik mengenai permasalahan ID.

### Simplifikasi bidang perizinan dan investasi

Selama ini, apabila mendengar tentang perizinan, rasanya telinga kita alergi terhadap pengurusannya, bahkan kadang merasa benci dengan layanannya. Kondisi ini dikarenakan selama ini banyak yang merasakan bahwa birokrasi dalam mengurus perizinan penuh dengan hambatan bahkan tidak sedikit harus mengeluarkan biaya yang kurang jelas peruntukannya. Dan penyelesaiannya pun kurang jelas.

Pernyataan diatas merupakan sebuah gambaran yang mungkin dirasakan oleh semua individu yang pernah berhubungan dengan birokrasi dalam hal perizinan. Kondisi yang demikian mungkin sudah tidak asing lagi bagi yang sering mengurus perizinan baik itu izin yang sifatnya hanya dokumentatif maupun yang bersifat dokumentatif dan fisik. Dalam hal perizinan untuk berinvestasi pun masih banyak kendala bagi investor yang berkeluh kesah untuk membangun sebuah usaha, dengan investasinya belum berdiri pun sudah banyak biaya yang dikeluarkan yang terkadang tidak terkait langsung dengan investasi usahanya.

Oleh karena itu, simplifikasi bidang perizinan dan investasi ini harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Artinya bahwa segala macam yang menghambat dan menjadikan disrupsi dalam pelayanan perizinan dan investasi harus dihapuskan dan disederhanakan sesederhana mungkin, sehingga investor dapat dengan mudah mengajukan izin untuk investasi usahanya.

## C. Penutup

Simplifikasi dengan menggunakan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) sangat memungkinkan birokrasi bergerak lebih cepat, efisien dan efektif dalam melayani. Investor pun akan merasakan kenyamanan dan keamanan dalam mengurus persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi dalam mendirikan dan membangun usahanya.

Secara global apa yang dilakukan oleh birokrasi melalui simplifikasi ini akan mendorong masyarakat baik dari dalam maupun luar negeri untuk mengapresiasi kinerja birokrasi, karena apa yang telah dilakukan oleh birokrasi ini merupakan suatu hal yang sangat dibutuhkan oleh kalangan dunia usaha baik secara langsung maupun tidak langsung.

Kita hidup di era global, dimana entitas urbanisasi sangat sulit untuk dikendalikan karena pertumbuhan demografi di semua negara begitu cepat, khususnya negara di Asia. Pembatasan mobilitas individu maupun kelompok yang akan mencari keberuntungan dalam rangka peningkatan kesejahteraan hidup dan juga menghidupi tidak bisa dicegah karena adanya berbagai kepentingan antar bangsa dan negara, biasanya hal ini terkait dengan permasalahan investasi asing yang akan membangun usaha di suatu tempat dalam satu negara.

Mari kita coba merefleksi berbagai cara dalam TIK yang telah merasuk ke kehidupan kita sehari-hari di negara-negara maju selama tiga puluh tahun terakhir.

Banyak dari kita yang mengandalkan koneksi ke internet selama jam melek kita. Perangkat digital yang dapat online dari hampir semua lokasi telah terjadi mana-mana. Ponsel pintar (smartphone) dan komputer tablet cukup kecil untuk dibawa bersama kita setiap saat. Beberapa perangkat yang dikenal sebagai komputer yang melekat dipakai (wearable) - bahkan dapat dikenakan pada tubuh kita, siang dan malam, dan memantau fungsi dan aktivitas tubuh kita seperti yang kini banyak dipasang juga di smartphone. Perangkat yang cukup canggih dan mampu merekam serta menganalisis kondisi tubuh kita bahkan dapat memberikan saran sebagai solusi agar tubuh kita tetap bugar. Artinya bahwa pengaruh TIK ini sudah sangat mewarnai perilaku individu dan juga kelompok sosial yang bergantung pada TIK di berbagai kegiatannya.

Kita dapat mengakses berita, musik, televisi, dan lain-lain melalui piranti dan perangkat digital. Konektivitas kita secara intensif dan terkait dengan pekerjaan serta keanggotaan dalam grup kita mungkin setidaknya sebagian besar dikembangkan dan dipelihara menggunakan media sosial. Hampir semua pekerjaan melibatkan penggunaan TIK (meskipun sesederhana situs web untuk mempromosikan bisnis atau ponsel untuk berkomunikasi dengan rekan kerja atau klien). Kondisi ini bahkan merambah ke dunia pendidikan dimana kurikulum sekolah dan teori-teori pembelajaran semakin dikaitkan dengan TIK dan berfokus pada pelatihan siswa dalam menggunakan teknologi ini. Sistem penempatan global TIK memberi kita arahan dan membantu kita menempatkan diri lazimnya di ruang angkasa.

Nah, pengaruh TIK ini sangat banyak mewarnai perilaku birokrasi pada generasi saat ini dan di masa mendatang. Meskipun warna perilaku birokrasi generasi sebelum maraknya TIK masih ada, namun tidak berarti apa-apa sebab generasi sebelumnya juga mau tidak mau dan siap tidak siap harus menyesuaikan dengan perilaku birokrasi saat ini dan di masa mendatang, dimana TIK adalah sarana utama dalam melaksanakan kegiatan di level manapun.

Kalau kita simak selama dua dekade ini perkembangan perilaku birokrasi sangat signifikan, semua gerakan serba cepat dan sangat terbuka. Pelayanan yang dicanangkan oleh lembaga-lembaga birokrasi dunia pun sekarang sudah langsung terbuka luas, tidak ada batas karena semua individu yang terhubung dengan TIK bisa mengakses kapan saja dan dimana saja, sehingga teori birokrasi yang panjang dan banyak ceritanya itu kini perlahan akan hilang dari ingatan publik karena birokrasi generasi masa lalu adalah sangat berbeda dengan masa kini dan di masa mendatang.

Masyarakat dunia sudah berubah, bahkan saat artikel ini ditulis hampir semua negara sedang dalam kondisi pemulihan dan kebangkitan ekonomi akibat dari Pandemi Covid-19 yang berlangsung hampir dalam kurun waktu tiga tahun berjalan. Perubahan cara kerja secara online (daring) dalam lingkup birokrasi telah menjadi kebiasaan yang tidak asing lagi. Bahkan semua telah biasa dengan komunikasi secara daring, sehingga meskipun saat ini kondisi pandemik telah berganti dengan endemik namun cara kerja ataupun sistem kerja birokrasi tetap bisa dilakukan dengan sarana TIK melalui aplikasi daring yang sudah akrab dan melekat bagi setiap individu.

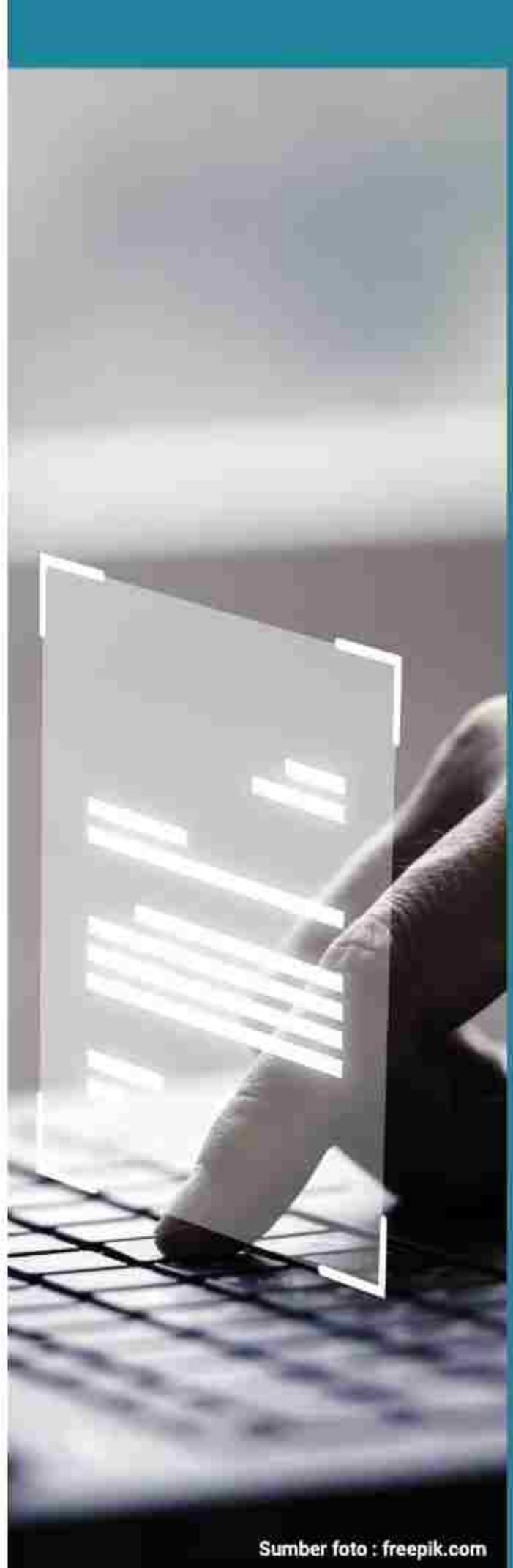
Perubahan kebiasaan yang tiba-tiba ini sangat mendapatkan respon yang positif bagi birokrasi, dimana yang selama ini tidak pernah terpikirkan terjadi dan semuanya dipaksa untuk dapat membiasakan diri bekerja mandiri dirumah dengan sarana TIK. Kebiasaan ini sangat dimungkinkan untuk berlanjut dengan mengurangi jam kerja masuk kantor karena secara kebiasaan di kalangan birokrasi telah melakukan pekerjaannya secara terus menerus selama masa pengaturan dalam pengendalian wabah penyakit.

Jadi perilaku birokrasi di masa lalu, masa kini dan masa mendatang sangat jelas perbedaannya, sehingga diperlukan pemikiran yang realistis dalam menghadapi perubahan sebagaimana sedang terjadi dan yang nampak akan terjadi. Mental feodalistik dengan mengandalkan kekuatan otoriter secara membabi buta tidak akan mampu mengendalikan perilaku birokrasi yang telah mengalami revolusi dalam segala hal dimana semuanya bersumber pada kecerdasan, ketelitian, kebijakan dan teknologi sebagai kekuatan yang merubah perilaku baik secara langsung, maupun yang tidak langsung.

Tata kelola pemerintahan yang dinamis harus terus didorong agar generasi masa depan terus dapat beradaptasi terhadap kebijakan-kebijakan global yang harus disikapinya. Simplifikasi sebagai langkah adaptasi dalam tata kelola pelayanan publik dapat terus dimonitor dan dievaluasi sehingga kebutuhan akan pelayanan publik selalu up to date. (\*\*\*)

## Referensi

1. Dynamic Governance, Boon Siong NEO dan Geraldine CHEN, 2007;
2. E-Government: Implementasi, Strategi dan Inovasi, Yayasan Kita Menulis, 2020;
3. Transformasi Leadership, Editor Solikin M. Juhro, BI Institute, 2020;
4. Policy Bureaucracy, Edward C Page dan Bill Jenkins, 2005;
5. Birokrasi Pelayanan Publik, Dr. Muhammad Sawir, S.Sos., M.Si., M.H., 2020;
6. The DIGITAL REVOLUTION, INDER SIDHU with T.C. DOYLE, 2015;
7. Pembangunan ASN 2020-2024, Kemen PAN dan RB.
8. Kebijakan Manajemen ASN Menuju Smart ASN 2024, Kemen PAN dan RB, 2019;
9. Rekonstruksi Birokrasi Pemerintahan Daerah, Irfan Setiawan, S.IP., M.Si., IPDN, 2014;



Sumber foto : freepik.com

# Fasilitasi Pengembangan Produk dan Kemasan: Bagian Kecil Dari Peran Pemerintah Secara Holistik Melalui Direktorat Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri, Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri, Kementerian Perdagangan Dalam Pemberdayaan Terhadap UMKM

Indra Satria Siburian, S.Pt., M.Si. (Analisis Kerjasama)

dan Hema Ardria Dandaniti, S.IP (Analisis Perdagangan Ahli Pertama)

Direktorat Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri, Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri

**D**irektorat Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri (P3DN) yang berada di lingkungan Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri (DJPDN) merupakan unit organisasi yang berfungsi mendukung tugas Kementerian Perdagangan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang perdagangan sebagaimana termaktub dalam Peraturan Menteri Perdagangan Tahun 2022. Lebih lanjut, fungsi yang diselenggarakan oleh Direktorat P3DN adalah penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria (NSPK), penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta penyiapan evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan produk lokal, sarana dan iklim usaha mikro, kecil, menengah perdagangan, peningkatan penggunaan produk dalam negeri, promosi dan peningkatan akses pasar, serta pemasaran produk halal. Bidang-bidang tersebut kemudian diterjemahkan ke dalam empat tim teknis di Direktorat P3DN sesuai dengan struktur organisasinya.



Gambar 1. Struktur organisasi Direktorat P3DN

Tiap tim teknis tersebut memiliki program-program unggulan untuk tujuan pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), salah satunya Fasilitasi Pengembangan Produk dan Kemasan yang diselenggarakan oleh Tim Pengembangan Produk Lokal. Ackermann (2023) mendefinisikan fasilitasi sebagai suatu disiplin yang membuat organisasi, kelompok, dan individu mampu terus beradaptasi dan berkembang menuju pertumbuhan dan perkembangan serta berubah dan bertransformasi ke arah yang positif. Melalui program ini, diharapkan kapasitas kompetensi pelaku UMKM semakin meluas sehingga terjadi peningkatan kualitas produk dan perbaikan desain kemasan produk menjadi semakin menarik.

Pada tahun 2023 ini, Tim Pengembangan Produk Lokal Direktorat P3DN telah menyelenggarakan delapan Fasilitas Pengembangan Produk dan Kemasan di delapan daerah. Dasar penyelenggaraan program ini di antaranya Major Project Pengelolaan Terpadu UMKM yang dilaksanakan di Kab. Sleman (DI Yogyakarta), Kota Manado (Sulawesi Utara), Kab. Jembrana (Bali), Kab. Batu Bara (Sumatera Utara), Kab. Kutai Kartanegara (Kalimantan Timur); pemberdayaan masyarakat desa dan perempuan yang dilaksanakan di Kab. Banyuwangi (Sumatera Selatan), Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia (Gemas BBI) di Kab. Manokwari (Papua Barat), serta dukungan terhadap Daerah Pariwisata Super Prioritas (DPSP) Danau Toba di Kab. Samosir (Sumatera Utara). Target pelaku UMKM yang menjadi peserta pada program ini adalah sebanyak seratus orang. Dalam penyelenggaraan Fasilitas Pengembangan Produk dan Kemasan tersebut, Direktorat P3DN bekerja sama dengan dinas yang membidangi perdagangan di tingkat kabupaten/kota, K/L terkait, universitas, serta pihak swasta. Pada program ini, pelaku UMKM diberikan materi-materi terkait peningkatan kompetensi pelaku UMKM guna pengembangan kualitas produk dan perbaikan desain kemasan.



Gambar 2. Struktur organisasi Direktorat P3DN

Pasca pelaksanaan kegiatan, pelaku UMKM diimbau mengisi kuesioner melalui Google Form untuk mengukur sejauh mana Fasilitas Pengembangan Produk dan Kemasan berdampak terhadap mereka. Dengan menggunakan skala Likert (1 – 5), di mana 1 berarti sangat tidak setuju dan 5 berarti sangat setuju, pada Tabel 1 berikut disajikan beberapa poin kuesioner yang terkait langsung dengan peningkatan kapasitas kompetensi pelaku UMKM dan rerata persentase pilihan skala Likert yang dipilih pelaku UMKM dari penyelenggaraan Fasilitas Pengembangan Produk dan Kemasan di delapan daerah.

**Tabel 1. Poin Kuesioner Terkait Peningkatan Kapasitas Kompetensi Pelaku UMKM dan Persentase Pilihan Skala Likert yang Dipilih**

No	Poin Kuesioner	Persentase Skala Likert yang dipilih				
		1	2	3	4	5
<b>A Kab. Sleman (DI Yogyakarta)</b>						
1	Materi terorganisir dengan baik dan mudah dipahami	0	1,5	3,1	56,9	38,5
2	Materi relevan dan sesuai harapan	0	0	7,7	58,5	33,8
3	Materi ini membuat saya lebih percaya diri dalam bekerja	0	3,1	4,6	50,8	41,5
4	Materi ini memudahkan saya dalam melaksanakan pekerjaan	0	3,1	4,6	53,8	38,5
5	Saya memperoleh sesuatu yang baru dari kegiatan ini	0	0	1,5	40,0	58,5
<b>B Kab. Banyuwangi (Sumatera Selatan)</b>						
1	Materi terorganisir dengan baik dan mudah dipahami	0	0	5,7	65,7	28,6
2	Materi relevan dan sesuai harapan	0	0	8,6	62,9	28,6
3	Materi ini membuat saya lebih percaya diri dalam bekerja	0	0	17,1	48,6	34,3
4	Materi ini memudahkan saya dalam melaksanakan pekerjaan	0	0	8,6	62,9	28,6
5	Saya memperoleh sesuatu yang baru dari kegiatan ini	0	0	2,9	57,1	40,0
<b>C Kota Manado (Sulawesi Utara)</b>						
1	Materi terorganisir dengan baik dan mudah dipahami	0	0	0	19,1	80,9
2	Materi relevan dan sesuai harapan	0	0	2,1	21,3	76,6
3	Materi ini membuat saya lebih percaya diri dalam bekerja	0	0	4,3	21,3	74,5
4	Materi ini memudahkan saya dalam melaksanakan pekerjaan	0	0	2,1	25,5	72,3
5	Saya memperoleh sesuatu yang baru dari kegiatan ini	0	0	0	21,3	78,7

<b>D Kab. Manokwari (Papua Barat)</b>						
1	Materi terorganisir dengan baik dan mudah dipahami	0	0	1,7	24,1	74,1
2	Materi relevan dan sesuai harapan	0	0	1,7	29,3	69,0
3	Materi ini membuat saya lebih percaya diri dalam bekerja	1,7	0	5,2	24,1	69,0
4	Materi ini memudahkan saya dalam melaksanakan pekerjaan	0	0	3,4	37,9	58,6
5	Saya memperoleh sesuatu yang baru dari kegiatan ini	0	0	1,7	15,5	82,8
<b>E Kab. Jembrana (Bali)</b>						
1	Materi terorganisir dengan baik dan mudah dipahami	5,4	0	0	43,2	51,4
2	Materi relevan dan sesuai harapan	5,4	0	5,4	43,2	45,9
3	Materi ini membuat saya lebih percaya diri dalam bekerja	5,4	0	0	29,7	64,9
4	Materi ini memudahkan saya dalam melaksanakan pekerjaan	5,4	0	0	43,2	51,4
5	Saya memperoleh sesuatu yang baru dari kegiatan ini	5,4	0	0	21,6	73,0
<b>F Kab. Batu Bara (Sumatera Utara)</b>						
1	Materi terorganisir dengan baik dan mudah dipahami	0	0	0	50,0	50,0
2	Materi relevan dan sesuai harapan	0	0	0	50,0	50,0
3	Materi ini membuat saya lebih percaya diri dalam bekerja	0	0	0	60,0	40,0
4	Materi ini memudahkan saya dalam melaksanakan pekerjaan	0	0	0	70,0	30,0
5	Saya memperoleh sesuatu yang baru dari kegiatan ini	0	0	0	50,0	50,0
<b>G Kab. Kutai Kartanegara (Kalimantan Timur)</b>						
1	Materi terorganisir dengan baik dan mudah dipahami	0	2,1	6,4	40,4	51,1
2	Materi relevan dan sesuai harapan	0	2,1	4,3	57,4	36,2
3	Materi ini membuat saya lebih percaya diri dalam bekerja	2,1	0	6,4	40,4	51,1
4	Materi ini memudahkan saya dalam melaksanakan pekerjaan	0	2,1	8,5	46,8	42,6
5	Saya memperoleh sesuatu yang baru dari kegiatan ini	2,1	0	2,1	23,4	72,3
<b>H Kab. Samosir (Sumatera Utara)</b>						
1	Materi terorganisir dengan baik dan mudah dipahami	0	0	5,4	43,2	51,4
2	Materi relevan dan sesuai harapan	0	0	10,8	45,9	43,2
3	Materi ini membuat saya lebih percaya diri dalam bekerja	0	0	0	54,1	45,9
4	Materi ini memudahkan saya dalam melaksanakan pekerjaan	0	0	5,4	59,5	35,1
5	Saya memperoleh sesuatu yang baru dari kegiatan ini	0	0	2,7	35,1	62,2
<b>Rata-rata</b>		<b>0,8</b>	<b>0,4</b>	<b>3,6</b>	<b>42,6</b>	<b>52,6</b>



## Referensi

Dari Tabel 1 di atas diketahui bahwa pelaku UMKM yang memilih skala 4 dan skala 5 menempati persentase terbesar, yaitu 42,6% dan 52,6%. Dengan demikian, pelaku UMKM dapat dikatakan setuju bahwa Fasilitasi Pengembangan Produk dan Kemasan yang diselenggarakan Direktorat P3DN menyajikan materi yang terorganisir dengan baik dan mudah dipahami, relevan dan sesuai harapan, membuat pelaku UMKM lebih percaya diri dalam bekerja, mempermudah pekerjaan, dan memperoleh sesuatu yang baru.

Fasilitasi Pengembangan Produk dan Kemasan yang dilaksanakan oleh Direktorat P3DN DJPDN Kemendag merupakan salah satu dari sekian banyak program dari salah satu unit organisasi pemerintah yang dilaksanakan dalam upaya pemberdayaan UMKM. Diharapkan bagian kecil ini punya pengaruh yang besar dalam peningkatan penggunaan produk dalam negeri karya UMKM secara holistik. Terselenggaranya program ini tidak terlepas dari kompetensi para pegawai dengan jabatan fungsional umum (JFU) maupun jabatan fungsional tertentu (JFT) dalam melaksanakan tugas dan fungsi jabatannya. Kecakapan pegawai tentu menjadi hal yang sangat penting dalam penyelenggaraan urusan pemerintah menyongsong transisi menuju Ibu Kota Nusantara (IKN).

1. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 29 Tahun 2022 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perdagangan.
2. Ackermann, R. 2023. *Facilitation: A Guide to Approaches in Practice*. Gordon Institute



# DIGITALISASI PENGAWASAN KEMETROLOGIAN DI KABUPATEN DELI SERDANG

Oleh: J. Hendra Humberto Lbn. Tobing  
Pengawas Kemetrollogian Ahli Pertama  
Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Deli Serdang

## PENDAHULUAN

Tonggak dimulainya digitalisasi kegiatan pengawasan kemetrollogian yang dilakukan di Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara, adalah agar pengumpulan angka kredit menjadi lebih efisien.

Selepas dilantik dalam jabatan fungsional Pengawas Kemetrollogian pada Desember 2020, Penulis mempelajari bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Kemetrollogian dan Angka Kreditnya, kunci mendapatkan banyak angka kredit ada pada dokumen yang dihasilkan dalam pengawasan yaitu Berita Acara Hasil Pengawasan (BAHP) dan Cerapan Pengawasan. Kami harus mengumpulkan sebanyak-banyaknya dokumen tersebut karena nilai angka kreditnya yang kecil, yaitu hanya 0,0x.

Namun, Penulis merasakan kendala dalam mengumpulkan sebanyak-banyaknya dokumen tersebut jika dilakukan dengan tulisan tangan. Ditambah lagi kendala di anggaran, yaitu anggaran perjalanan dinas pengawasan dan anggaran alat tulis kantor. Maka terlintaslah oleh Penulis untuk membuat aplikasi untuk mempermudah dan mempercepat proses pencatatan pengawasan.

Biaya membuat aplikasi tidaklah murah. Sedangkan Penulis sendiri tidak memiliki kemampuan membuat aplikasi. Setelah menjelajah internet sehari-hari, akhirnya Penulis menemukan situs yang dapat menghasilkan aplikasi tanpa harus coding. Hebatnya lagi, aplikasi tersebut gratis walau dengan beberapa pembatasan seperti maksimal hanya dapat digunakan hingga 10 pengguna. Nama aplikasi AppSheet.

## DENGAN AppSheet MENGHASILKAN siPetrol

AppSheet adalah aplikasi yang menyediakan platform pengembangan tanpa kode untuk perangkat lunak aplikasi, yang memungkinkan pengguna membuat aplikasi seluler, tablet, dan web menggunakan sumber data seperti Google Drive, DropBox, Office 365, dan platform spreadsheet dan basis data berbasis cloud lainnya [1]. Jika dilihat dari namanya, AppSheet adalah aplikasi berbasis spreadsheet. Sedang spreadsheet sendiri adalah aplikasi yang diperuntukkan untuk membuat, mengelola, hingga menganalisis data.

Sejak April 2021, setelah mempelajari AppSheet dari berbagai sumber, Penulis mencoba membuat aplikasi pengawasan demi cepat terkumpulnya angka kredit. Setelah beberapa kali mengalami perubahan baik konsep dan nama aplikasi, hasil akhirnya aplikasi tersebut diberi nama siPetrol yang merupakan singkatan dari Aplikasi Pengawasan Kemetrollogian.

Walau gratisan, namun AppSheet lebih dari cukup untuk dipakai dalam pembuatan siPetrol. siPetrol dapat melakukan banyak hal, mulai dari memasukkan data ke dalam Google Spreadsheet, mengolah data, melakukan perhitungan, hingga membuat dokumen seperti BAHP dan Cerapan dalam format Portable Document Format (PDF) yang tersimpan dalam Google Drive (salah satu contohnya dapat dilihat pada Gambar 1). Dokumen PDF inilah yang seyogianya digunakan untuk mengumpulkan angka kredit sebanyak-banyaknya.



Gambar 1. Contoh BAHP yang Telah Tersimpan di Google Drive

## Dengan AppSheet, didapat banyak hal dalam pembuatan siPetrol untuk digunakan dalam melakukan tugas antara lain:

1. Melakukan pendataan pelaku usaha di bidang Metrologi Legal, baik itu pemilik/pengguna alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya (UTTP) maupun pelaku usaha Barang Dalam Keadaan Terbungkus (BDKT).

2. Melakukan pendataan UTTP dengan pencatatan koordinat UTTP berada dan penemplan QR code pada UTTP.

3. Hasil pengawasan BDKT dapat diakses menggunakan kode batang yang tercetak pada kemasan.

4. Membuat BAHP. Produk akhirnya adalah dokumen BAHP yang difandatangani secara digital dalam format PDF.

5. Membuat Cerapan. Sewaktu mengisi Cerapan, digunakan formula-formula yang membantu perhitungan dan membuat kesimpulan. Contohnya dalam pengawasan UTTP dan Satuan Ukuran yaitu menentukan titik uji, batas kesalahan yang diizinkan (BKD), dan kesimpulan memenuhi atau tidak memenuhi. Produk akhirnya adalah dokumen Cerapan dalam format PDF.

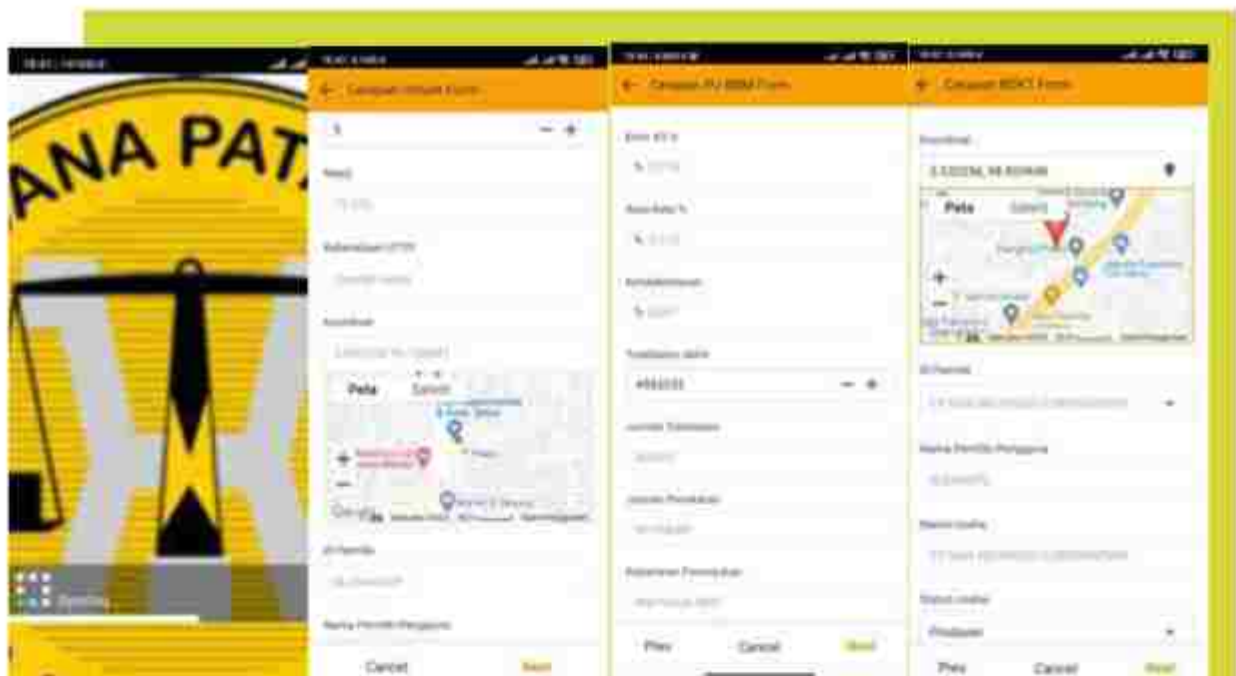
6. Mendokumentasikan dalam bentuk foto hal-hal tertentu dalam pengawasan misalnya tanda tera, cetakan satuan ukuran, kemasan BDKT, dan cetakan kuantitas nominal pada kemasan BDKT.

7. Organisasi basis data.

8. Menampilkan data yang diinginkan secara cepat, termasuk dengan memindai QR code.

9. Memperbarui basis data sesuai dengan kondisi terakhir pengawasan, misalnya tanggal terakhir dilakukan peneraan dan status tanda tera sah.

Saat ini, siPetrol digunakan oleh 2 (dua) orang petugas yang menjabat sebagai Pengawas Kemetrolagian UPTD Metrologi Legal Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Deli Serdang yang masing-masing petugas memasang aplikasi tersebut di ponselnya. Beberapa tangkapan layar siPetrol dapat dilihat pada Gambar 2.



Gambar 2. Beberapa Tangkapan Layar siPetrol

### BASIS DATA (DATABASE)

siPetrol menggunakan basis data yang terhubung dengan Google Spreadsheet. Aplikasi milik Google ini juga gratis digunakan. siPetrol menggunakan 2 (dua) berkas Google Spreadsheet diberi nama Data UTTP dan Data Pengawasan.

Data UTTP menampung data pelaku usaha dan data UTTP. Sedang Data Pengawasan menampung data hasil pengawasan antara lain BAHP, Cerapan UTTP, Cerapan BDKT, dan Laporan.

### STIKER QR CODET

Sejak awal pengoperasian aplikasi, pada UTTP jenis tertentu, misalnya timbangan, dilakukan penempelan stiker QR code. Penempelan ini bertujuan untuk identifikasi UTTP yang telah dilakukan pendataan, terutama UTTP yang mudah berpindah tempat. QR Code dibuat berdasarkan ID UTTP yang berupa kode unik UTTP tersebut.

Awalnya Penulis dihadapkan dengan 2 (dua) pilihan bagaimana QR Code ini dihasilkan: sebelum atau sesudah dilakukan pendataan. Jika pilihannya sesudah pendataan, diperlukan portable printer untuk mencetak QR Code. Pilihan ini dieliminasi dikarenakan faktor

anggaran dan ketidakpraktisan dalam pengoperasiannya. Dipilihlah QR Code yang sudah disiapkan sebelum kegiatan pendataan dilakukan.

QR Code yang sudah disiapkan ini nantinya ditempelkan pada UTTP. Untuk itu, diperlukan media cetak yang memiliki daya rekat yang baik, tahan air, dan tidak mudah sobek serta cetakan tidak mudah pudar.

Berdasarkan hasil peninjauan di internet, dipilihlah media cetak yaitu stiker sintetis Yupo yang dicetak dengan tinta ultraviolet (uv). Bahan stiker sintetis Yupo memiliki daya rekat yang baik, tahan air, dan tidak mudah sobek [2]. Hasil cetakan dengan tinta uv memiliki keunggulan tahan goresan dan tidak mudah luntur [3].

Dengan pertimbangan biaya cetak, QR Code berukuran 3 cm x 3 cm dicetak dalam kertas ukuran 45 cm x 90 cm. Kertas ukuran 45 cm x 90 cm ini sesuai dengan standar percetakan tempat dicetaknya stiker QR Code ini. Dalam selembar kertas stiker ukuran 45 cm x 90 cm didapat 392 buah stiker QR Code ukuran 3 cm x 3 cm. Desain QR Code dan penempatannya pada UTTP dapat dilihat pada Gambar 3.



Gambar 3. Desain QR Code dan Penempatannya pada UTTP

# SI POLAN METAL

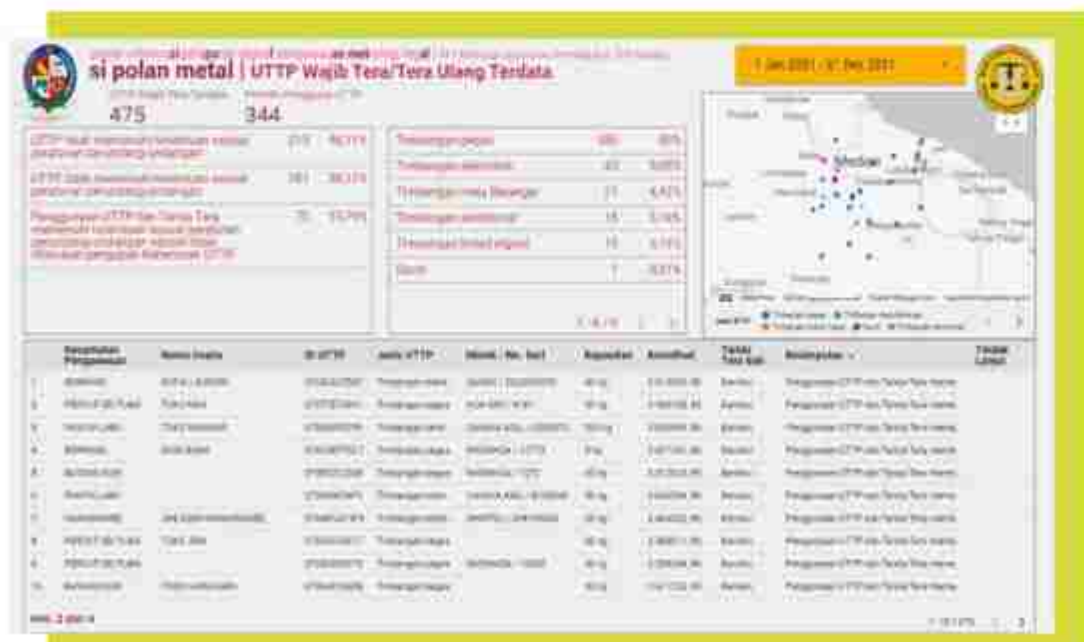
Seiring dengan waktu, berdasarkan hasil pengamatan terhadap daya tahan stiker terhadap penggunaan cairan pembersih, saat ini setelah stiker dicetak, diberi cat semprot transparan yang biasa digunakan untuk sepeda motor. Cat semprot ini berfungsi sebagai lapisan laminasi yang akan meningkatkan daya tahan stiker. Selain penggunaan cat semprot, percetakan juga menyediakan laminasi yang dapat dipesan sewaktu mencetak stiker. Namun Penulis beranggapan bahwa cat semprot, yang memang diperuntukkan untuk sepeda motor masih lebih baik dibanding laminasi dari percetakan.

Papan Informasi Pelaporan Digital Pengawasan Metrologi Legal atau disingkat si polan metal adalah pelaporan kegiatan Pengawasan Metrologi Legal dalam bentuk dashboard. Dashboard, yang diterjemahkan dalam bahasa Indonesia menjadi dasbor, diartikan oleh Kamus Besar Bahasa Indonesia menjadi panel dalam mobil, kapal terbang, dan sebagainya di bawah kaca depan berisi petunjuk panel kontrol [4]. Dalam dunia teknologi informasi, dashboard dapat diartikan sebagai bentuk visualisasi data secara real-time. Visualisasi data merupakan teknik penyajian data dalam bentuk gambar, grafik, tabel, atau bentuk lainnya sehingga menarik dan mudah dipahami.

Si polan metal dibuat dengan menggunakan Google Looker Studio, yang juga gratis digunakan. Google Looker Studio, yang sebelumnya bernama Google Data Studio, adalah alat untuk mengkonversi data menjadi laporan dan dasbor informatif yang dapat disesuaikan yang diperkenalkan oleh Google pada 15 Maret 2016 sebagai bagian dari rangkaian Google Analytics 360 perusahaan [5].

Penulis membuat si polan metal pada Februari 2023, berangkat dari bagaimana memanfaatkan basis data yang telah dibangun dengan Google Spreadsheet menjadi menarik, informatif, dan real-time. si polan metal bersumber dari basis data yang ada pada berkas Data Pengawasan ditambah berkas Laporan Pengawasan. Berkas Laporan Pengawasan merupakan berkas Google Spreadsheet yang dapat bekerja secara otomatis mengambil dan mengolah data dari berkas Data Pengawasan dengan menggunakan formula-formula bawaan Google Spreadsheet untuk selanjutnya ditampilkan pada si polan metal.

Si polan metal dapat ditampilkan secara layar penuh pada komputer, proyektor, bahkan televisi pintar layar besar. Dengan demikian, si polan metal diharapkan lebih menarik perhatian pemangku kepentingan dalam pelaporan kegiatan pengawasan. Selain itu, si polan metal membantu kami dalam menganalisis hasil pengawasan untuk dijadikan bahan evaluasi ataupun perencanaan kegiatan pengawasan selanjutnya.



Gambar 4. Tampilan Halaman 2 si polan metal

## APA BERIKUTNYA?

Beberapa hal yang Penulis harapkan dapat diwujudkan kedepannya antara lain:

1. Terintegrasinya digitalisasi pelayanan tera/tera ulang sehingga data peneraan seperti tanggal tera, kode daerah, kode Pegawai Berhak, dan tahun tanda tera sah otomatis diperbarui ke Data UTTP.
2. Terciptanya suatu aplikasi Metrologi Legal yang dapat dipasang masyarakat dengan fitur antara lain memeriksa kesesuaian UTTP berdasarkan QR Code yang tertempel, memeriksa kesesuaian BDKT berdasarkan kode barang yang ada di kemasan, dan mudah dijangkau, dimana masyarakat dapat menemukan tempat usaha terdekat dengannya yang memiliki UTTP bertanda tera sah yang berlaku.

## PENUTUP

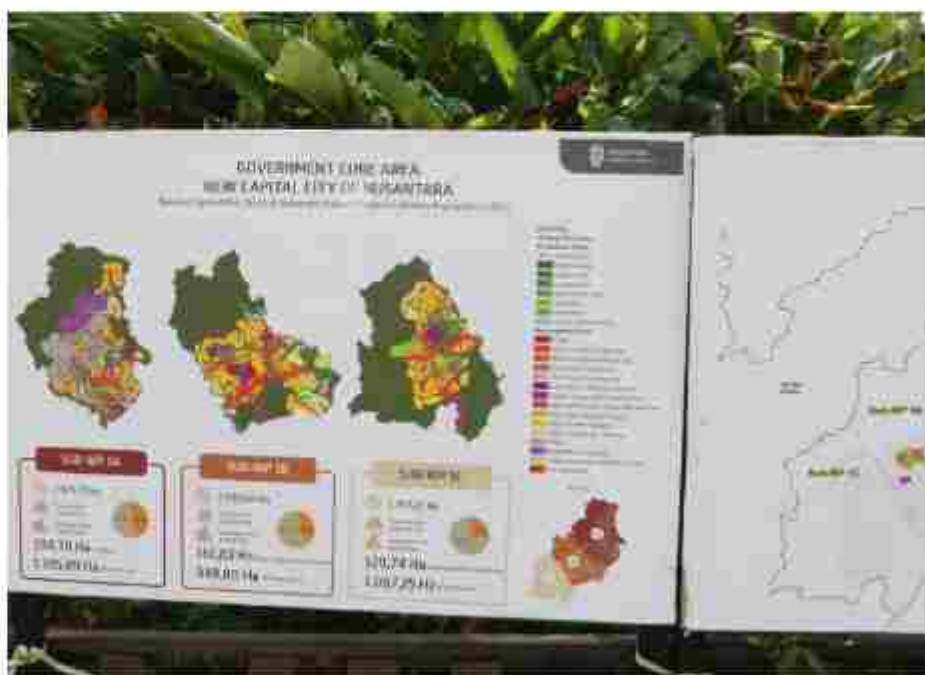
Digitalisasi menjadikan kerja lebih cepat dan praktis. Hasil pengawasan secara langsung tersimpan dalam berkas digital dan dapat diakses di mana saja karena tersimpan secara cloud. Hasil pengawasan langsung tersimpan secara digital dalam berkas Google Spreadsheet dan Portable Document Format (PDF).

Data digital lebih mudah diolah dan dianalisis untuk pengambilan keputusan. Digitalisasi juga dapat menghemat anggaran, baik secara langsung dalam bentuk anggaran alat tulis dan secara tidak langsung dalam bentuk anggaran perjalanan dinas. Dan yang tidak kalah penting, digitalisasi mendukung terselesenggaranya lingkungan kerja go green.

## HUBUNGAN DENGAN IBU KOTA NEGARA (IKN) NUSANTARA

Menghubungkan dengan tema Kompeten edisi ini, apa yang telah dilakukan di Kabupaten Deli Serdang haruslah diterapkan dengan lebih baik lagi di IKN. IKN dibangun sebagai pusat perkotaan yang modern dengan konsep smart forest city. Sebagai smart city, IKN haruslah menjadi kota yang akrab dengan penggunaan teknologi informasi. Dimulai dari Aparatur Sipil Negara (ASN) yang akrab dengan penggunaan teknologi informasi dalam pelaksanaan tugas sehari-hari, termasuk ASN yang menjabat sebagai fungsional dalam bidang perdagangan.

Hasil pelaksanaan tugas ASN ini menjadi big data yang dapat dimanfaatkan oleh semua pihak, termasuk oleh penduduk IKN. Salah satu bentuk pemanfaatannya yaitu penduduk IKN yang juga adalah konsumen dapat menggunakan ponsel pintarnya dalam mengakses informasi terkait Metrologi Legal. Bahkan bukan hanya aspek Metrologi Legal saja, namun disatukan dalam satu aplikasi koncer (konsumen cerdas) yang menggabungkan semua hal terkait menjadi konsumen cerdas.



## Referensi

- [1] <https://en.wikipedia.org/wiki/AppSheet>, diakses 23 September 2023
- [2] <https://gaitylabelsticker.com/material/>, diakses 28 September 2023
- [3] <https://texco.co.id/jenis-tinta-digital-printing/#4tinta-uv>, diakses 28 September 2023
- [4] <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/dasbor>, diakses 29 September 2023
- [5] [https://en.wikipedia.org/wiki/Looker\\_Studio](https://en.wikipedia.org/wiki/Looker_Studio), diakses 29 September 2023

# METROLOGI DALAM AGAMA :

## PENERA, DIANTARA PAHALA ATAU DOSA JARIYAH

Oleh : Mohamad Nurdinsyah Ekapujakesuma, S.T.  
Penera Terampil, Bidang Metrologi Disperindag  
Kab. Banyumas

Ilmu Pengukuran (Metrologi) telah ada sejak zaman dahulu. Ilmu Pengukuran tak lekang oleh waktu, akan terus ada dan selalu digunakan sampai kapanpun, bahkan dalam kehidupan setelah kematian yaitu pada Yau-mul Mizan hari dimana segala perbuatan manusia akan ditimbang. Pengukuran yang ada di dunia dilakukan oleh manusia, sedangkan di akhirat pengukuran dilakukan oleh Allah Subhanahu Wata'ala. Pengukuran oleh manusia memungkinkan terjadinya kesalahan baik yang disengaja maupun tidak disengaja, dan terdapat banyak faktor ketidakpastian. Pengukuran oleh Allah bersifat absolut tidak mungkin terjadi kesalahan dan Maha Adil. Ilmu Pengukuran tidak dapat dipisahkan dalam hal agama. Agama mengatur bagaimana cara mengukur yang benar, larangan dalam melakukan pengukuran, serta ancaman dan hukuman bagi pelaku kecurangan dalam hal pengukuran.

### A. Metrologi dalam Kitab Suci

Pada zaman orang-orang terdahulu banyak sekali terjadi kecurangan dalam hal pengukuran sehingga saling merugikan satu sama lain. Hal ini yang menyebabkan kemurkaan dari Allah Subhanahu Wata'ala terhadap orang-orang yang berbuat kecurangan dalam hal pengukuran. Ancaman dan hukuman yang keras juga menanti bagi mereka kelak di kemudian hari. Beberapa contoh tentang perintah, ancaman, dan hukuman tentang pengukuran (takaran dan timbangan) dalam berbagai kitab suci agama, antara lain:

### Kitab Al Qur'an

*"Janganlah kamu mendekati (menggunakan) harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih bermanfaat, sampai dia mencapai (usia) dewasa. Sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil. Kami tidak membebani seseorang melainkan menurut kesanggupannya. Apabila kamu berbicara, laksanakanlah secara adil sekalipun dia kerabat(-mu). Penuhilah pula janji Allah. Demikian itu Dia perintahkan kepadamu agar kamu mengambil pelajaran." (Q.S. Al-An'am 6 : 152)*

*"Sempurnakanlah takaran dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang merugikan orang lain; Timbanglah dengan timbangan yang benar; Janganlah kamu merugikan manusia dengan mengurangi hak-haknya dan janganlah membuat kerusakan di bumi." (Q.S. Asy-Syu'ara 26 : 181 - 183)*

*"Sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar dan timbanglah dengan timbangan yang benar. Itulah yang paling baik dan paling bagus akibatnya." (Q.S. Al-Isra' 17 : 35)*

*"Celakalah orang-orang yang curang (dalam menakar dan menimbang); (Mereka adalah) orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain, mereka minta dipenuhi; (Sebaliknya,) apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka kurangi." (Q.S. Al-Muthaffifin 83 : 1 - 3)*



Sumber foto : freepik.com

## Kitab Injil Perjanjian Lama

"Dalam pundi-pundi-mu jangan ada batu timbangan yang berlainan, yaitu yang besar dan yang kecil; Dalam rumahmu jangan ada takaran yang berlainan, yaitu yang besar dan yang kecil; Sebaliknya, engkau harus memiliki batu timbangan yang tepat dan benar, juga takaran yang tepat dan benar supaya lanjut umurmu di tanah yang dikaruniakan ALLAH, Tuhanmu, kepadamu; ALLAH, Tuhanmu, memandang keji semua orang yang berbuat demikian, yaitu semua orang yang melakukan kecurangan." (Ulangan 25 : 13-16)

Jangan lakukan kecurangan dalam peradilan, dalam hal ukuran, dalam hal timbangan dan dalam hal sukatan; Gunakanlah neraca yang betul, batu timbangan yang betul, efa yang betul dan hin yang betul. Akulah Allah, Tuhanmu, yang membawa kamu keluar dari tanah Mesir." (Imamat 19 : 35-36)

"TUHAN membenci orang yang memakai timbangan yang curang tapi Ia senang dengan orang yang memakai timbangan yang tepat". (Amsal 11 : 1)

## Kitab Injil Perjanjian Baru

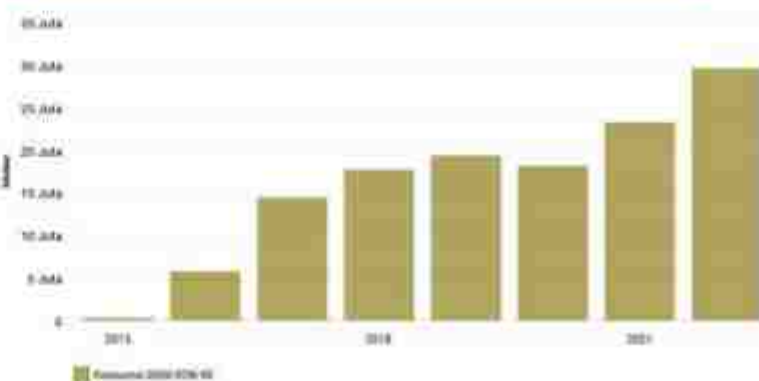
"Berilah dan kamu akan diberi satu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang dan yang tumpah ke luar akan dicurahkan ke dalam haribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur, akan diukurkan kepadamu." (Lukas 6 : 38)

## B. Penera : The Underrated Judges

Unit Metrologi Legal merupakan ujung tombak pelayanan kemetrologian untuk menciptakan tertib ukur di masyarakat. Tertib Ukur merupakan perintah langsung dari Allah Subhanahu Wata'ala dalam kitab sucunya, Allah Subhanahu Wata'ala memerintahkan agar menyempumakan takaran dan timbangan, menggunakan timbangan dengan benar, dan mengancam dengan keras bagi mereka yang melakukan kecurangan dalam penimbangan atau pengukuran.

Penera merupakan garda terdepan pelayanan tera/tera ulang pada Unit Metrologi Legal. Penera layaknya seorang hakim, menentukan alat ukur mana yang layak dan tidak layak untuk digunakan. Berbeda dengan hakim pada umumnya, dimana beberapa kasus penuh drama dalam memutuskan sebuah perkara, alur cerita sandiwara untuk memenuhi kebutuhan media dan sosialita. Penera multitalenta dalam bekerja. Sebagian kecil di daerah, penera juga berperan sebagai pengawas, pengamat, bendahara, pengurus barang, pranata laboratorium dan tugas lainnya. Banyaknya jumlah dan jenis alat ukur yang wajib di tera serta terbatasnya jumlah penera menjadikan semakin tinggi beban kerja. Penera juga dituntut adaptif dalam bekerja. Aturan-aturan yang sangat dinamis terkadang hanya bisa legowo untuk diterima. Penera memutuskan "SAH" atau "BATAL" dari suatu alat ukur bukan hanya sekedar perkiraan. Banyak peraturan yang menjadi acuan. Perlu ilmu dan banyak pengalaman, agar tidak salah dalam menentukan.

Pompa Ukur BBM alat ukur untuk penyerahan BBM kepada konsumen akhir merupakan alat ukur yang Wajib Ditera/Tera Ulang setiap tahunnya. Batas Kesalahan Yang Dilizinkan (BKD) dari Pompa Ukur BBM adalah 0,5%.



Gambar 1. Data Konsumsi BBM Pertalite di Indonesia tahun 2015-2022

(Sumber : <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/06/15/konsumsi-bbm-kelas-pertalite-melonjak-pada-2022-rekor-tertinggi-baru>)



Berdasarkan data Kementerian ESDM, sepanjang tahun 2022 konsumsi bahan bakar (BBM) Ron 92 (Pertalite) di Indonesia adalah sebesar 29,68 juta kL. Apabila kesalahan Pompa Ukur diimbang BKD yaitu sebesar 0,5% maka potensi losses atau kerugian adalah  $29.680.000.000 \text{ Liter} \times 0,5\% = 148.400.000 \text{ Liter}$ . Jika dirupiahkan dengan harga jual Pertalite sebesar Rp 10.000,- maka potensi potensi losses atau kerugian adalah sebesar Rp 1.484.000.000.000,- atau 1,484 Triliun. Potensi kerugian tersebut adalah hanya dari 1 jenis BBM yaitu Pertalite, belum termasuk BBM jenis lainnya seperti Pertamina, Bio Solar, Dexlite dan lainnya. Belum lagi untuk jenis komoditi lain yang menggunakan alat ukur sebagai alat transaksi, pastinya potensi losses atau kerugian akan jauh lebih besar dan dampak kepada masyarakat luas juga akan lebih besar.

Oleh karena itu, Penera dalam memutuskan "SAH" atau "BATAL" suatu alat ukur memiliki tanggung jawab serta dampak yang besar dan sangat luas, tanpa perlu saksi yang memberatkan atau meringankan. Setiap keputusan yang diambil menjadi tanggung jawab penuh seorang Penera, baik di dunia maupun di

### C. Diantara Pahala atau Dosa Jariyah

Perintah Allah Subhanahu Wata'ala dalam kitabnya sangat jelas yaitu agar menyempurnakan takaran dan timbangan, walaupun secara hakikatnya tidak mungkin adanya suatu pengukuran yang sempurna. Dalam pengukuran terdapat faktor ketidakpastian. Ketidakpastian dipengaruhi dari banyak hal, antara lain dari alat ukur yang digunakan, orang yang melakukan pengukuran, serta kondisi lingkungan tempat pengukuran dilakukan. Walaupun demikian, setidaknya usaha untuk mendekati sempurna sudah dilakukan, dengan mengikuti tata cara dan aturan-aturan yang ada.

Kondisi yang ada saat ini, kesadaran masyarakat untuk menera alat ukur masih sangat rendah. Sosialisasi tentang pentingnya tera/tera ulang serta penggunaan alat ukur yang benar juga belum maksimal. Seringkali dijumpai alat ukur yang kondisinya kurang layak dan setelah dilakukan pengujian nilainya jauh sekali dari batas toleransi yang ada. Selain itu, hampir sebagian besar pemilik alat ukur melakukan tera hanya untuk memenuhi kewajiban agar tidak mendapatkan sanksi hukum berdasarkan Undang-Undang yang ada, bukan atas kesadaran bahwa menggunakan alat ukur yang baik dan benar juga merupakan perintah dari Allah Subhanahu Wata'ala.

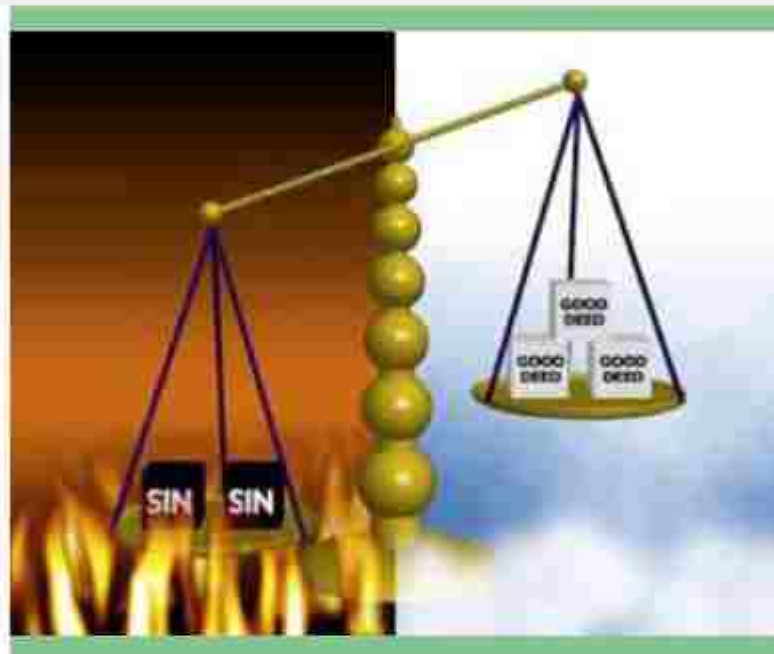


Gambar 2. Penimbangan Anak Timbangan

Masih banyak alat ukur yang tidak layak digunakan dan masih beredar di masyarakat. Bayangkan apabila Anak Timbangan pada Gambar 2 masih digunakan untuk transaksi jual beli, akan banyak masyarakat yang dirugikan. Posisi penera dalam hal ini ada diantara dua persimpangan yaitu diantara pahala jariyah atau dosa jariyah. Pahala jariyah akan diperoleh apabila penera melaksanakan perintah Allah untuk menyempurnakan takaran dan timbangan dengan cara tidak mengesahkan alat ukur yang tidak memenuhi ketentuan yang ada, mengkondisikan agar alat ukur tersebut memenuhi ketentuan (melakukan penjustiran atau perbaikan), kemudian mengesahkan apabila alat ukur yang benar-benar layak dan memenuhi ketentuan. Selain itu berperan aktif memberikan sosialisasi kepada para pemilik alat ukur agar menggunakan alat ukur dengan benar, pentingnya melakukan tera ulang, serta dampak apabila menggunakan alat ukur yang tidak sesuai ketentuan yang berlaku, sehingga dengan ini diharapkan secara perlahan mampu meningkatkan kesadaran tertib ukur di masyarakat. Alat ukur yang baik, disertai penggunaannya yang benar akan menambah keberkahan setiap kali alat ukur tersebut digunakan. Keberkahan akan membawa pada kebaikan-kebaikan lainnya, dan kebalikan-kebaikan tersebut dapat mengantarkan ke surga.

Sebaliknya, dosa jariah akan diperoleh apabila penera melakukan pengujian alat-alat ukur tidak sesuai aturan yang ada, kemudian dengan sengaja mengesahkan alat ukur yang tidak sesuai ketentuan, serta mengabaikan alat-alat ukur yang tidak layak tanpa melakukan usaha mengingatkan kepada para pemilik atau pengguna alat ukur agar menggunakan alat ukur yang baik dan sudah ditera. Hal ini termasuk dalam perbuatan zalim karena meletakkan sesuatu perkara bukan pada tempatnya. Dampaknya jelas, setiap kali alat ukur digunakan akan merugikan salah satu pihak entah itu penjual atau pembeli karena alat ukur yang tidak sesuai. Kezaliman membawa pada keburukan lainnya. Keburukan-keburukan tersebut dapat mengantarkan ke neraka.

Tanpa disadari dampak dari suatu pengukuran sangat besar, bukan hanya di dunia tetapi juga di akhirat. Pengukuran bisa menjadi sarana ibadah kepada Allah Subhanahu Wata'ala, membuka keran pahala untuk menambah berat timbangan amal kebaikan, atau justru membuka keran Dosa yang dapat menambah berat timbangan amal keburukan. Tanpa bisa dijustir maupun dilakukan perbaikan. Pada hari itu segala amal perbuatan sudah dicukupkan, menunggu waktu dimana akan ditempatkan. Surga dengan keindahan, atau neraka dengan siksaan.



Gambar 3. Ilustrasi Timbangan amal perbuatan  
(Sumber : <http://vickycaturakbar.blogspot.com/2012/05/timbangan-dosa-dan-pahala.html>)

## Referensi

1. <https://quran.kemenag.go.id/>
2. <https://kitabtzi.com/>
3. <https://bible.knowing-jesus.com/topics/Measurement>
4. <http://www.penayasin.com/2010/12/kecurangan-timbangan-dalam-pandangan.html>
5. <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/06/15/konsumsi-bbm-kelas-pertalite-melonjak-pada-2022-rekor-tertinggi-baru>

# Peran Penting Kompetensi Perdagangan Internasional bagi Pejabat Fungsional Bidang Perdagangan

Victor Tulus Pangapoi Sidabutar

Pusat Pelatihan Sumber Daya Manusia Ekspor dan Jasa Perdagangan, Kementerian Perdagangan

## Pendahuluan

Lingkungan bisnis saat ini yang tidak dapat diprediksi menyebabkan banyak penyesuaian dalam cara orang bekerja. Konsumen sering kali mencari produk dan layanan yang disediakan oleh profesional bersertifikat karena mereka memiliki keyakinan lebih besar terhadap kualitas dan keamanan layanan yang diberikan. Pekerja yang tersertifikasi dianggap telah memastikan kepatuhan terhadap standar hukum dan keselamatan yang berlaku. Hal ini akan membantu dalam menjaga keamanan masyarakat dan mencegah kecelakaan atau bahaya saat melakukan pekerjaan. Oleh karena itu, organisasi mendapat manfaat dari memiliki pekerja yang telah tersertifikasi. Staf yang tersertifikasi keahliannya dapat membantu organisasi mempertahankan standar tinggi, bersaing secara efektif, dan memberikan layanan yang lebih baik kepada klien. Selain itu, sertifikasi tersebut menunjukkan komitmen individu terhadap bidangnya dan dedikasinya untuk memenuhi standar yang diakui. Hal ini membangun kredibilitas dan kepercayaan di antara kolega, klien, dan pemberi kerja. Sertifikasi dapat berkontribusi terhadap pertumbuhan karir individu, pembangunan ekonomi, keberhasilan organisasi, dan kemajuan masyarakat secara keseluruhan. Hal ini mengharuskan individu untuk menjalani pelatihan dan pendidikan terstruktur, memastikan mereka memperoleh keterampilan dan pengetahuan khusus yang selaras dengan standar industri dan praktik terbaik. Begitu mereka memiliki keterampilan ini, seseorang dapat yakin akan kualitas dan kompetensinya karena mereka telah memenuhi kriteria tertentu dan telah dinilai oleh otoritas yang diakui, sehingga meyakinkan pemberi kerja dan klien akan kemampuan mereka. Sertifikasi membantu pekerja tetap mengikuti tren, teknologi, dan metodologi terkini. Hal ini memastikan bahwa tenaga kerja tetap relevan dan mampu berkontribusi terhadap pertumbuhan industri karena dianggap memiliki tingkat keahlian yang konsisten, sehingga meningkatkan kualitas layanan secara keseluruhan.

Terkait dengan isi kurikulum dan silabus yang layak digunakan dalam kegiatan pendidikan dan pelatihan, permasalahan ini menimbulkan beberapa permasalahan bagi bidang pendidikan dan pelatihan. Tujuan dari semua pendidikan dan pelatihan adalah untuk mempersiapkan peserta menghadapi lingkungan kerja aktual di masa depan sehingga mereka dapat memperoleh prestasi profesional dari pekerjaan yang mereka lakukan. Kemampuan pekerja untuk memprediksi masa depan mungkin terhambat oleh lingkungan bisnis yang penuh gejolak, ketidakpastian, kompleks, dan membingungkan. Penggunaan model mental deterministik untuk memperkirakan masa depan dari masa kini tidak mungkin lagi dilakukan. Desain strategi baru yang kompleks yang melibatkan pendekatan baru dan terarah berdasarkan model probabilitas dan teori kompleksitas telah menggantikan perencanaan strategis. Agar pekerja dapat beradaptasi terhadap perubahan lingkungan bisnis, organisasi harus mampu bereaksi terhadap perubahan tersebut. Tenaga kerja harus mampu menciptakan strategi untuk "penilaian atau tanggapan imajinatif terhadap apa yang tidak diketahui, terhadap sifat mengejutkan, tidak terduga, tidak lengkap, atau tidak logis dari apa yang muncul melalui praktik". Hal ini karena lingkungan perusahaan tidak menentu. Untuk mempertahankan keunggulan kompetitifnya, bisnis harus cepat beradaptasi dengan ketidakpastian lingkungan bisnis yang berubah dengan cepat. Pengembangan kompetensi tidak terjadi secara otomatis dalam lingkungan belajar-mengajar, melainkan memerlukan upaya yang terfokus dan berkelanjutan untuk mempelajari kompetensi dan menerapkan berbagai ide, teknik, dan kemampuan dari setiap kompetensi. Hal ini berlaku baik bagi tempat pelatihan dimana pekerja belajar maupun bagi pekerja dan pelatih. Untuk menumbuhkan literasi bersama seputar kompetensi utama keberlanjutan yang terkait dengan praktik kompetensi, diperlukan program pengembangan pelatihan.

## Evolusi Industri Pelatihan Menuju Tempat Kerja di Era Globalisasi

Pengaruh terbesar terhadap pendidikan tinggi pada tahun 1990-an adalah pelatihan berbasis kompetensi. Tantangan untuk merancang model pendidikan yang memungkinkan peserta didik menghadapi situasi, tantangan, atau permasalahan yang memerlukan pengembangan ilmu pengetahuan secara efisien untuk mengembangkan kompetensi inti secara cekatan untuk menjaga daya saing dihadirkan oleh pengembangan kompetensi profesional di perguruan tinggi, baik transversal (lunak) dan disiplin (keras). Ide ini digunakan oleh institusi pendidikan tinggi sebagai respon terhadap pengetahuan mereka tentang apa yang bermanfaat untuk studi sarjana. Mereka mempelajari dan mengembangkan kompetensi lunak yang paling umum sehingga lulusannya dapat menerapkannya pada kinerja bisnis, efektivitas dalam tim yang beragam, dan keinginan untuk berinovasi di tempat kerja.

Pertumbuhan inovasi dan teknologi digital yang didorong oleh globalisasi saat ini semakin banyak menciptakan lapangan kerja baru sehingga meningkatkan kebutuhan akan sumber daya manusia yang berkualitas. Diukur dengan rasio ekspor ditambah impor terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), globalisasi di bidang perdagangan telah mengarahkan perdagangan dan investasi internasional ke arah perdagangan yang lebih terbuka. Hal ini berdampak pada keunggulan kompetitif berbagai negara, perubahan sistem perdagangan, pertumbuhan investasi asing langsung, dan faktor lainnya. Oleh karena itu, pada masa komersial modern diperlukan sumber daya manusia yang berkualitas.

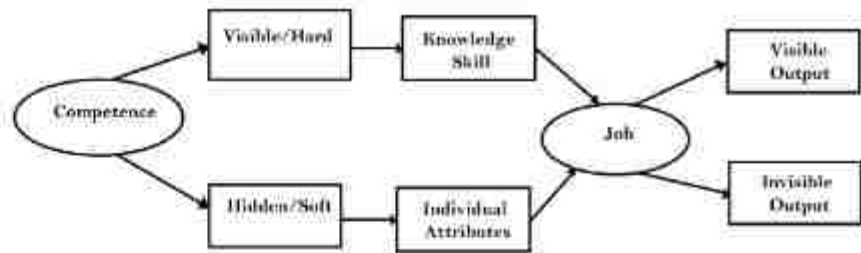
## Pengembangan Sumber Daya Manusia dalam Perdagangan Internasional

Proses peningkatan kemampuan, pengetahuan, keterampilan, dan produktivitas umum masyarakat atau dunia kerja disebut sebagai pengembangan sumber daya manusia. Hal ini mengakui bahwa manusia merupakan aset atau modal penting yang mendukung pertumbuhan sosial dan ekonomi. Gagasan pengembangan sumber daya manusia didasarkan pada pengetahuan bahwa pengeluaran uang untuk layanan kesehatan, pendidikan, dan bidang pertumbuhan pribadi dan profesional lainnya dapat meningkatkan kemajuan masyarakat, produktivitas, dan kreativitas. Jika ditilik dari pelatihan itu sendiri, maka dapat dikatakan bahwa pelatihan adalah suatu upaya untuk meningkatkan atau membangun kompetensi atau kemampuan baru bagi seorang pekerja pada jabatannya saat ini guna meningkatkan kinerja atau produktivitas. Pekerja mempelajari keterampilan tertentu melalui "pelatihan", namun kepribadian dan kemampuan manajemennya dikembangkan melalui "pengembangan". Dukungan pemerintah memegang peranan penting dalam pengembangan kompetensi kerja di suatu negara. Dukungan tersebut dapat dilakukan dalam bidang pendidikan dan pelatihan, yaitu dengan memberikan dana dan dukungan kepada lembaga pendidikan dan balai pelatihan vokasi untuk menawarkan program yang sesuai dengan kebutuhan industri saat ini. Setelah itu, para lulusan diberikan kesempatan magang dan pelatihan kerja untuk menjembatani kesenjangan antara pembelajaran di kelas dan keterampilan praktis. Agar semuanya dapat terkoneksi, pemerintah harus membuat kebijakan yang mendorong kolaborasi antara lembaga pendidikan, asosiasi industri, dan dunia usaha untuk memastikan kurikulum relevan dan mutakhir. Sehingga kedepannya dihasilkan standar pendidikan dan pelatihan berbasis kompetensi yang diakui dan dihormati baik oleh pengusaha maupun pekerja. Dengan menciptakan lingkungan yang mendukung, menyediakan sumber daya, dan menerapkan kebijakan yang efektif, pemerintah dapat membantu individu, dunia usaha, dan industri mengembangkan keterampilan dan kompetensi yang dibutuhkan untuk berkembang dalam angkatan kerja modern.

Sumber foto : freepik.com

## Kompetensi dalam Perdagangan Internasional

Berbagai kompetensi digunakan saat ini dalam berbagai konteks dan bidang. Gambar 1 menunjukkan bagaimana kompetensi individu dapat dipecah menjadi dua kategori: aspek yang terlihat/sulit, seperti pengetahuan, keterampilan, dan perilaku, yang cenderung merupakan karakteristik individu yang cukup jelas; dan aspek tersembunyi/lunak, seperti atribut fundamental individu seperti sifat, motif, sikap, nilai, dan citra diri, yang cenderung lebih mendalam dan signifikan terhadap kepribadian.



Gambar 1. Kerangka Definisi Kompetensi (Salman et al., 2020)

Berdasarkan domain dan keadaannya, kompetensi dapat dibagi menjadi beberapa kategori (Tabel 1). Meskipun kompetensi lunak adalah kemampuan luas atau transversal yang meningkatkan kelayakan kerja seseorang di pasar yang dinamis, berubah-ubah, dan tidak menentu, kompetensi keras adalah pengetahuan dan kemampuan teknis dan akademis yang diperlukan untuk melakukan pekerjaan tertentu.

Tabel 1. Kerangka klasifikasi kompetensi: hard kompetensi dan soft kompetensi

<p><b>Kompetensi Keras</b></p> <p>Kompetensi yang berhubungan dengan pengetahuan</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kompetensi kognitif</li> <li>2. Kompetensi Konseptual</li> </ol>	<p><b>Kompetensi Lunak</b></p> <p>Kompetensi yang berkaitan dengan perilaku</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kompetensi sosial/perilaku</li> <li>2. Kompetensi operasional</li> <li>3. Kompetensi emosional</li> <li>4. Kompetensi lintas budaya</li> <li>5. Kompetensi tim</li> <li>6. Kompetensi komunikatif</li> </ol>
<p>Keterampilan terkait kompetensi</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kompetensi fungsional</li> <li>2. Kompetensi kerja</li> <li>3. Kompetensi Kerja</li> </ol>	<p><b>Kompetensi Terkait Aktualisasi Diri</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Meta Kompetensi</li> <li>2. Kompetensi Etis</li> <li>3. Kompetensi Diri</li> <li>4. Perubahan Kompetensi</li> <li>5. Kompetensi Kepemimpinan</li> </ol>

Sumber: Salman et al., 2020

Dengan memiliki kedua kompetensi tersebut diharapkan akan dihasilkan kombinasi dinamis antara keterampilan kognitif dan metakognitif, serta keterampilan interpersonal, intelektual, dan praktis yang mendukung seseorang untuk dapat beradaptasi dan bertindak proaktif sehingga mampu menghadapi hambatan dalam kehidupan profesionalnya. Kolaborasi antara dunia usaha dan pemerintah dapat juga dilibatkan dalam menjembatani kedua kompetensi ini. Pelatihan yang diberikan kepada pegawai diharapkan dapat meningkatkan kemampuan untuk memprediksi tren di masa depan berkat hubungan antara dunia usaha dan pemerintah.

Jika kompetensi keras dan lunak dapat diarahkan untuk mencapai kesejahteraan dalam dunia perdagangan internasional yang rumit dan dinamis maka pegawai akan memperoleh kompetensi dalam perdagangan internasional. Kompetensi ini dapat digunakan untuk mempromosikan perdagangan internasional Indonesia karena kemampuan ini sangat penting bagi masyarakat, bisnis, dan organisasi yang terlibat dalam transaksi lintas batas, pasar dunia, dan rantai pasokan global.

### 1. Kompetensi Kognitif

- a Perundang-undangan dan kepatuhan perdagangan: Untuk memastikan kepatuhan hukum dan mengurangi risiko terkait perdagangan, penting untuk memahami undang-undang perdagangan internasional, prosedur bea cukai, tarif, dan dokumen ekspor-impor.
- b Logistik Global dan Manajemen Rantai Pasokan: Meningkatkan efektivitas rantai pasokan, logistik, moda transportasi, pergudangan, manajemen inventaris, dan pengelolaan pergerakan barang lintas batas adalah hal-hal yang penting.
- c Pengetahuan Hukum dan Kontrak: Untuk menyusun dan menafsirkan kontrak internasional dengan benar sesuai dengan hukum internasional, diperlukan pengetahuan tentang kerangka hukum, prosedur penyelesaian penyelesaian, hak kekayaan intelektual, dan standar penyusunan kontrak.
- d Analisis dan Teknologi Data: Sangat penting untuk menggunakan analisis dan teknologi data untuk melacak pengiriman, menilai tren pasar, mengelola inventaris, dan membuat keputusan bisnis yang bijaksana.

### 2. Kompetensi Fungsional

- a Melakukan penelitian dan analisis pasar: Pegawai harus mencoba memahami perilaku konsumen, tren pasar, dan lingkungan persaingan. Untuk melakukan hal ini, seseorang harus melakukan penelitian dan analisis pasar, mengidentifikasi target pasar, dan menyebarkan dinamika permintaan dan penawaran.
- b Pembiayaan Perdagangan dan Metode Pembayaran: Mengelola sisi keuangan transaksi luar negeri memerlukan pemahaman tentang metode pembayaran internasional, letter of credit, pertukaran mata uang, manajemen risiko, dan opsi pembiayaan.
- c Negosiasi dan Pembuatan Perjanjian: Untuk mendapatkan syarat-syarat yang menguntungkan dalam perjanjian internasional, diperlukan negosiasi yang terampil. Hal ini mencakup mengakui perbedaan budaya, mengembangkan hubungan yang baik, dan mengambil keputusan yang menguntungkan semua pihak.

### 3. Kompetensi Lintas Budaya

- a Komunikasi Lintas Budaya: Pengembangan hubungan, negosiasi kontrak, dan penyelesaian konflik semuanya bergantung pada komunikasi lintas budaya yang efektif. Kemampuan mengubah metode komunikasi dan menunjukkan kepekaan budaya merupakan kemampuan yang krusial.
- b Pemasaran dan Pencitraan Merek berskala Internasional: Mengembangkan citra merek di seluruh dunia, mengetahui preferensi lokal, dan mengadaptasi metode pemasaran ke berbagai budaya dan pasar sangat penting untuk keberhasilan dalam perdagangan internasional.
- c Kemahiran Bahasa: Menjadi multibahasa dapat membantu Anda berkomunikasi secara efektif dan menjalin hubungan dengan kolega, klien, dan pemangku kepentingan di seluruh dunia.
- d Kesadaran dan Sensitivitas Budaya: Membangun hubungan dan menghindari kesalahpahaman yang dapat menghambat kontak bisnis memerlukan pemahaman tentang norma, sikap, dan perilaku budaya.

### 4. Kompetensi Diri

- a Pemecahan Masalah: Permasalahan perdagangan internasional seringkali berbeda-beda. Untuk mengatasi tantangan yang tidak terduga dan menghasilkan solusi kreatif, seseorang perlu memiliki kemampuan pemecahan masalah yang kuat.
- b Kemampuan beradaptasi dan daya tahan: Dinamika perdagangan global tidak menentu. Kinerja jangka panjang bergantung pada kemampuan untuk menyesuaikan diri dengan perubahan kondisi, tren ekonomi, dan peristiwa geopolitik.
- c Penilaian dan manajemen risiko: Menjaga kelangsungan bisnis memerlukan pengenalan dan meminimalkan risiko yang terkait dengan ketidakpastian politik, fluktuasi mata uang, volatilitas pasar, dan perubahan peraturan.
- d Tanggung Jawab Etis dan Sosial: Penting untuk memahami dan menjunjung tinggi praktik bisnis berkelanjutan, standar tanggung jawab sosial perusahaan, dan praktik bisnis yang beretika.

## Kesimpulan

Pengembangan kompetensi sangat penting dalam lingkungan bisnis modern, karena hal ini mempersiapkan individu untuk angkatan kerja masa depan dan mencapai kesuksesan profesional. Pengembangan sumber daya manusia menitikberatkan pada pembinaan kompetensi profesional di berbagai bidang, baik kompetensi keras maupun kompetensi lunak. Kemampuan untuk berhasil terlibat dalam inisiatif perdagangan internasional, membangun kemitraan internasional yang dapat diandalkan, dan berfungsi di pasar global semuanya dipengaruhi oleh kompetensi ini. Kapasitas untuk melaksanakan tugas dalam suatu pekerjaan atau fungsi sesuai dengan standar yang diantisipasi dalam pekerjaan dapat ditingkatkan, dan kompetensi tersebut dapat dicapai melalui peningkatan kemampuan keras dan lunak. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk pekerjaan (kompetensi kognitif dan fungsional) merupakan komponen penting yang harus dimiliki. Kedua kompetensi ini termasuk dalam kompetensi kerja apabila digabungkan.

Kemahiran lintas budaya juga penting untuk keberhasilan dalam bisnis internasional. Kompetensi lintas budaya menggambarkan kemampuan individu untuk berhasil berinteraksi dengan orang lain dari berbagai latar belakang nasional dan budaya, baik di dalam maupun luar negeri, dengan menggunakan kombinasi unik antara pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan. Kemampuan beradaptasi terhadap perubahan, kesiapan belajar, kesiapan mengembangkan diri, kesiapan dan kemampuan mengambil inisiatif, penerimaan terhadap orang lain, keterbukaan pikiran, disiplin diri, harga diri, individualitas, dan penentuan nasib sendiri merupakan keterampilan-keterampilan yang menjadi dinamika dinamika internasional. permintaan perdagangan individu. Kolaborasi antara pemerintah dan dunia usaha dapat membantu pekerja mengembangkan keterampilan peramalan masa depan, sehingga memastikan angkatan kerja yang beragam dan terampil.



Sumber foto : freepik.com

## Referensi

1. Acikdilli, G., Mintu-Wimsatt, A., Kara, A., & Spillan, J. E. (2022). Export market orientation, marketing capabilities and export performance of SMEs in an emerging market: a resource-based approach. *Journal of Marketing Theory and Practice*, 30(4), 526–541.
2. Catanzaro, A., & Teyssier, C. (2021). Export promotion programs, export capabilities, and risk management practices of Internationalized SMEs. *Small Business Economics*, 57(3), 1479–1503.
3. Chung, J. E., Jin, B., Jeong, S. W., & Yang, H. (2019). NIE-based SME brand building in foreign markets: an exploratory study. *Journal of Product and Brand Management*, 28(1), 63–79.
4. Dornel, Amaud; Ait Ali Slimane, Meriem; Mohindra, K. (2020). Improving SME Access to Trade Credit and Financing in MENA. In *MENA Knowledge and Learning Quick Notes Series* (Vol. 180, Issue October).
5. Garcia-álvarez, J., Vázquez-Rodríguez, A., Quiroga-Carrillo, A., & Caamaño, D. P. (2022). Transversal Competencies for Employability in University Graduates: A Systematic Review from the Employers' Perspective. *Education Sciences*, 12(3).
6. Hauser, C. (2022). Trade-Control Compliance in SMEs: Do Decision-Makers and Supply Chain Position Make a Difference? *Journal of Business Ethics*, 179(2), 473–493.
7. Ipsmiller, E., Brouthers, K. D., & Dikova, D. (2021). Which export channels provide real options to SMEs? *Journal of World Business*, 56(6), 101245.
8. Morgan, H. M., Sul, S., & Malhotra, S. (2021). No place like home: The effect of exporting to the country of origin on the financial performance of Immigrant-owned SMEs. *Journal of International Business Studies*, 52(3), 504–524.
9. Oberle, C., & Ponterlitschek, L. (2019). Dos and Don'ts in Export Transactions: A Practitioner's Guide for SMEs? *Global Policy*, 10(3), 421–423.
10. Polas, M. R. H., Afshar Jahanshahi, A., Kabir, A. I., Sohel-Uz-Zaman, A. S. M., Osman, A. R., & Karim, R. (2022). Artificial Intelligence, Blockchain Technology, and Risk-Taking Behavior in the 4.0IR Metaverse Era: Evidence from Bangladesh-Based SMEs. *Journal of Open Innovation: Technology, Market, and Complexity*, 8(3).
11. Safari, A., & Saleh, A. S. (2020). Key determinants of SMEs' export performance: a resource-based view and contingency theory approach using potential mediators. *Journal of Business and Industrial Marketing*, 35(4), 635–654.
12. Safari, A., & Saleh, A. S. (2020). Key determinants of SMEs' export performance: a resource-based view and contingency theory approach using potential mediators. *Journal of Business and Industrial Marketing*, 35(4), 635–654.
13. Salman, M., Ganie, S. A., & Saleem, I. (2020). The concept of competence: a thematic review and discussion. *European Journal of Training and Development*, 44(6–7), 717–742.
14. Takele, T. B. (2019). The relevance of coordinated regional trade logistics for the implementation of regional free trade area of Africa. *Journal of Transport and Supply Chain Management*, 13, 1–11.
15. Vu, T. L., Nguyen, D. N., Luong, T. A., Nguyen, T. T. X., Nguyen, T. T. T., & Doan, T. D. U. (2022). The impact of supply chain financing on smes performance in global supply chain. *Uncertain Supply Chain Management*, 10(1), 255–270.



# Ibu Kota Nusantara, Harapan Baru Untuk Pengembangan Ekspor dari Perbatasan Kalimantan

Oleh: Helganita Deviyanti Sinaga  
Analisis Kebijakan Ahli Muda

Indonesia, sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, memiliki potensi ekonomi yang sangat besar. Salah satu aset utamanya adalah pulau Kalimantan, yang terletak di bagian timur Indonesia. Kalimantan memiliki beragam sumber daya alam yang melimpah, termasuk hutan tropis, tambang, dan sumber daya kelautan yang kaya. Namun, potensi ini belum sepenuhnya dimanfaatkan, terutama dalam konteks ekspor. Oleh karena itu, rencana pembangunan Ibu Kota Nusantara di Kalimantan menjadi sebuah peluang penting untuk mengembangkan ekspor dari daerah perbatasan Kalimantan.

Pada tahun 2019, pemerintah Indonesia mengumumkan rencana untuk memindahkan ibu kota negara dari Jakarta ke Kalimantan. Melalui Undang-undang nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara, pemerintah telah mengatur peralihan ibu kota negara ke Pulau Kalimantan yang disebut Ibu Kota Nusantara (IKN). Pemerintah juga telah mengatur perincian tentang rencana induk ibu kota negara melalui Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2022 dan mengamanatkan Ibu Kota Nusantara memiliki otorita tersendiri.

Ada beberapa hal yang menjadi alasan pemerintah ingin memindahkan ibu kota negara Indonesia ke Pulau Kalimantan, diantaranya:

- Beban kota Jakarta dan Pulau Jawa yang padat dan semakin berat, menurut survei penduduk antar sensus (SUPAS) tahun 2015 disebutkan bahwa sebanyak 56,56% penduduk Indonesia terpusat di Pulau Jawa atau sebanyak lebih dari 150 Juta Jiwa. Sedangkan di Pulau Kalimantan hanya memiliki 6,1% penduduk Indonesia atau sebanyak 16,23 Juta Jiwa. Pertumbuhan urbanisasi di Kota Jakarta sangat tinggi dengan konsentrasi penduduk di Jabodetabek. Ditambah ancaman bahaya banjir, gempa bumi dan tanah turun di Ibu Kota Jakarta.
- Pulau Jawa sangat berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia atau mendominasi PDB Indonesia, sementara pulau lainnya tertinggal. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) 2020, kontribusi ekonomi terhadap PDB di pulau Jawa sebesar 59%. Sementara pertumbuhan ekonomi di pulau Jawa sebesar 5,52%. Di Sumatera, kontribusi ekonominya sebesar 21,31%. Adapun di Kalimantan, kontribusi ekonominya sebesar 8,05% dengan pertumbuhan ekonomi 4,99%. Adapun di Sulawesi, kontribusinya 6,33% dengan pertumbuhan ekonomi 6,65%. Lalu di Bali dan Nusa Tenggara, kontribusinya 3,06% dengan pertumbuhan ekonomi sebesar 5,07%. Kemudian di Maluku dan Papua, berkontribusi sebesar 2,24% dengan pertumbuhan ekonomi sebesar 7,40%.

Ilman (2015) yang meneliti tentang alasan beberapa negara memindahkan ibu kota negaranya menyampaikan bahwa alasan utama untuk memindahkan ibu kota negara adalah alasan terkait tipologi. Tipologi berasal dari kata type yang berarti pengelompokan dan logos yang berarti ilmu. Tipologi juga dapat berarti hal-hal terkait kontur tanah. Jadi, tipologi adalah ilmu yang mempelajari tentang pengelompokan sesuatu berdasarkan jenis atau kategorinya seperti tipologi antropologi, arkeologi, linguistik, dan arsitektur, serta terkait dengan kontur tanah suatu daerah. Dalam hal pemindahan ibukota ke Ibu Kota Nusantara, diharapkan adanya pengembangan dalam tipologi arsitektur yang akan mentransformasi masyarakat yang berkelanjutan terhadap lingkungan yang lebih ramah lingkungan, misalnya dengan pengembangan kendaraan bebas polusi serta penggunaan barang atau produk hemat energi. Sehingga artinya adalah pemindahan ibu kota biasanya untuk membentuk karakter baru sebuah peradaban di daerah yang baru. Jika dikaitkan dengan IKN saat ini yang diharapkan dapat membentuk suatu peradaban manusia. Keputusan pemindahan ibu kota ini bukan hanya untuk mengurangi beban Jakarta yang semakin padat, tetapi juga untuk membawa pembangunan lebih merata ke seluruh wilayah Indonesia. Rencana ini akan menciptakan sebuah kota modern dan berkelanjutan di Kalimantan, yang akan menjadi pusat pemerintahan, bisnis, dan perdagangan.

## Perlunya Pembangunan Infrastruktur untuk Cross Border Trade

Ibu Kota Nusantara akan terletak di Kabupaten Paser Penajam, Kalimantan Timur. Seperti diketahui bersama, Sisi utara Pulau Kalimantan berbatasan langsung dengan Malaysia, dan di utara juga terdapat negara Brunei Darussalam. Kalau kita melihat secara demografi, jumlah penduduk Indonesia lebih banyak dari Malaysia maupun Brunei Darussalam. Oleh karena itu, sebetulnya kita dapat mengambil keuntungan secara ekonomi dari sisi demografi maupun dari letak IKN di Pulau Kalimantan yang memiliki banyak sumber daya alam.

Jally (2022) dalam jurnalnya yang berjudul *Cross Border Cooperation: a global overview* menyatakan bahwa ketika perdagangan mendominasi, maka akan timbul ketergantungan ekonomi dan hubungan lintas batas. Selain itu, ketika politik dan institusi memediasi hubungan lintas batas, maka akan menyebabkan peningkatan pertumbuhan ekonomi di daerah sekitarnya. Pembangunan IKN tentu akan meningkatkan pembangunan infrastruktur di daerah tersebut, sehingga diharapkan dengan adanya kerjasama cross border akan dapat meningkatkan hubungan perdagangan yang akhirnya dapat meningkatkan hubungan ekonomi. Sebagai contoh, program pengembangan Sungai Tumen, awalnya merupakan inisiatif United Nation Development Program (UNDP, 1993; Tsuji, 2004) menghubungkan Tiongkok, Korea Utara dan Rusia dengan Korea Selatan dan Jepang, menjadi infrastruktur besar di jalur perdagangan yang menghubungkan sumber daya ekstraktif yang kaya dengan pasar internasional.

Keberadaan IKN di Pulau Kalimantan diprediksi akan dapat meningkatkan perdagangan lintas batas, yang dapat dimanfaatkan oleh Indonesia untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat Kalimantan pada khususnya dan Indonesia pada umumnya. Beberapa titik perbatasan darat dan laut di Pulau Kalimantan seperti Entikong, Aruk, Jagoi Babang di Kalimantan Barat, dan Sungai Sebatik dan Sungai Nunukan di Kalimantan Utara, serta perbatasan laut di Pulau Tarakan, juga dapat dimanfaatkan untuk pengembangan ekspor maupun perdagangan lintas batas melalui perbatasan. Diharapkan di waktu kedepan, dengan perpindahan ibukota Indonesia ke IKN di Kalimantan, maka pemerintah akan menambah membangun infrastruktur perbatasan khususnya yang memiliki perbatasan sungai atau laut dari Kalimantan ke Malaysia.

Khususnya untuk Kalimantan Utara, masalah pelayanan transportasi merupakan isu yang mesti mendapatkan banyak perhatian. Kondisi faktual dari perbatasan darat di Malinau masih didominasi dengan kondisi jalan yang buruk. Kondisi ini tentunya mengganggu konektivitas dan aktivitas ekonomi di kawasan perbatasan. Selain itu minimnya akses terhadap sarana dan prasarana kesehatan, pendidikan dan lainnya sangat memerlukan perhatian kelak bagi pemerintah ketika melakukan pembangunan di Kalimantan Utara. Karena bila pembangunan infrastruktur Kaltara berjalan baik maka akan mendukung konektivitas perdagangan.

## Kinerja Perdagangan Melalui Perbatasan

Perdagangan melalui perbatasan antara Indonesia dan Malaysia saat ini menunjukkan surplus nilai ekspor non migas sebesar USD 13,574 Juta. Namun Indonesia masih memiliki peluang untuk dapat meningkatkan eksportnya khususnya ekspor dari perbatasan Kalimantan.

Ekspor produk dari Kalimantan ke Malaysia menunjukkan peluang yang cukup menggembirakan. Dari data laporan di salah satu perbatasan Kalimantan, nilai ekspor produk hortikultura ke Malaysia bernilai hampir Rp. 2 Milyar per bulan. Nilai tersebut belum termasuk produk lainnya seperti komoditas pangan, perkebunan dan komoditas perikanan yang kurang lebih memiliki nilai ekspor yang hampir sama (sumber: paparan BNPP).

## Pengembangan Ekspor Melalui Kawasan Perbatasan

Kalimantan merupakan pulau yang memiliki perbatasan darat dengan Indonesia. Hal ini sejalan dengan keputusan pemerintah untuk melakukan pembangunan di perbatasan melalui INPRES nomor 6 tahun 2015 mengenai percepatan pembangunan 7 (tujuh) Pos Lintas Batas Terpadu dan Sarana Prasarana Penunjang di Perbatasan yaitu di Entikong (Kalimantan Barat), Skouw (Papua), Aruk (Kalimantan Barat), Motaain (Nusa Tenggara Timur), Naga Badau (Kalimantan Barat), Motamasin (Nusa Tenggara Timur), dan Wini (Nusa Tenggara Timur). Selain itu diperkuat dengan rencana pemindahan Ibu Kota ke IKN maka Ditjen Pengembangan Ekspor Nasional berupaya untuk meningkatkan ekspor melalui perbatasan.



Sebelum implementasi IKN di Kalimantan tersebut, Ditjen PEN sudah melakukan penjajakan untuk mendirikan pusat promosi ekspor di perbatasan Indonesia yang kemudian disebut Marketing Point. Marketing Point tersebut dapat berfungsi sebagai kepanjangan tangan untuk pengembangan ekspor Indonesia melalui perbatasan ke negara tetangga, maupun sebagai hub perdagangan ke negara sekitarnya. Pada tahap awal, telah dilakukan penjajakan Marketing Point di Pulau Tarakan Kalimantan Timur, Nunukan Kalimantan Timur, Entikong Kalimantan Barat, Aruk Kalimantan Barat, Skouw Papua, Motaain dan Motamasin di Nusa Tenggara Timur.



Gambar 1. Foto Jalan di daerah Perbatasan Kalimantan dan Malaysia



Gambar 2. Foto Kantor Marketing Point di Perbatasan Entikong, Kalbar



# 1

## Meningkatkan pemberdayaan ekonomi wilayah perbatasan

Pemindahan ibu kota ke Kalimantan membawa peluang besar bagi pemberdayaan ekonomi daerah perbatasan. Pemerintah diharapkan dapat lebih meningkatkan investasi infrastruktur dan pelatihan SDM. Sehingga potensi ekonomi lokal dapat dioptimalkan untuk produksi barang dan jasa yang dapat diekspor.

# 2

## Perbaikan Aksesibilitas

Perbatasan berpeluang besar untuk menambah akses Cross Border Trade, oleh karena itu infrastruktur transportasi yang lebih baik dibutuhkan untuk meningkatkan aksesibilitas wilayah perbatasan. Ini akan mempermudah pergerakan barang dari dan ke wilayah perbatasan, meningkatkan efisiensi logistik ekspor.

# 3

## Penguatan Kemitraan Regional

Kalimantan berbatasan langsung dengan beberapa negara tetangga seperti Malaysia dan Brunei. Ini memberikan peluang besar untuk memperkuat kemitraan regional dan meningkatkan perdagangan lintas batas.

# 4

## Ekspor Produk Pertanian

Wilayah Kalimantan memiliki tanah subur dan iklim tropis yang cocok untuk pertanian. Ekspor produk pertanian seperti karet, kelapa sawit, dan produk hutan dapat menjadi motor penggerak ekspor yang signifikan.

# 5

## Pengembangan Produk Kreatif dan Kerajinan Tangan

Kreativitas budaya Indonesia yang kaya dapat diwujudkan dalam produk-produk kerajinan tangan yang unik. Ekspor kerajinan tangan seperti tenun, ukiran, dan barang seni dapat menghasilkan pendapatan yang signifikan.

# 6

## Peluang Ekowisata

Kalimantan memiliki keindahan alam yang luar biasa, termasuk hutan hujan tropis yang kaya akan flora dan fauna. Ekowisata yang berkelanjutan dapat menjadi sumber pendapatan tambahan melalui kunjungan wisatawan asing.

# 7

## Pemberdayaan Masyarakat Lokal

Dalam pengembangan ekspor, penting untuk melibatkan dan memberdayakan masyarakat lokal. Pelatihan dan pendidikan tentang praktik bisnis internasional dapat memberikan mereka keunggulan kompetitif.

# 8

## Pelestarian Lingkungan

Dalam semua upaya pengembangan ekspor, pelestarian lingkungan harus menjadi perhatian utama. Praktik pertanian berkelanjutan dan pengelolaan sumber daya alam yang bijaksana penting untuk menjaga ekosistem Kalimantan yang unik.

## Kesimpulan

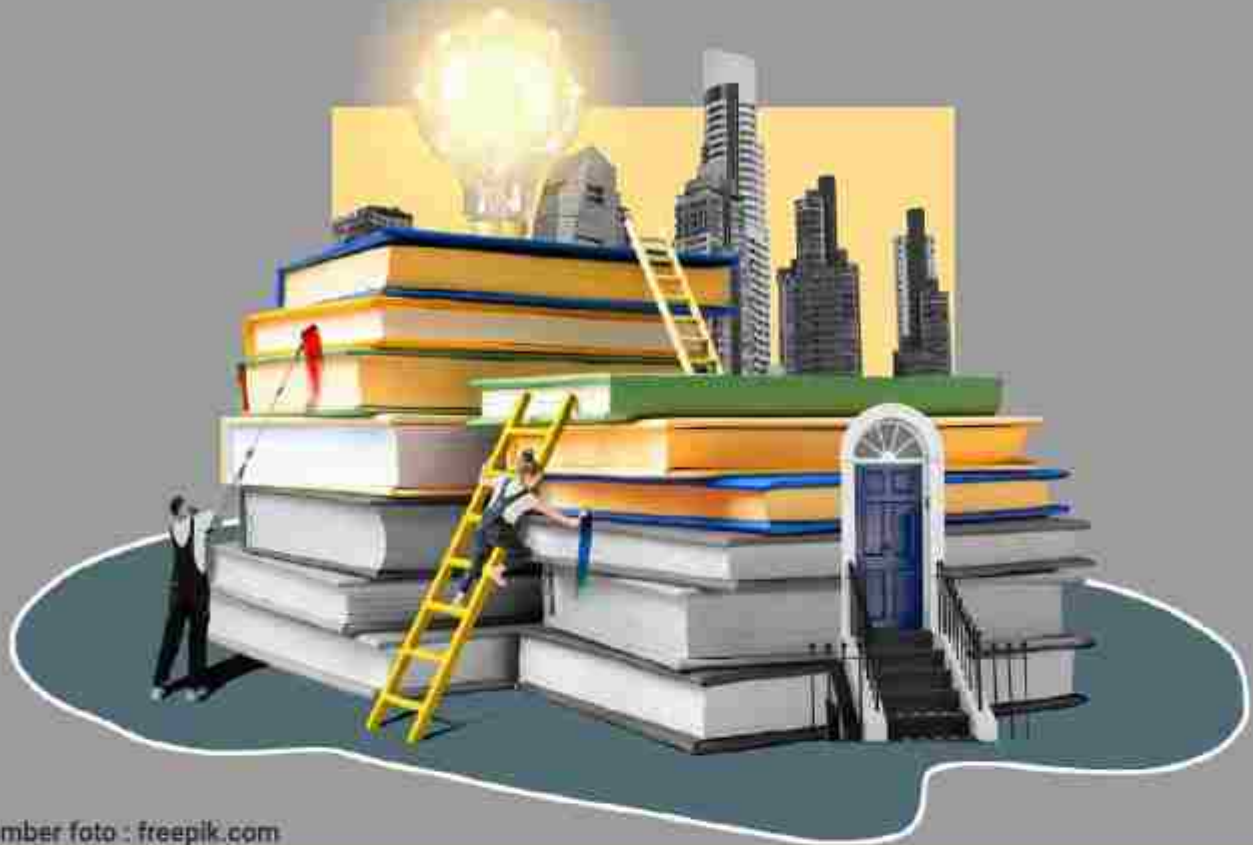
Pembangunan Ibu Kota Nusantara di Kalimantan membuka peluang besar untuk mengembangkan ekspor dari perbatasan Kalimantan. Dengan infrastruktur yang ditingkatkan, pengelolaan sumber daya yang bijaksana, dan fokus pada pelatihan tenaga kerja lokal, Kalimantan dapat menjadi pusat ekspor yang signifikan dalam skala regional dan Internasional. Dengan kerjasama yang baik, Indonesia dapat mewujudkan potensi ekonomi yang besar di wilayah perbatasan ini, sambil memastikan pelestarian lingkungan yang berkelanjutan.

## Referensi

1. Jally, I B. (2022). Cross Border Cooperation: a global review. Canada: Alternatives, Global Local Political.
2. Illman, E. (2015). Reason for relocating capital cities and their implications. Prague: Charles University, Faculty of Social Sciences, Institute of Political Studies, Department of Political Science.
3. Tsuji, H. (2004). The Tumen River area development programme. ERINA Discussion Paper N.0404e: Economic Research Institute for Northeast Asia.



Sumber foto : freepik.com



Sumber foto : freepik.com

## URGENSI PENGEMBANGAN SEKOLAH PERDAGANGAN DALAM RANGKA PERPINDAHAN IBU KOTA NEGARA

Andri Akbar Awaluddin,  
Analis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Muda,  
Sekretariat Ditjen Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga.

**D**alam rencana induk Ibu Kota Negara yang ditetapkan melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara, disebutkan bahwa prinsip penyelenggaraan pusat pemerintahan dilakukan melalui penerapan smart governance yang diwujudkan melalui tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien yang berbasis pemanfaatan teknologi informasi untuk mewujudkan visi "Kota Dunia untuk Semua". Prinsip tersebut kemudian dijabarkan dalam kebijakan pemindahan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang dilaksanakan berdasarkan hasil asesmen dengan mempertimbangkan koridor sebagai berikut:

- Tingkat pendidikan minimal Diploma 3 (D-3);
- memperhatikan batas usia pensiun;
- mempertimbangkan 20% pegawai merepresentasikan kinerja 80% pegawai; dan
- data penilaian potensi dan kompetensi.

Kebijakan tersebut dapat diartikan bahwa pemindahan ASN ke Ibu Kota Negara Nusantara dilakukan dengan skala prioritas bukan memindahkan seluruh pegawai di setiap Instansi Pemerintah. Dampaknya akan diperlukan suatu proses redistribusi pegawai untuk dapat melaksanakan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah dengan memanfaatkan ASN yang tersedia. Redistribusi pegawai tersebut perlu didukung dengan penguasaan kompetensi lintas bidang sehingga dapat mendukung mobilitas pegawai antar unit kerja.

Penguasaan kompetensi lintas bidang sepertinya masih menjadi kendala besar bagi para ASN Kementerian Perdagangan termasuk para pemangku Jabatan Fungsional di Bidang Perdagangan. Saat ini pegawai Kementerian Perdagangan memiliki kompetensi yang terbagi-bagi dalam banyak jabatan fungsional yang tidak mudah untuk dipindahkan dari satu posisi ke posisi lainnya.

Selain itu, dalam satu jabatan fungsional saja sering kali terjadi dikotomi antara kompetensi di bidang perdagangan dalam negeri dan perdagangan luar negeri yang saling tidak memahami satu dengan lainnya hingga adanya keterbatasan kompetensi hanya pada tugas dan fungsi dari unit Eselon I dimana pegawai tersebut ditempatkan.

Hal ini dapat disebabkan oleh tiga hal yakni belum tersedianya pendidikan formal yang spesifik terkait dengan pengelolaan sektor perdagangan, pola pengembangan kompetensi yang belum menunjang penguasaan substansi bidang perdagangan secara holistik, serta rendahnya tingkat rotasi pegawai antar unit kerja di Kementerian Perdagangan. Saat ini, masih sangat banyak pegawai yang menjalani karirnya hanya pada satu unit kerja sejak mulai pengangkatan hingga pensiun, dimana rotasi antar unit kerja justru banyak terjadi pada tingkat pimpinan tinggi bukan pada tingkat pelaksana.

Dari sisi pengembangan kompetensi, sistem manajemen talenta ASN sudah memperkenalkan proses akselerasi karir melalui sekolah kader. Namun sekolah kader kemudian diwujudkan melalui pelatihan dasar dan kepemimpinan yang berfokus pada peningkatan kompetensi manajerial dan sosial kultural pegawai dibandingkan kemampuan substansi urusan pemerintahan yang menjadi tanggung jawabnya. Program pengembangan kompetensi bidang yang diselenggarakan oleh Kementerian Perdagangan juga belum mampu menyediakan proses pembelajaran yang holistik dan tersistematis, dimana pelatihan teknis yang dilakukan lebih mengarah kepada kemampuan operasionalisasi tugas jabatan dari masing-masing jabatan fungsional bidang perdagangan.

Untuk itu, Kementerian Perdagangan perlu mengembangkan program pelatihan yang bersifat holistik dan tersistematis sebagaimana program Management Trainee (MT) yang banyak dilaksanakan oleh perusahaan-perusahaan dalam bentuk sekolah perdagangan. Konsep sekolah perdagangan saat ini sedang dikembangkan melalui Rancangan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Pengembangan Karir Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Perdagangan melalui Sekolah Perdagangan.

Artikel ini ditulis sebagai masukan terkait konsep implementasi sekolah perdagangan yang mampu menghasilkan ASN dengan kompetensi bidang Perdagangan yang bersifat holistik dan sistematis tidak terkotak-kotak berdasarkan jabatan fungsional maupun rumpun tugas unit kerjanya.

## Skema dan Jenjang Pelatihan

Sebagai bagian dari upaya akselerasi karir, maka sekolah perdagangan perlu disusun dalam beberapa jenjang yang bertujuan untuk mempersiapkan ASN memenuhi kompetensi jabatan yang akan diduduki. Untuk itu, peserta pelatihan ditujukan kepada pegawai yang menduduki jabatan satu jenjang di bawah jabatan yang dituju. Sebagai sarana pembentukan kader, sekolah perdagangan ditujukan untuk menyilapkan pemimpin-pemimpin di bidang perdagangan, sehingga selayaknya ditujukan kepada pegawai yang belum menduduki jabatan pimpinan tinggi.

Sekolah perdagangan direkomendasikan untuk dibentuk dalam 3 jenjang yakni dasar, menengah, dan lanjut. Dalam pelaksanaannya, sekolah perdagangan dapat disandingkan dengan sekolah kader dimana sekolah perdagangan tingkat dasar dilaksanakan bersama pelatihan dasar CPNS dengan target peserta berasal dari pelaksana, fungsional ahli pertama, dan fungsional terampil/mahir. Tingkat menengah bersama pelatihan kepemimpinan pengawas (PIM IV) dengan target peserta berasal dari pejabat pengawas, fungsional ahli muda, dan fungsional penyelia. Serta tingkat lanjut bersama pelatihan kepemimpinan administrator (PIM III) dengan target peserta berasal dari pejabat administrator dan fungsional ahli madya.



Gambar 1. Rekomendasi Skema dan Jenjang Sekolah

## Kompetensi yang Diharapkan

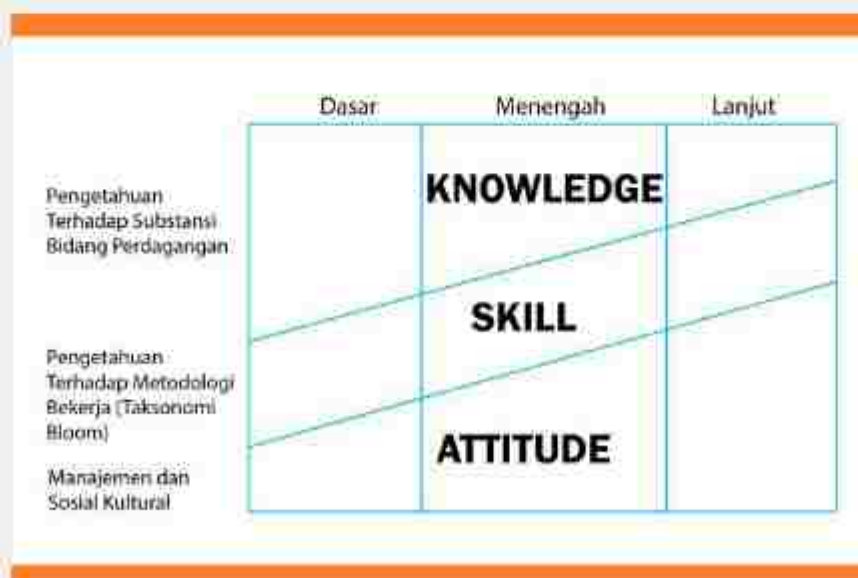
Sebagai bagian dari upaya pengembangan kompetensi, sekolah perdagangan perlu dirancang untuk secara khusus membentuk kompetensi pegawai. Benjamin Bloom mengembangkan suatu teori dimana kompetensi yang dihasilkan dari proses pelatihan terdiri dari tiga komponen yakni Knowledge (Cognitive), Skills (Psychomotor), Attitude (Affective).

Knowledge (pengetahuan) adalah sebuah pemahaman teoritis maupun praktikal terhadap subyek tertentu. Berisikan kumpulan informasi dalam bentuk fakta, prosedur atau cara melakukan sesuatu. Dalam konteks sekolah perdagangan, maka knowledge dapat diwujudkan melalui penguasaan terhadap teori, informasi-informasi, dan kebijakan yang terkait dengan pengelolaan sektor perdagangan.

Skills (keterampilan) adalah kecakapan atau keahlian untuk menggunakan pengetahuan yang dimiliki untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Skills berkaitan dengan kemampuan akal, pikiran, ide dan kreativitas dalam melakukan pekerjaan. Dalam konteks sekolah perdagangan, maka skills dapat diwujudkan melalui penguasaan terhadap metodologi bekerja sebagaimana yang disusun dalam taksonomi Bloom.

Attitude (sikap) adalah cara berpikir atau apa yang dirasakan terhadap suatu hal yang direfleksikan dalam bentuk perilaku. Attitude berkaitan dengan kemauan kerja keras, simpati dan empati pada teman dan bawahan, kemampuan beradaptasi, serta pribadi yang solutif. Dalam konteks sekolah perdagangan, maka attitude dapat diwujudkan melalui penguasaan kemampuan manajerial dan sosial kultural yang ditetapkan bagi setiap ASN dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2017 Tentang Standar Kompetensi Jabatan Aparatur Sipil Negara.

Secara ideal, kader yang dihasilkan oleh sekolah perdagangan harus memiliki ketiga komponen kompetensi tersebut. Adapun penjurangan dari setiap level sekolah perdagangan dilakukan dengan mempertimbangkan level kompetensi ASN yang diadaptasi dari pendekatan taksonomi Bloom yakni tingkat dasar untuk level 1 berupa remembering & understanding dan level 2 berupa applying, tingkat menengah untuk level 3 berupa analyzing dan level 4 untuk evaluating, serta tingkat lanjut untuk level 5 berupa creating. Selanjutnya penentuan komposisi dan bauran kompetensi dari setiap jenjang juga perlu mempertimbangkan tipologi manajerial skills yang dikembangkan oleh Robert L. Katz dimana terdapat perbedaan komposisi penguasaan dari setiap level manajemen.



Gambar 2. Rekomendasi Bauran Kompetensi Setiap Jenjang Sekolah



	Dasar	Menengah	Lanjut
<b>Knowledge</b>	Teori Kebijakan Perdagangan	Proses Bisnis Bidang Perdagangan	Bencana Strategy Bidang Perdagangan
<b>Skill</b>	Pengumpulan dan Pengolahan Data	Analisa dan Evaluasi	Kepemimpinan
<b>Attitude</b>	Integritas, Pelayanan Publik	Kerjasama, Komunikasi, Orientasi pada Hasil	Pengambilan Keputusan, Mengelola Perubahan, Pengembangan diri dan orang lain, Perekat Bangsa
<b>Level Kompetensi</b>	<b>Understanding &amp; Applying</b>	<b>Analyzing &amp; Evaluating</b>	<b>Creating</b>

Gambar 3. Rekomendasi Fokus Kompetensi Setiap Jenjang Sekolah

Dari fokus kompetensi yang sudah disusun tersebut, selanjutnya dapat direkomendasikan skema kurikulum pelatihan sekolah perdagangan untuk masing-masing jenjang sebagai berikut:

	Dasar	Menengah	Lanjut
<b>Knowledge</b>	Pengantar Perdagangan (Definisi, Teori, Aktifitas)	Standarisasi Bidang Perdagangan	Sasaran dan Indikator Kinerja Bidang Perdagangan
	Konsep GDP dan Neraca Perdagangan	Perizinan Sektor Perdagangan	Kelembagaan dan SDM Sektor Perdagangan
	Pelaku Usaha Sektor Perdagangan	Pembinaan Sektor Perdagangan (Pengembangan Produk, Pemasaran, dan Infrastruktur)	Kerangka Regulasi Bidang Perdagangan
	Perlaku dan Perlindungan Konsumen	Perundingan Perdagangan	Arsitektur SPBE dan Sistem Informasi Perdagangan
	Rantai Pasok dan Logistik	Derivatif dan Bursa Komoditi	Pelayanan dan Informasi Publik Bidang Perdagangan
	Pengetahuan Produk (HS System)	Pengamanan Perdagangan	Penyelesaian Sengketa Bidang Perdagangan
	Perdagangan Komoditi (PBK, Pasar Lelang, dan SRG)	Pengawasan dan Penegakan Hukum Bidang Perdagangan	
	Organisasi Perdagangan Dunia	Neraca Komoditas	
<b>Skill</b>	Ekspor Impor dan Kepabebean		
	Teknik Pengumpulan Data	Teknik Analisa dan Kuantitatif	Manajemen Strategis
	Metodologi Perancangan Basis Data (Database)	Teknik Analisa Data Kuantitatif	Manajemen Kinerja
	Penyusunan Laporan	Teknik Evaluasi	Manajemen Risiko
<b>Attitude</b>		Manajemen Proyek	Komunikasi Publik
		Penyusunan Makalah Kebijakan (Policy Paper)	
	Budaya Kerja BerAKHLAK	Team Building	Pengambilan Keputusan
	Anti Korupsi	Public Speaking	Manajemen Perubahan
	Pelayanan Prima	Manajemen Konflik	
		Coaching dan Mentoring	

Gambar 4. Rekomendasi Rancangan Kurikulum Sekolah Perdagangan

## Kompetensi yang Diharapkan

Implementasi sekolah perdagangan dapat dilaksanakan dengan beberapa alternatif. Alternatif pertama penyelenggaraan dilakukan secara konvensional melalui pembelajaran yang dilakukan secara eksklusif dalam satu waktu melalui metode pembelajaran di dalam kelas baik secara tatap muka maupun virtual. Skema ini memiliki kelebihan dari sisi tingkat kefokusannya peserta dalam menerima materi pembelajaran secara utuh, namun disatu sisi skema tersebut akan membuat para peserta harus meninggalkan pekerjaan di unit kerja dalam waktu yang relatif panjang.

Alternatif kedua, penyelenggaraan sekolah perdagangan dapat dilakukan melalui kumpulan pelatihan-pelatihan yang harus diselesaikan sebelum pegawai tersebut mengajukan kenaikan jenjang jabatan. Dimana setelah pegawai tersebut mengambil seluruh pelatihan-pelatihan yang menjadi kurikulum dari jenjang sekolah perdagangan, dilaksanakan proses uji kompetensi untuk menilai penguasaan kompetensi secara menyeluruh dan menentukan kelulusan dari setiap peserta. Pola pembelajaran juga dapat disusun dalam bentuk kombinasi antara pelatihan di dalam kelas maupun melalui video-video pembelajaran. Skema ini akan memberikan fleksibilitas waktu bagi peserta sehingga tidak perlu meninggalkan pekerjaan dalam waktu yang lama, namun kurang memberikan fokus bagi peserta sehingga berpotensi dapat tidak terselesaikannya seluruh kurikulum.

Pada kedua alternatif tersebut, kurikulum yang merupakan bagian dari komponen kompetensi attitude juga dapat disubstitusi dengan pelatihan dasar dan pelatihan kepemimpinan yang merupakan bagian dari sekolah kader. Untuk menghemat waktu pelaksanaan pelatihan, sekolah perdagangan dapat berfokus pada pengembangan kompetensi knowledge dan skills. Namun, pelaksanaan substitusi perlu mempertimbangkan perkembangan komposisi pegawai Kementerian Perdagangan ke depan. Apabila jumlah Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) akan semakin besar, maka akan sulit untuk dilakukan substitusi karena belum adanya mekanisme sekolah kader bagi para PPPK sehingga sekolah perdagangan perlu diselenggarakan secara utuh.

Selain itu, penentuan skema implementasi juga perlu mempertimbangkan bagaimana posisi sekolah perdagangan dalam rangka pemenuhan syarat pengisian jabatan yang akan diterapkan dalam manajemen talenta Kementerian Perdagangan. Apabila kelulusan sekolah perdagangan dijadikan persyaratan wajib dalam pengisian jabatan maka alternatif pertama perlu dipertimbangkan lebih prioritas. Sementara apabila kelulusan sekolah perdagangan diperlakukan sebagai keunggulan tambahan melalui pemberian prioritas pengisian jabatan, maka alternatif kedua dapat lebih dipertimbangkan karena akan membangun semangat pembelajaran mandiri dari pegawai.

Terlepas dari alternatif skema implementasi yang dapat dipilih, sekolah perdagangan perlu segera diwujudkan untuk dapat mewujudkan ASN Kementerian Perdagangan yang profesional dengan kompeten yang utuh sehingga dapat dimobilisasi secara fleksibel dalam mengantisipasi sistem kerja baru yang akan dilaksanakan di Ibu Kota Negara Nusantara nanti.

## Referensi

- Bloom, Benjamin S., etc. (1956). *Taxonomy of Educational Objectives : The Classification of Educational Goals, Handbook I Cognitive Domain*. New York : Longmans, Green and Co.
- Katz, Robert L. (1974). *Skills of an effective administrator*. Harvard Business Review, Vol. 52 No. 5.
- Rahardjo, Daniel Adi Setya. (2022). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Yayasan Prima Agus Teknik : Semarang.
- Taufiq, M., & Syafiq, M. (2017). *Penguatan Pelatihan Kepemimpinan Melalui Sekolah Kader*. Jurnal Analisis Kebijakan, Vol.1 No.1.

# Kesiapan Pejabat Fungsional Bidang Perdagangan dalam Menyongsong Ibu Kota Nusantara (IKN): Sebuah Pandangan Opini

Penny Chariti Lumbanraja

Penera Ahli, Dinas Koperasi, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Asahan

## WP 1 KIPP – IKN:

### Rencana Pentahapan Pembangunan 2022-2045

#### Sub-WP 1A : Pemerintahan Inti

Itana, Kementerian/Lembaga, Hunian ASN/ TNI/Polri, Uman, dan Diponati

#### Sub-WP 1B : Pemerintahan Regional

Universitas Berstandar Internasional, Hunian ASN, Uman, dan Pusat Olahraga

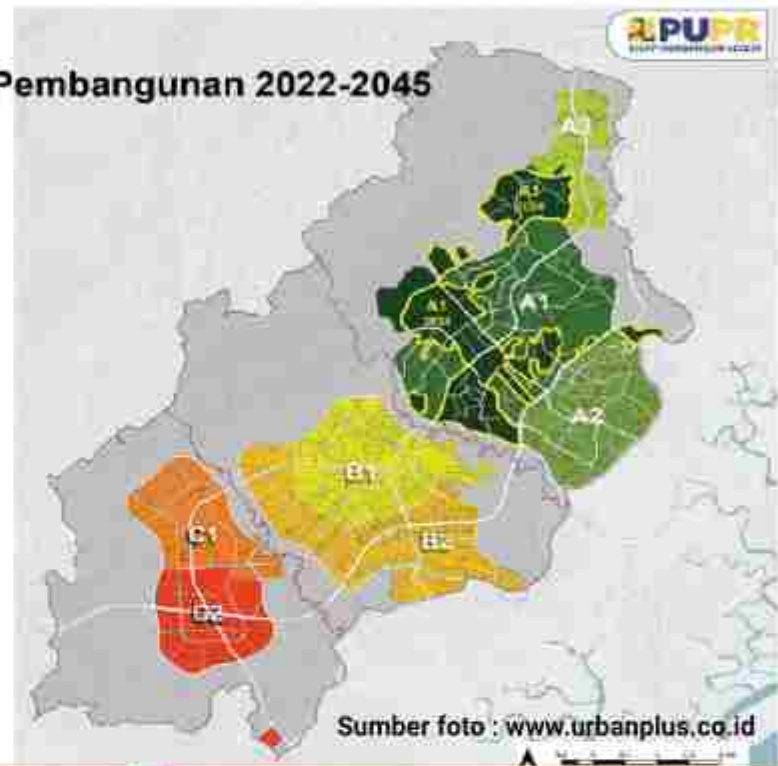
#### Sub-WP 1C : Pemerintahan Komunitas

Rumah Saku Internasional, Hunian ASN, Uman

Sub-BWP	Luas Area (ha)	Luas Area Terbangun (ha)	%
Pemerintahan Inti	2.876	321	22%
Pemerintahan Regional	1.001	492	29%
Pemerintahan Komunitas	1.723	131	20%
Jumlah	5.600	944	17%

#### KETERANGAN

- Tahap A1 -2024
- Tahap A1
- Tahap A1
- Tahap A3
- Tahap B1
- Tahap B1
- Tahap C1
- Tahap C2



Indonesia telah menjalani perubahan besar dengan pengumuman pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN), yang menandai relokasi pusat pemerintahan dari Jakarta ke wilayah Kalimantan Timur. Transisi ini tentunya memerlukan kesiapan dan penyesuaian dari berbagai pihak, termasuk pejabat fungsional bidang perdagangan yang memiliki peran dalam menjaga stabilitas ekonomi dan perdagangan negara.

Pemindahan Ibu kota negara ke IKN tak sekedar memindahkan aparatur sipil negara beserta bangunan-bangunan pemerintahan. Pemindahan Ibu kota menjadi momentum krusial untuk memastikan bahwa para pejabat terkhusus bidang perdagangan memiliki pemahaman mendalam tentang implikasi transisi ini terhadap perekonomian nasional. Peran penting kedepannya ialah bagaimana bangsa Indonesia ini dapat mengalami transformasi menuju Indonesia maju yang diperankan oleh berbagai pihak khususnya pemerintahan bidang perdagangan.

Salah satu aspek yang harus diperhatikan adalah kelanjutan dan perkembangan perdagangan, serta peran IKN dalam memastikan Indonesia sebagai pusat bisnis dan perdagangan yang lebih berkelanjutan. Kesiapan para pejabat fungsional bidang perdagangan tidak hanya mencakup pemahaman akan perubahan infrastruktur dan regulasi di IKN, tetapi juga kemampuan untuk mempromosikan perdagangan internasional yang lebih luas dan inklusif. Mereka harus mampu menjalin hubungan yang kuat dengan mitra dagang serta menjelajahi peluang perdagangan baru di kawasan yang akan menjadi tuan rumah IKN.

Selain itu, penting juga bagi pejabat fungsional bidang perdagangan untuk memahami dampak sosial dan lingkungan dari transisi ini. Pemindahan Ibu Kota berdampak pada perubahan ekologi dan struktur sosial di wilayah Kaltim, yang juga berpotensi memengaruhi pola perdagangan dan investasi. Oleh karena itu, perlu adanya inisiatif yang berkelanjutan dalam memitigasi dampak negatif dan memaksimalkan dampak sosial bagi masyarakat setempat.

## Peluang Kinerja Perdagangan di IKN

Struktur perekonomian di Kaltim didominasi dengan industri pertambangan. Naik turunnya kondisi perekonomian di sana bergantung dari kondisi sektor pertambangannya. Seperti pada triwulan II-2020, terjadi defisit perekonomian di Kaltim hingga minus 5,46 persen secara tahunan karena penurunan harga batubara dan melambatnya permintaan ekspor batubara. Setelah itu, pada triwulan III-2022, kembali terjadi perbaikan pertumbuhan ekonomi hingga 5,28 persen secara tahunan karena harga batubara mulai membaik dan aktivitas ekspor kembali meningkat.

Sektor batubara menjadi primadona dan menguasai kinerja ekonomi di Kaltim tetapi tidak pada sektor riil lain yang nilai pertumbuhannya tidak sampai menyentuh angka 1 persen. Namun sayangnya, industri pertambangan tidak cukup banyak menyerap tenaga kerja yang dibutuhkan dalam aktivitas penggalian, meskipun sektor ini sangat cepat mendatangkan uang. Itu terjadi disebabkan sebagian besar batubara yang diekspor langsung ke luar negeri dalam bentuk bahan mentah. Selain itu, jika dibandingkan dengan sektor pertambangan yang hanya menyerap 71.542 pekerja, angka ini cukup lebih sedikit dibandingkan dengan sektor lainnya seperti sektor pertanian, kehutanan dan perikanan yang bisa menyerap hingga 93.832 pekerja.



Gambar 1. Sektor Batubara di Indonesia

Aktivitas ekspor yang tinggi membuat sektor pertambangan di Kaltim sangat bergantung dengan kondisi perekonomian global. Apabila harga dan permintaan batubara itu tinggi dari luar negeri, maka pertumbuhan ekonomi Kaltim meningkat. Akan tetapi, bila timbul konflik ekonomi yang berdampak pada dunia, sektor ini akan anjlok dan membuat perekonomian Kaltim kembali lesu.

Akibatnya, sektor pertambangan sering menimbulkan kesenjangan. Selain karena jumlah tenaga kerja yang diserap tidak banyak, nilai investasi yang dikeluarkan untuk menjalankan sektor ini cukup besar. Tidak sebanyak menjalankan usaha di sektor riil lainnya seperti, peternakan, perikanan dan pertanian yang hanya membutuhkan investasi sekitar sepersepuluh dari investasi yang dikeluarkan untuk usaha sektor pertambangan.

Produk domestik Kaltim cukup tinggi, seharusnya turut mencerminkan kesejahteraan masyarakatnya. Tetapi kenyataannya tidak. Penghasilan masyarakat di sana tidak sebesar mereka yang bekerja di sektor batubara. Sementara jumlah tenaga kerja cenderung lebih banyak di sektor non-pertambangan. Kondisi ini membuat pendapatan masyarakat di sana dominan lebih rendah. Dikhawatirkan, lama-kelamaan sektor riil akan semakin ditinggal karena potensi pengembangannya tidak cukup menggairahkan.

Ini menjadi peluang yang besar bagi Indonesia untuk segera merancang pengembangan ekonomi dengan menggerakkan sektor riil lain yang menjadi potensi unggul. Upaya pemerintah dapat dilakukan dengan melibatkan masyarakat dalam kegiatan pengembangan di bidang industri maupun perdagangan secara merata dan tentunya lebih meningkatkan kinerja perekonomian IKN di Kaltim kelak.

## Upaya Pengembangan dengan Hilirisasi Industri

Kualitas pertumbuhan ekonomi di Kaltim tidak melulu hanya pada sektor minyak, gas maupun batubara. Beberapa sektor lain juga menjadi potensi yang besar asalkan pengembangannya tepat sasaran. Mengingat Kaltim merupakan daerah yang cukup subur dan dipenuhi dengan kekayaan hutannya, ekonomi Kaltim tidak hanya dapat meningkat dengan menjual sumber daya alam (mentah). Akan tetapi bagaimana barang mentah tersebut menjadi produk turunan yang memiliki nilai jual yang lebih besar sehingga masyarakat di sana lebih sejahtera secara menyeluruh. Selain meningkatkan kesejahteraan dari segi pendapatan, juga dapat mengurangi angka pengangguran karena aktivitas ini akan menyerap tenaga kerja yang lebih banyak.

Sejak tahun 1830-an, Kaltim sudah lebih dulu mengandalkan hutan sebagai andalan perekonomian. Aktivitas perdagangan yang dilakukan dengan kegiatan ekspor damar, rotan dan hasil alam lainnya telah menjadi lapangan usaha utama. Namun, semua perdagangan itu dilakukan hanya sebatas dengan menjual dan mengekspor barang mentah. Tidak sampai pada pengolahan hingga barang jadi. Ini menjadi pola yang biasa dikerjakan dan diadopsi hingga sekarang, seperti mengambil batubara lalu mengekspornya mentah-mentah.

Batubara merupakan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Jadi, pengerukan yang terus-menerus dilakukan akan membuat "emas hitam" itu menjadi barang yang langka. Lama-kelamaan sektor ini tak lagi menjadi primadona-nya Kaltim.

Selain berdampak pada penurunan kualitas lingkungan, sektor ini juga akan mengalami keterbatasan bahkan menjadi langka. Bila ini sampai terjadi dan tanpa ada persiapan akan membuat hilangnya potensi ekonomi masyarakat IKN di Kaltim. Dalam kondisi urgensi seperti ini, maka upaya hilirisasi industri sangat perlu dijadikan sebagai salah satu solusi.

Upaya hilirisasi industri adalah bagaimana masyarakat dilatih dan diberikan pengembangan untuk bisa mengelola sumber daya alam-nya menjadi lebih bernilai. Tidak sekedar mengeksploitasi sumber daya alam, tetapi bagaimana sumber daya alam itu memiliki nilai jual yang lebih tinggi, stabil dan berkelanjutan.

Meskipun daerah Kaltim memiliki sumber daya alam yang sangat kaya, tetapi dalam 10 tahun terakhir ini pertumbuhan Kaltim hampir selalu di bawah pertumbuhan nasional. Itu artinya pentingnya penguatan industri hilir dan sektor lain dilakukan dari sekarang agar perekonomian Kaltim semakin kuat, mengingat IKN di Kaltim kelak.

Pembangunan IKN sedang di dalam proses dan terus berjalan hingga saat ini. Diperkirakan bakal mendatangkan jutaan orang yang akan membangun aktivitas kehidupan baru di sana. Pemerintah dapat mengawali tindakan dengan melakukan pemetaan daerah cocok bertani agar persiapan kebutuhan pangan orang-orang tersebut nantinya dapat terpenuhi. Hal ini dapat mendorong masyarakat untuk bisa mengelola sektor pertanian di daerah IKN dan kemudian dapat dikembangkan ke arah industri maupun perdagangan.



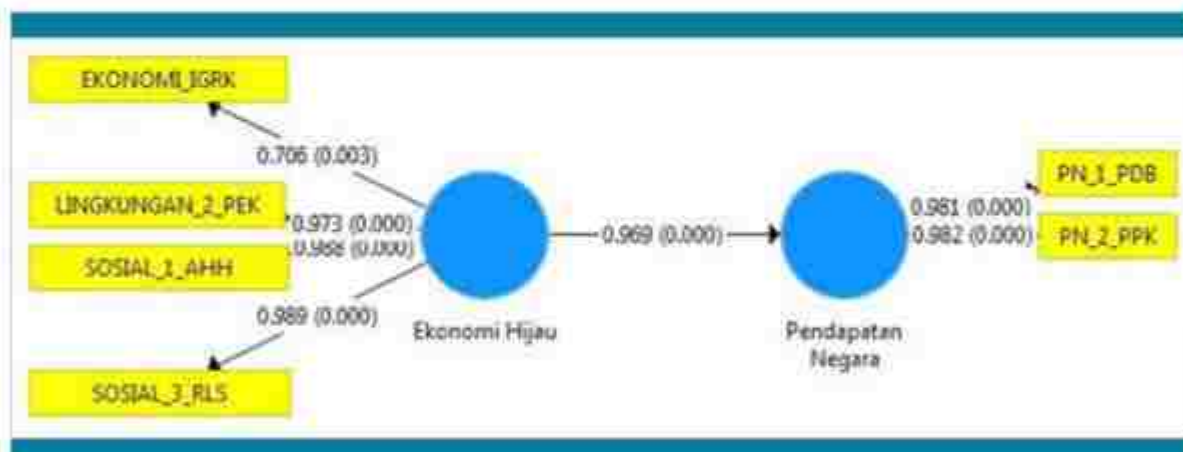
## Hilirisasi Perdagangan dan Ekonomi Hijau

Hilirisasi pengolahan sumber daya alam menjadi penguatan pertumbuhan ekonomi di Kaltim. IKN yang nantinya dipindahkan ke Kaltim, otomatis pengembangan ekonomi yang dirancang tidak hanya bergerak di sektor ekstraktif, melainkan sektor lain seperti sektor riil, jasa perdagangan, dan pariwisata yang ramah lingkungan. Bila masyarakat Kaltim hanya bergantung pada industri ekstraktif secara terus-menerus maka akan berdampak buruk pada perekonomian.

Indonesia sendiri mampu memproduksi batubara sekitar 88,34 juta ton per tahun dan 35 persen bagiannya berasal dari Kaltim. Hilirisasi produk batubara dengan mengubah sumber daya batubara menjadi metanol akan sangat mendukung program biodiesel pemerintah karena di dalam biodiesel terkandung 10 persen metanol. Kebutuhan Indonesia terhadap metanol diperkirakan sebanyak 1,2 juta ton per tahun dan hanya diperoleh dari 1 produsen dengan kapasitas 660.000 ton per tahun.

Itu artinya menjadi peluang besar bagi Indonesia untuk mengembangkan industri hilir batubara, bukan lagi mengekspor mentah-mentah. Tak hanya di Indonesia, peluang ini menjadi kekuatan di kancah internasional dimana Indonesia berkontribusi besar dalam mendukung program biodiesel global.

Penulis pernah melakukan sebuah penelitian terkait penerapan ekonomi hijau terhadap pendapatan negara serta mendapati hasil kontribusi yang positif dan signifikan. Artinya, pembangunan negara harus melibatkan sistem yang ramah lingkungan di masa depan dengan fokus pada arah, kebijakan, organisasi, area, kapasitas dan campur tangan dari setiap pihak sebagai strategi perluasan yang optimal. Hal ini dilakukan agar tercapai aktivitas perekonomian Indonesia yang memperhatikan kondisi sosial dan lingkungannya.



Gambar 2. Model Penelitian Lumbanraja, P.C., Lumbanraja, P.L. (2023)

Dari Gambar 2 tersebut menunjukkan bahwa aktivitas perekonomian, sosial dan lingkungan merupakan hal-hal yang tidak dapat dipisahkan dan harus diperhatikan. Meskipun nantinya menjadi peluang yang besar untuk kemajuan IKN di Kaltim, tetapi pemerintah tidak dapat mengabaikan ketiga hal tersebut sebagai indeks dari penerapan ekonomi hijau. Ekonomi hijau menjadi peran kunci yang dapat meningkatkan kesejahteraan manusia, keadilan sosial, dan bisa mengurangi risiko lingkungan. Transisi Indonesia menuju ekonomi hijau menjadi tugas bersama untuk jangka panjang karena melibatkan komitmen politik negara-negara di dunia yang mau mengubah pembangunan ekonominya yang tidak mengabaikan alam sekitar.

Pemerintah dengan tegas harus mempertimbangkan konservasi sumber daya alam yang lain karena menjadi cadangan dan mengurangi resiko keruntuhan ekologis. Pengembangan hilirisasi perdagangan nantinya harus mengedepankan pengelolaan industri berbasis ramah lingkungan, bahkan sampai pada manajemen limbah yang tidak amburadul.

Beragam kebijakan yang direncanakan dari sekarang merupakan pekerjaan rumah yang paling serius untuk dipersiapkan. Tak hanya pemerintah pusat, sekaligus pemerintah daerah hingga para stakeholder terkait harus memiliki perhitungan yang tepat. Pemerintah mempersiapkan dan menuntun para pelaku usaha serta masyarakat untuk bisa mendukung hilirisasi perdagangan yang ramah lingkungan.

Tantangan-tantangan ini memerlukan komitmen yang kuat dari pejabat fungsional bidang perdagangan untuk terus belajar dan beradaptasi dengan dinamika yang ada. Ini adalah saat yang penting untuk berinvestasi dalam pelatihan dan pengembangan kemampuan serta memastikan bahwa para pejabat tersebut memiliki keseriusan dan wawasan yang mendalam tentang perdagangan internasional dan peran IKN dalam konteks ini. Integrasi dari pemerintah pusat hingga daerah dan berbagai pihak akan menyelesaikan tantangan-tantangan itu.

Tak hanya bagaimana agar pertumbuhan IKN nantinya bakal maju, tetapi para pejabat fungsional bidang perdagangan juga harus peka dari segala aspek. Salah satunya aktivitas perdagangan yang diterapkan kelak harus memperhatikan kondisi lingkungan. Pertumbuhan ekonomi negara yang juga memperhatikan lingkungan akan mendukung tercapainya pembangunan yang berkelanjutan dan menjadi tujuan abadi yang harus dipegang. Artinya, pemerintah harus memastikan bahwa setiap aset alam selalu menyediakan sumber daya yang dapat dikelola dengan baik dan jasa lingkungan. Selain itu, adanya ketegasan mengurangi dan mengelola limbah, menggunakan sumber daya alam secara efisien dan selalu berkomitmen mengambil tindakan mengatasi perubahan.

Dengan kesiapan yang matang dan komitmen untuk berperan aktif dalam mendukung visi Ibu Kota Nusantara, para pejabat fungsional bidang perdagangan dapat memainkan peran penting dalam memastikan bahwa transisi ini berjalan lancar dan memberikan manfaat jangka panjang bagi Indonesia. IKN bukan hanya soal lokasi fisik baru, tetapi juga sebuah peluang untuk meredefinisikan peran Indonesia dalam ekonomi global, dan para pejabat perdagangan memiliki peran penting dalam mewujudkannya.

IKN yang dibangun harus menunjukkan kebesaran bangsa Indonesia, menjadi representasi bangsa yang unggul karena mampu menjamin keberlanjutan sosial, ekonomi dan lingkungannya. IKN nantinya dapat dijadikan sebagai gambaran kota yang dapat dicontoh oleh kota-kota lain yang tersebar di Indonesia. IKN akan menjadi kota besar yang memiliki lingkungan alami, kota yang dilirik bangsa-bangsa di dunia karena bisa memberdayakan material alami dalam mengembangkan usaha perdagangan dan berbasis energi terbarukan.

Membangun IKN di Kaltim sama halnya membangun masa depan bangsa, dan cita-cita negara dalam mensejahterakan masyarakatnya dengan mengembangkan sektor-sektor perdagangan yang berpotensi sebagai keunggulan di Indonesia. Untuk itu pembangunan IKN juga harus disertai dengan pembangunan sumber daya manusianya, khususnya kesiapan para pejabat fungsional bidang perdagangan agar mampu berkontribusi dalam mendukung transformasi Indonesia maju.

## Referensi

1. Lumbanraja, P.C., Lumbanraja, P.L. (2023). Analisis Variabel Ekonomi Hijau Terhadap Pendapatan Indonesia (Tahun 2011-2020) dengan Metode SEM-PLS. *Cendekia Niaga: Journal of Trade Development and Studies*. p-ISSN 2548-3137, e-ISSN 2548-3145. Vol. 7 No. 1: Hal. 61-73
2. <https://www.kompas.id/baca/nusantara/2023/01/07/genap-66-tahun-kaltim-belum-beranjak-dari-lapangan-usaha-ekstraktif> (diakses 19 September 2023)
3. <https://www.kompas.id/baca/polhuk/2022/02/23/ikn-nusantara-dibangun-untuk-tunjukkan-kebesaran-bangsa-indonesia> (diakses 19 September 2023)
4. <https://www.kompas.id/baca/nusantara/2020/10/13/kuatkan-ekonomi-kaltim-dengan-industri-hilir-dan-ramah-lingkungan> (diakses 19 September 2023)

# KESIAPAN PEJABAT FUNGSIONAL BIDANG KEMETROLOGIAN DALAM MELAKUKAN TRANSISI MENUJU IBU KOTA NUSANTARA

Mochamad Ibnu Athoillah

Fungsional Penera Ahli Madya, Direktorat Metrologi

## Abstrak

Artikel ini membahas konsep Ibu Kota Nusantara (IKN) sebagai upaya Pemerintah Pusat untuk memindahkan pusat pemerintahan negara dari Jakarta ke lokasi baru di luar Pulau Jawa. Fokus utama artikel adalah peran fungsional sektor perdagangan terutama fungsional bidang kemetrologian dalam mengembangkan dan mendukung IKN. Sektor perdagangan memiliki peran penting dalam menciptakan ekosistem bisnis yang berkelanjutan di IKN dan memberikan layanan yang dibutuhkan oleh perusahaan dan penduduk IKN. Ini juga membahas pentingnya infrastruktur pengukuran yang canggih, penciptaan lapangan kerja, pemberdayaan ekonomi regional, modernisasi perdagangan, dan dampak transisi ke IKN terhadap sektor perdagangan.

Selain itu, artikel ini juga menjelaskan tujuan yang mencakup identifikasi tantangan kesiapan pejabat fungsional kemetrologian dalam menghadapi perubahan menuju IKN, analisis perubahan kebijakan dan regulasi, evaluasi kebutuhan pendidikan dan pelatihan, analisis dampak terhadap sektor perdagangan, dan memberikan rekomendasi serta solusi yang relevan.

Ruang lingkup artikel meliputi identifikasi hambatan kesiapan, analisis perubahan kebijakan, evaluasi kebutuhan pelatihan, analisis dampak sektor perdagangan, dan rekomendasi untuk mendukung transisi yang sukses.

Pejabat fungsional kemetrologian memiliki peran penting dalam mengatur, mempromosikan investasi, memantau, dan mendukung perdagangan di IKN. Mereka juga harus menghadapi tantangan seperti perubahan lingkungan kerja, perubahan kebijakan, pemindahan tenaga kerja, pengembangan infrastruktur, kebutuhan pendidikan, kolaborasi antar-lembaga, dan pemahaman dampak terhadap sektor perdagangan.

Dengan memahami tantangan ini, pejabat fungsional kemetrologian dan pemangku kepentingan lainnya dapat merencanakan persiapan yang tepat dan mengidentifikasi solusi untuk menghadapi perubahan yang terkait dengan IKN. Kesuksesan IKN akan bergantung pada kolaborasi lintas-sektor dalam menghadapi perubahan ini secara efektif dan berkelanjutan, untuk mewujudkan visi pemerintah akan pusat pemerintahan yang lebih baik dan ekonomi yang lebih kuat di IKN.

## 1. Pendahuluan

Indonesia, sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, memiliki tantangan unik dalam mengelola pemerintahan pusatnya. Ibu kota negara, Jakarta, telah lama menjadi pusat administrasi, politik, dan ekonomi Indonesia. Namun, pertumbuhan yang pesat dan masalah infrastruktur yang semakin parah di Jakarta telah mendorong pemerintah untuk mencari alternatif yang lebih berkelanjutan. Inilah yang mendasari konsep IKN.

Konsep IKN muncul sebagai visi pemerintah Indonesia untuk memindahkan pusat pemerintahan negara ke lokasi baru di luar Pulau Jawa. IKN akan menjadi rumah bagi administrasi pusat, lembaga pemerintah, dan infrastruktur penting lainnya. Konsep ini bukan hanya tentang pengurangan beban Jakarta, tetapi juga menciptakan pusat pemerintahan yang lebih modern, efisien, dan berkelanjutan di wilayah yang lebih strategis.

Lokasi IKN dipilih dengan pertimbangan yang matang, termasuk faktor geografis, sosial, dan ekonomi. Ini juga bertujuan untuk mendorong pengembangan ekonomi di wilayah Indonesia yang kurang berkembang, sehingga membawa dampak positif bagi pertumbuhan nasional secara keseluruhan.

Metrologi legal sebagai garda terdepan dalam pengamanan perdagangan melalui sistem pengukuran memiliki peran sentral dalam pengembangan dan operasi IKN. Ini sejalan dengan upaya pemerintah untuk menciptakan ekosistem bisnis yang berkelanjutan dan mendukung pertumbuhan ekonomi di IKN.



Dengan demikian, pengenalan konsep IKN membuka peluang baru dan tantangan unik, dengan sektor perdagangan memegang peran utama dalam mewujudkan visi pemerintah untuk pusat pemerintahan yang lebih baik dan ekonomi yang lebih kuat. Penting untuk memahami bahwa kesuksesan IKN akan bergantung pada kesiapan dan kolaborasi dari berbagai sektor, termasuk sektor perdagangan, dalam menghadapi perubahan ini secara efektif dan berkelanjutan.

Berikut beberapa alasan mengapa sektor perdagangan menjadi sangat penting dalam konteks IKN:

1. IKN akan menjadi pusat ekonomi baru di Indonesia, dengan potensi untuk menjadi magnet investasi domestik dan asing. Sebagai bagian integral dari ekosistem bisnis, metrologi legal akan berperan dalam menyediakan layanan dan dukungan yang dibutuhkan oleh perusahaan dan penduduk IKN.
2. Metrologi legal memainkan peran penting dalam menjaga aliran barang dan layanan yang lancar dan akurat. Dibutuhkan infrastruktur pengukuran yang canggih dan efisien untuk mendukung operasi bisnis dan administratif di IKN.
3. Pembangunan IKN akan menciptakan peluang pekerjaan yang signifikan. Metrologi legal akan menjadi salah satu sektor yang berkontribusi dalam menciptakan lapangan kerja baru, mulai dari ritel hingga distribusi dan layanan terkait.
4. IKN juga diharapkan mendorong pertumbuhan ekonomi di wilayah sekitarnya. Metrologi legal dapat berperan dalam menghubungkan IKN dengan pasar lokal, regional, nasional maupun internasional sehingga memfasilitasi pertumbuhan ekonomi yang lebih merata di sekitarnya.
5. Pengembangan IKN adalah kesempatan untuk mendorong modernisasi sektor pengukuran dan pengujian UTTP, termasuk e-commerce, rantai pasokan yang terintegrasi, dan teknologi informasi yang canggih. Ini akan membantu meningkatkan efisiensi dan daya saing perdagangan Indonesia.

Tujuan utama dari Artikel ini adalah sebagai berikut :

1. Mengidentifikasi tantangan kesiapan yang dihadapi oleh pejabat fungsional kemetrolgian dalam menghadapi transisi ke Ibu IKN. Hal ini akan membantu dalam pemahaman yang lebih baik tentang aspek-aspek yang perlu diperhatikan dalam persiapan untuk IKN.

2. Menganalisis perubahan kebijakan dan regulasi yang mungkin diperlukan atau telah diimplementasikan dalam konteks transisi ke IKN. Hal ini akan membantu dalam mengevaluasi dampak perubahan kebijakan terhadap pejabat fungsional kemetrolgian.

3. Menilai kebutuhan pendidikan dan pelatihan khusus bagi pejabat fungsional kemetrolgian dalam persiapan untuk IKN. Ini termasuk mengevaluasi apakah ada program pelatihan teknis yang memadai untuk mempersiapkan mereka menghadapi tugas-tugas yang berkembang di IKN.

4. Menganalisis dampak transisi ke IKN terhadap sektor kemetrolgian secara keseluruhan, termasuk bagaimana perubahan ini dapat memengaruhi pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, dan modernisasi perdagangan.

5. Memberikan rekomendasi yang konkret dan solusi untuk mendukung pejabat fungsional bidang perdagangan dalam mempersiapkan diri untuk IKN. Rekomendasi ini akan dirancang untuk mengatasi tantangan dan memaksimalkan peluang yang mungkin muncul selama proses transisi.

Dengan tujuan-tujuan tersebut, artikel ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih dalam tentang kesiapan pejabat fungsional bidang perdagangan dalam menghadapi transisi menuju IKN serta memberikan kontribusi positif dalam mendukung perencanaan dan implementasi IKN yang sukses.

Ruang Lingkup artikel ini adalah menyatakan batasan dan ruang lingkup penelitian yaitu sebagai berikut:

1. Identifikasi dan analisis tantangan yang dihadapi oleh pejabat fungsional kemetrolgian dalam menghadapi transisi ke IKN. Ini akan mencakup penelitian mendalam tentang berbagai hambatan dan perubahan yang mempengaruhi pejabat fungsional dalam tugas-tugas mereka.
2. Analisis perubahan kebijakan dan regulasi yang terkait dengan sektor kemetrolgian yang mungkin diperlukan atau telah diimplementasikan dalam konteks transisi ke IKN. Analisis ini akan membantu dalam memahami dampak perubahan kebijakan terhadap pejabat fungsional.
3. Menilai kebutuhan pendidikan dan pelatihan khusus bagi pejabat fungsional metrologi legal dalam persiapan untuk IKN. Ini akan mencakup penelusuran program pelatihan yang tersedia dan mengidentifikasi apakah ada kekurangan dalam hal pelatihan yang relevan.

4. Analisis dampak transisi ke IKN terhadap sektor perdagangan terutama yang menggunakan UTTP secara keseluruhan. Ini akan mencakup bagaimana perubahan ini dapat memengaruhi pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, dan modernisasi perdagangan.
5. Artikel ini juga akan menghasilkan rekomendasi konkret dan solusi yang dapat mendukung pejabat fungsional bidang perdagangan dalam mempersiapkan diri untuk IKN. Rekomendasi ini akan didasarkan pada temuan penelitian dan akan dirancang untuk mengatasi tantangan dan memaksimalkan peluang yang mungkin muncul selama proses transisi.

Dengan ruang lingkup ini, penelitian akan memberikan gambaran komprehensif tentang kesiapan pejabat fungsional bidang perdagangan dalam menghadapi transisi ke IKN, serta memberikan rekomendasi yang relevan untuk mendukung proses transisi dengan sukses.

## 2. Peran Pejabat Fungsional Metrologi Legal dalam IKN

Pejabat fungsional merujuk kepada individu yang memiliki tugas dan tanggung jawab khusus di dalam suatu departemen atau lembaga pemerintahan, dan dalam konteks ini, mereka fokus pada kemetrologian. Peran pejabat fungsional bidang metrologi legal mencakup sejumlah fungsi penting yang berkaitan dengan pengaturan, pemantauan, dan fasilitasi berbagai aspek perdagangan dalam negeri.

Peran pejabat fungsional kemetrologian menjadi penting dalam berbagai aspek IKN karena beberapa alasan sebagai berikut:

1. Pejabat fungsional penera ahli bertanggung jawab untuk menjamin UTTP yang digunakan untuk kepentingan umum tepat dan presisi. Mereka memastikan bahwa kegiatan kemetrologian di IKN berjalan sesuai dengan regulasi yang berlaku.
2. Mereka memainkan peran kunci dalam mempromosikan kegiatan metrologi legal terutama di sektor perdagangan. Ini mencakup mendukung tumbuhnya penanaman modal domestik dan asing, menciptakan iklim usaha yang kondusif, dan menarik perusahaan-perusahaan untuk beroperasi di IKN.
3. Pejabat fungsional kemetrologian juga bertugas untuk memantau dan mengontrol setiap transaksi perdagangan dalam negeri dan luar negeri. Hal ini penting untuk menjaga keamanan nasional, menghindari perdagangan yang tidak fair, serta memastikan kepatuhan terhadap peraturan perdagangan.

4. Mereka mendukung fasilitasi perdagangan dengan menyediakan layanan yang memudahkan ekspor dan impor. Ini mencakup penyediaan fasilitas laboratorium pengujian berstandar internasional, pelayanan perizinan yang cepat, efektif dan efisien, serta dukungan teknis bagi pelaku usaha.

Pengamanan transaksi perdagangan melalui kegiatan tera, tera ulang maupun izin tipe memiliki kontribusi yang sangat penting dalam pembangunan dan pertumbuhan IKN dimana sektor perdagangan berperan dalam menggerakkan IKN, yaitu antara lain:

1. Perdagangan adalah pendorong utama pertumbuhan ekonomi. Dengan memfasilitasi aliran barang dan jasa, sektor perdagangan menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan pendapatan masyarakat, yang berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi IKN.
2. IKN dapat memanfaatkan sektor perdagangan untuk mendiversifikasi ekonominya. Ini dapat mencakup pengembangan sektor-sektor ekonomi baru yang berorientasi ekspor atau memperluas pangsa pasar bagi produk-produk lokal.
3. Pertumbuhan IKN memerlukan investasi dalam infrastruktur yang mendukung perdagangan, seperti pelabuhan, bandara, dan jaringan transportasi yang efisien. Ini memberikan peluang investasi yang signifikan.
4. IKN akan menjadi gerbang utama untuk perdagangan internasional Indonesia. Pejabat fungsional bidang perdagangan termasuk fungsional bidang kemetrologian akan berperan dalam negosiasi perjanjian perdagangan, pemantauan aliran barang dan jasa, serta mempromosikan ekspor alat-alat ukur yang diproduksi oleh industri di Indonesia.
5. Seiring dengan perkembangan IKN, sektor perdagangan akan mendorong modernisasi dan inovasi dalam manajemen rantai pasokan, teknologi perdagangan, dan proses bisnis.

Dalam konteks Ibu Kota Nusantara, peran pejabat fungsional bidang perdagangan terutama bidang kemetrologian sangat penting untuk mendukung visi pembangunan dan pertumbuhan yang berkelanjutan. Mereka tidak hanya mengatur, memberikan kepastian dan memfasilitasi perdagangan, tetapi juga menjadi penggerak ekonomi yang membantu menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan, dan memperluas peluang bisnis di IKN.

### 3. Kesiapan Pejabat Fungsional Bidang K metrologian

Identifikasi dan analisis tantangan kesiapan yang dihadapi oleh pejabat fungsional bidang k metrologian dalam menghadapi transisi ke IKN sangat penting untuk memahami aspek-aspek yang perlu diperhatikan dalam persiapan untuk IKN. Berikut adalah beberapa tantangan yang mungkin dihadapi oleh pejabat fungsional bidang perdagangan, antara lain :

1. Transisi ke IKN akan membawa perubahan signifikan dalam lingkungan kerja pejabat fungsional teknis. Mereka harus beradaptasi dengan lokasi, infrastruktur, dan fasilitas baru di IKN. Tantangan ini melibatkan penyesuaian dengan lingkungan yang mungkin berbeda dari Bandung.
2. Kemungkinan adanya perubahan kebijakan dan regulasi terkait metrologi legal di IKN dapat menjadi tantangan besar. Pejabat fungsional harus memahami perubahan ini dan bersiap untuk mengikuti peraturan baru yang mungkin diberlakukan.
3. Seiring dengan pemindahan pusat pemerintahan, pemindahan tenaga teknis k metrologian menjadi penting. Pejabat fungsional perlu memastikan bahwa tim mereka dapat berpindah dengan lancar ke IKN. Ini melibatkan perencanaan logistik, perumahan, dan adaptasi sosial.
4. Pembangunan infrastruktur yang memadai di IKN menjadi faktor penting. Pejabat fungsional harus menghadapi tantangan terkait dengan infrastruktur yang belum selesai atau mungkin perlu ditingkatkan, termasuk transportasi, komunikasi, dan utilitas.
5. Pejabat fungsional bidang perdagangan mungkin memerlukan pelatihan tambahan untuk menghadapi perubahan lingkungan kerja dan kebijakan baru yang berlaku di IKN. Ini mencakup pemahaman yang lebih baik tentang kondisi dan kebutuhan perdagangan di wilayah baru tersebut.
6. Transisi ke IKN dapat mengharuskan pejabat fungsional berkolaborasi dengan lembaga lain yang terlibat dalam IKN. Tantangan ini melibatkan koordinasi antar lembaga dan peran yang lebih besar dalam pembangunan IKN.
7. Tantangan utama adalah memahami dampak transisi terhadap sektor k metrologian secara keseluruhan. Ini termasuk bagaimana perubahan ini dapat memengaruhi pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, dan modernisasi sistem transaksi perdagangan di seluruh wilayah terkait IKN.

Analisis terhadap tantangan-tantangan ini akan membantu pejabat fungsional k metrologian dan pemangku kepentingan lainnya untuk merencanakan persiapan yang tepat untuk IKN. Selain itu, hal ini juga akan memungkinkan identifikasi solusi dan strategi yang sesuai untuk mengatasi setiap tantangan yang mungkin muncul selama proses transisi ke IKN.

### 4. Kesimpulan

Konsep IKN sebagai inisiatif Pemerintah Pusat untuk memindahkan pusat pemerintahan ke lokasi baru di luar Pulau Jawa. IKN diharapkan menjadi pusat administrasi yang lebih modern, efisien, dan berkelanjutan. Dalam konteks ini, sektor perdagangan memiliki peran sentral dalam pengembangan dan operasi IKN.

IKN diharapkan menjadi pusat ekonomi baru di Indonesia, menarik investasi domestik dan asing, serta menciptakan lapangan kerja yang signifikan. Sektor perdagangan akan menjadi salah satu pilar utama dalam mendukung pertumbuhan ekonomi IKN. Ini mencakup pengaturan perdagangan, promosi investasi, pemantauan aliran barang dan jasa, fasilitasi perdagangan, dan modernisasi sektor perdagangan.

Namun, pejabat fungsional k metrologian sebagai bagian dari fungsional bidang perdagangan akan menghadapi sejumlah tantangan dalam persiapan untuk IKN, termasuk perubahan lingkungan kerja, perubahan kebijakan dan regulasi, pemindahan tenaga kerja, pengembangan infrastruktur, kebutuhan pendidikan dan pelatihan, kolaborasi antar lembaga, dan dampak terhadap sektor perdagangan secara keseluruhan.

Untuk mengatasi tantangan ini, perlu ada pemahaman yang mendalam tentang kesiapan dan kolaborasi antar sektor, termasuk sektor perdagangan, dalam menghadapi perubahan ini secara efektif dan berkelanjutan. Identifikasi tantangan ini akan memberikan rekomendasi serta solusi yang relevan untuk mendukung pejabat fungsional bidang perdagangan dalam mempersiapkan diri untuk IKN.

Dengan demikian, kesuksesan transisi fungsional k metrologian ke IKN akan bergantung pada persiapan yang matang dari berbagai pihak, dan sektor perdagangan akan menjadi salah satu pilar utama dalam mewujudkan visi pemerintah untuk menjadikan IKN sebagai pusat pemerintahan yang lebih baik dan ekonomi yang lebih kuat.

## 5. Saran dan Rekomendasi

1. Kolaborasi antara berbagai lembaga pemerintah yang terlibat dalam transisi ke IKN sangat penting. Rekomendasi ini mencakup pembentukan forum atau kelompok kerja lintas-lembaga yang bertujuan untuk berbagi informasi, menyelesaikan masalah bersama, dan memastikan koordinasi yang efisien dalam persiapan IKN. Pembentukan tim kerja lintas-lembaga dapat membantu mengatasi berbagai tantangan yang muncul.
2. Identifikasi kebutuhan pendidikan dan pelatihan yang lebih baik bagi pejabat fungsional bidang kemetrolagian. Dalam hal ini, disarankan juga untuk mengembangkan program pelatihan teknis dan manajerial yang disesuaikan dengan kebutuhan individu dan tim. Program ini harus mencakup pemahaman tentang perubahan kebijakan, manajemen transisi, dan peningkatan kompetensi teknis kemetrolagian yang relevan.
3. Melakukan penelitian dan kajian yang lebih mendalam untuk mengevaluasi dampak transisi ke IKN terhadap kegiatan metrologi legal di Indonesia secara menyeluruh. Penelitian ini dapat mencakup analisis dampak ekonomi yang lebih rinci, pemantauan *spillover effects*, dan evaluasi dampak sosial. Hasil dari penelitian ini dapat digunakan untuk mengidentifikasi kebijakan dan inisiatif yang perlu diterapkan untuk mengoptimalkan manfaat ekonomi dan sosial dari transisi ini.
4. Membuat mekanisme pemantauan dan penilaian yang efektif untuk mengikuti perubahan kebijakan dan regulasi terkait regulasi teknis kemetrolagian dan sistem perdagangan di IKN. Pejabat fungsional bidang kemetrolagian harus selalu terinformasi tentang peraturan yang berlaku agar dapat beradaptasi dengan cepat. Rekomendasi ini juga mencakup advokasi untuk mengambil langkah-langkah proaktif dalam membentuk peraturan yang mendukung pertumbuhan perdagangan di Indonesia.
5. Memastikan bahwa infrastruktur yang mendukung kegiatan kemetrolagian, termasuk laboratorium pengelolaan standar ukuran metrologi legal, laboratorium pengujian tipe, dan laboratorium pengujian UTTP dalam rangka tera dan tera ulang di IKN memadai. Ini termasuk investasi dalam transportasi, komunikasi, serta fasilitas logistik yang efisien. Hal ini mencakup pemantauan progres infrastruktur, serta advokasi untuk mendapatkan sumber daya yang diperlukan untuk memastikan infrastruktur yang memadai.
6. Mengembangkan rencana pemindahan tenaga teknis termasuk reparatir yang komprehensif. Ini mencakup aspek-aspek seperti perumahan, fasilitas sosial, dan dukungan psikologis untuk pejabat fungsional yang harus berpindah ke IKN. Rekomendasi ini juga mencakup pemantauan pelaksanaan rencana pemindahan tenaga teknis kemetrolagian.
7. Mengambil langkah-langkah konkret untuk mempromosikan investasi di sektor kemetrolagian di IKN. Ini mencakup peningkatan daya tarik bagi investor domestik dan asing, serta menciptakan lingkungan usaha yang kondusif. Pemerintah juga harus mendukung pengembangan ekonomi di IKN dengan mengidentifikasi sektor-sektor kemetrolagian potensial yang dapat dikembangkan.
8. Mengkomunikasikan secara efektif kepada pejabat fungsional kemetrolagian tentang perubahan yang akan terjadi dalam konteks IKN. Sosialisasi yang baik akan membantu mengurangi ketidakpastian dan kebingungan, sehingga memudahkan adaptasi.
9. Mendorong penggunaan teknologi dalam sektor perdagangan untuk meningkatkan efisiensi dan daya saing. Ini mencakup promosi e-commerce, penggunaan sistem manajemen rantai pasokan yang terintegrasi, dan teknologi informasi yang canggih dalam proses perdagangan.
10. Melakukan evaluasi berkala terhadap persiapan IKN dan melakukan penyesuaian jika diperlukan. Proses evaluasi ini harus mencakup pengukuran kemajuan, identifikasi masalah baru, dan pengembangan solusi yang relevan.

*Last but not least*, menjadi sangat penting bahwa memastikan pejabat fungsional bidang kemetrolagian dan pemangku kepentingan berkolaborasi terlibat dalam persiapan transisi menuju IKN sehingga dapat menghadapi tantangan dengan lebih efektif dan memaksimalkan peluang yang muncul selama proses transisi menuju Ibu Kota Nusantara yang berkelanjutan.

# LOGO RESMI IKN NUSANTARA

## Makna dan Filosofi Logo

Logo IKN Nusantara ini bertema "**Pohon Hayat**", yang diresmikan oleh Presiden Joko Widodo. Logo ini terinspirasi dari bentuk penghayatan simbolisme pohon dari barat sampai timur Indonesia. Logo ini merepresentasikan **Nusantara sebagai kota dunia** untuk semua.

### 17 kembang mekar

Melambangkan tanggal kemerdekaan Indonesia

### Perisai Talawang

Simbol pertahanan, diinspirasi dari perisai Talawang asal Kalimantan

### 7 batang

Representasi tujuh pulau besar di Indonesia

### Alur Sungai

Representasi bahari Indonesia dan simbol masyarakat maritim.

### 5 akar

Melambangkan lima butir Pancasila, Ideologi bangsa

### Pohon hayat

Simbol kehidupan baru





KEMENTERIAN  
PERDAGANGAN  
REPUBLIK INDONESIA



## KONTAK

### PUSAT PEMBINAAN JABATAN FUNGSIONAL PERDAGANGAN



pusbinjfdag



Pusbin JF Perdagangan



pusbinjfp@kemedag.go.id  
pusbin.jfkemendag@gmail.com



**Konsultasi**  
082118687772



**Pengaduan**  
082120000629



**Konsultasi SELAMI**

Selasa & Kamis, pukul 09.00–15.00 WIB

<http://kemend.ag/LayananKonsultasiSelamiJFP>



ISSN 2984-2124



9

772964

212003

SEKJEN/MJL/10/XII/2023